



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Pertanian RI, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food.
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Waktu : pukul 10.00 WIB – 17.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S. E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : 1. Ketersediaan stok pangan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional;
2. Strategi peningkatan produksi pertanian tahun 2022;
3. Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI;
4. Program prioritas tahun 2023; dan
5. Isu-isu aktual lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6 dari 11 orang Anggota
 - 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV
 - 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 - 3) Ir. Mindo Sianipar
 - 4) Drs. I Made Urip, M.Si.
 - 5) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
 - 6) Maria Lestari, S.Pd.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya
2 dari 8 orang Anggota
 - 1) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 - 2) Alien Mus
 3. Partai Gerakan Indonesia Raya

4 dari 7 orang Anggota

- 1) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
- 2) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
- 3) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
- 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess., M.Sc.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

4 dari 6 orang Anggota

- 1) Rusdi Masse Mappasessu/Wakil Ketua Komisi IV
- 2) Ir. Abdullah Tuasikal
- 3) Yessy Melania, S.E.
- 4) Ir. Hj. Sri Kustina

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

5 dari 6 orang Anggota

- 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV
- 2) H. Muhtarom, S.Sos.
- 3) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
- 4) Drs. H. Ibnu Multazam
- 5) Edward Tanur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat

4 dari 5 orang Anggota

- 1) DR. Suhardi Duka, M.M.
- 2) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
- 3) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
- 4) Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

3 dari 5 orang Anggota

- 1) drh. H. Slamet
- 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
- 3) Saadiah Uluputy, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

1 dari 4 orang Anggota

- 1) Haerudin, S.Ag., M.H.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

0 dari 2 orang Anggota

-

B. Pemerintah

1. Menteri Pertanian RI;
2. Direktur Utama Perum Bulog,
3. Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
4. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI.

Izin: Anggota Komisi IV DPR RI
Fraksi Partai Amanat Nasional
- H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bismillahirrohmanirohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebelum saya memulai membuka acara rapat pagi ini ada pergantian Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat, yang semula Pak Muslim A-523 digantikan Muhammad Dhevy Bijak Pawindu A-572. Silakan memperkenalkan diri termasuk Dapilnya supaya nanti dapat Bansos. Silakan.

F-P. DEMOKRAT (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Izin Ketua. Terima kasih banyak.

Nama saya Muhammad Dhevy Bijak Pawindu. Dapil dengan Wakil Ketua kita Bapak Rusdi Masse, Dapil Sulsel III dari Fraksi Partai Demokrat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Selamat pagi.

Salam sejahtera buat kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV.

Saya lihat Pak Menteri belum datang, ya? Itu yang pertama.

Para Eselon I.

Yang terhormat Saudara Direktur Utama Perum Bulog.

Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero.

Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau yang dikenal sekarang Holding Pangan ID Food, serta

Hadirin yang kami hormati.

Sebelum saya membuka rapat ini, saya minta persetujuan ke forum ya supaya kita mengambil keputusan harus jelas. Saudara Menteri belum hadir ya, ini kalau saya lihat Kementerian ini Sekjen ini makin *ngaco* kerjanya. Mengirim surat jam 12 malam ke Sekretariat. Sekretariat mengirim ke saya Jam 4 pagi pengunduran jadwal. Maka saya juga bingung harusnya kan Saudara Sekjen ini mengatur tata sekretariat di Kementan, bukan ikut jalan-jalan ke Lampung. Saya kaget juga kemarin begitu *landing* ada yang laporan sama saya kepala bandara, 13.40 mendarat di Lampung, pukul 18.00 WIB *take off* ke Jakarta. Kalau saya buka semua di sini nanti kan enggak enak, acaranya apa juga enggak enak nanti kalau saya buka. Bagi saya enggak ada masalah.

Jadi saya selaku pimpinan rapat meminta masukan, ya meminta masukan kepada Fraksi ya kan apakah rapat ini dilanjutkan atau diskors atau ditunda entah sampai kapan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Silakan mewakili PDI Perjuangan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Berdasarkan sesuai Tatib ya ini agenda raker sudah teragendakan dari jauh-jauh hari. Saya lama-lama ini bingung sama pembantunya Pak Presiden ini, kasihan amat yang kena Presidennya terus. Sesuai Tatib kalau raker yang hadir Menteri Pak. Kami di sini menjaga marwah parlemen, ya kami di sini wakil rakyat Pak. Permasalahan Anda banyak, tapi Anda kayaknya selalu berpikir enggak penting begitu ya. Kami juga bisa marah Pak ya. Jadi tolonglah kita mengerti tapi ya tadi saya enggak tahu Pak Ketua bilang ada agenda apa apa apa. Kalau agendanya Ratas, Ratas yang mana Pak? Mohon maaf posisi Pak Presiden di mana juga kita tahu ya. Saya minta lah ini pokoknya kalau menterinya enggak datang ya sudah, Anda enggak mau bahas anggaran memang enggak ada ini Pawindu ada orang Banggar ada apa ya sudah. Kalau enggak butuh sama DPR kita bikin betul kalian enggak perlu sama DPR.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kesimpulannya?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Tunda sampai menterinya hadir karena agenda undangan rapat itu Pak Pimpinan, jelas kan 1, 2, 3, 4 ya. Ini kalau DPR terus-terusan dibikin kayak begini ya mohon maaf ya. Tolong Pimpinan pokoknya ya kalau memang ini menterinya ya bila perlu kalau menterinya kayak-kayak gini ya suruh mundur saja kalau enggak sanggup mengurus pertanian.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Fraksi Gerindra silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Singkat saja, kita bukan tunda mungkin di skors Pak karena ini harinya masih panjang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Fraksi Golkar.

F-P. GOLKAR (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Sesepakat dengan Gerindra Pak Ketua. Kalau menterinya tidak hadir sampai jam berapa kita skors baru kita tunda. Mungkin Pak Menteri ada urusan lain walaupun Raker sudah teragendakan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Fraksi PAN.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Ketua.

Sesepakat dengan pendapat yang terdahulu kita skors dan mohon dimohonkan konfirmasi jam berapa Pak Menteri bisa hadir. Jadi kita jelas

skorsnya berapa menit, berapa jam atau kita tunda kalau memang enggak bisa hari ini kita tunda.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Fraksi PKS.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim.

Sesuai Tatib bahwa kalau Raker memang harus ada menteri karena menterinya tidak ada diskors, diskors itu ada aturannya 1x24 jam begitu ya. Kalau enggak harus ditunda. Tinggal kita minta konfirmasi saja Pak Ketua kira-kira menterinya sanggup kapan.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih. PKB.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih Ketua.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi PKS saya kira perlu minta kepastian kepada Pak Sekjen, jam berapa Pak Menteri bisa hadir. Kalau memang hari ini tidak bisa hadir ya ditunda.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Fraksi Demokrat.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Saya kira penyakit Kementerian Perdagangan ini sudah mulai masuk..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya betul, betul, sudah betul, Bapak diam saja dia lagi ngomong diam.

Lanjut.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sudah mulai masuk menjangkiti juga Kementerian Pertanian ini, jadi bahaya ini. Saya menganggap memang marwah Dewan ini perlu dijaga ini karena kalau kita enggak jaga ya susah. Jadi kalau saya, Pimpinan, saya ingin waktu yang pas tepat. Kalau memangnya tidak bisa datang sampai dengan Jam 14.00 ya tunda sampai, yang namanya Raker kan harus ada menteri tapi kalau kita tidak ada kejelasan apa namanya waktu ya tunda. Saya punya kemampuan menunggu hanya sampai Jam 14.00, kalau tidak saya pulang.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Fraksi PPP ada yang mewakili?

Nah, ini kan kalau Golkar kan jagonya di situ. Jadi saya tanya sekali lagi, diskors atau kita tunda sampai waktu ditentukan? Eh Nasdem belum Nasdem, mana Nasdem?

Silakan.

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Terima kasih Pak Ketua.

Ya kalau sudah Tatibnya Pak Menteri harus datang, saya kira ya silakan saja diskors tapi cuma kami tawarkan saja, apa kita enggak jalan dulu ya ini kan ada, ada Pak Sekjen beserta staf-stafnya karena apabila memang kita Tatib itu harus tapi kan kita juga kejar waktu ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi kesimpulannya apa Pak Tuasikal?

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Kesimpulannya kalau memang teman-teman skors, silakan tapi kita skors mungkin ada koordinasi dulu dari Pak Sekjen biar jelas kita skors sampai jam berapa.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Bu Pimpinan ada yang mau disampaikan? Tidak ada.

Kenapa kemarin sore tidak kirim surat ke Komisi IV? Kenapa harus jam 12 malam? Kami ini bukan pengangguran. Saya jam 4 pagi sudah bangun baru saya terima WA-nya. Semua ini pagi-pagi sudah datang ke sini karena tahu jadwalnya jam 10. Ini bagaimana ini? Saya tidak menyalahkan Menteri Pertanian tapi yang saya salahkan ada Eselon I termasuk Sekjen, ini loh. Cobalah tertib administrasi, tertib. Jujur kalau secara hati kecil saya kalau saya sepihak saya batalkan, saya tunda entah sampai kapan tetapi saya sebagai Pimpinan mendengar masukan juga dari teman-teman fraksi lain ya. Sekarang kita tanya Sekjen jam berapa dan saya jujur ini baru diterima kemarin, jadi semakin lama semakin seenak-enaknya ini.

Sesuai dengan tatib sudah saya katakan tiga hari sebelum rapat, bahan sudah ada di Anggota masing-masing, kemarin sore baru tiba, ini. Zaman dulu sebelum Pak Kasdi jadi Sekjen ya, Minggu-Sabtu itu kalau kita rapat Senin, Jumat itu sudah sampai di rumah Anggota masing-masing. Kok sekarang makin seenaknya begitu. Saya tidak menyalahkan menteri dalam hal ini karena mungkin tiba-tiba dipanggil, tapi setahu saya kok dipanggilnya dari kemarin ya, jam 17.00 sudah ada undangan dipanggil ke Istana katanya ini katanya loh. Kenapa tidak ditindaklanjuti, untuk apa kami datang pagi-pagi ya.

Coba saya minta penjelasan Anda pertanggung jawabkan.

SEKJEN KEMENTAN RI:

Baik terima kasih Pak Pimpinan.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua, para Anggota Komisi IV yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati juga dari BUMN teman-teman Eselon I dan Bapak/Ibu sekalian peserta Raker yang kami muliakan.

Kami laporkan Pak Ketua, pertama atasan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan ini. Tentu janji saya sebagai Sekjen tidak akan mengulang itu terutama di dalam tertib administrasi yang diharapkan oleh Pak Ketua, satu.

Yang kedua, memohon maaf sebesar-besarnya memang daftar jadwalnya kemarin mendadak Bapak Menteri dan kemudian kami..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Stop.

SEKJEN KEMENTAN RI:

Siap.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadwalnya kemarin bukan tadi pagi. Anda mengatakan begitu kan? Lanjutkan.

SEKJEN KEMANTAN RI:

Eh dipanggil oleh Bapak Presiden kemarin memang kemudian kami koordinasikan, sedianya Bapak, Bapak Menteri meminta juga kepada Bapak Wamen seandainya itu diperkenankan oleh Komisi IV itu diwakilkan oleh Pak Wamen kemudian menyusul Bapak Menteri setelah rapat dengan Bapak Presiden. Ternyata terakhir setelah kami komunikasikan ini cukup terlambat respons dari Pak Wamen terus terang saja. Kami tidak membela tetapi itu fakta yang saya ceritakan bahwa Pak Wamen pada akhirnya itu sudah Maghrib saya dibilang bahwa Pak Wamen tidak bisa mewakili.

Nah, itulah maka terus kami menyusun suratnya juga agak terlambat karena suratnya itu tentunya ada perencanaan dua versi. Versi yang pertama diperkenankan apa tidak untuk diwakili Pak Wamen terlebih dahulu baru Pak Menteri, kemudian yang usulan yang kedua adalah menunda jamnya sampai dengan Jam 13.00 Bapak. Itu makanya mohon maaf sehingga surat itu menjadi terlambat terus terang saja. Nah kami pun kalau toh ada di mana itu kami proses cuma komunikasi yang terlambat itu menyebabkan kami terlambat untuk menyampaikan surat itu kepada Komisi IV DPR RI.

Itu jadi tadi kalau diminta penjelasannya, tadi sudah saya sampaikan sama Pak Menteri Pertanian sesuai dengan surat kami, maka jam 13.00 Pak Menteri Pertanian sudah berada di sini. Itu Bapak, mohon arahan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Memang kalau kekuasaan jangan dibagi, enggak boleh. Kalau kekuasaan dibagi nanti hilang kekuasaannya. Selama ini pernah enggak Wamen hadir di sini? Beda dengan LHK. LHK setiap rapat, Wamennya diajak supaya tahu permasalahan. Selama ini kan tidak ada. Seingat saya Wamen cuma datang satu kali waktu itu hanya perkenalan, tiba-tiba dia ikut, dia di depan saya. Layak enggak? Jadi sekali lagi teman-teman sudah mendengar penjelasannya, mau kita skors biar nanti Bu Ketua yang pimpin atau mau kita tunda? Bu Ketua enggak bisa? Enggak bisa?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya kalau enggak ada, cuma saya sendirian Pimpinan juga kan enggak sah dong pimpin rapat.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pak Ketua. Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya silakan Bu Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ini pasti enggak jam 1 rapat? Enggak maksudnya memastikan saja jangan sampai jam 1 nanti minta tiba-tiba keluar surat lagi minta ditunda akhirnya malas kan, kayak begitu ya. Saya ingin memastikan saja ini nanti Ketua Pimpinan di depan sudah diskusi sudah *fix* ternyata Bapak-bapak Pak Kasdi yang kami cintai dan kami sayangi ya tiba-tiba ditunda mintanya. Tolong kepastiannya saja kalau memang jam 1 ya oke tapi kalau sampai ditunda lagi bagaimana?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang lain mau ngomong silakan mau bicara Fraksi lain. Ya Bapak Andi silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati

Ini agenda kita sangat penting sebenarnya ya karena menyangkut masalah ketersediaan pangan ini sebelum Ramadhan. Oleh karena itu Ketua, kita ingin memastikan bahwa betul-betul apa namanya bahan pangan tersedia ya. Oleh karena itu tadi saya sepakat bahwa kita ditunda sampai jam 1 Ketua karena kalau kita cari lagi waktu yang lain ini sangat susah ini ya. Jadi mungkin diskors saja kita pastikan jam 1, kalau memang tidak bisa jam 1 ya berarti kita tunda.

Demikian, terima kasih Ketua.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ketua, Ketua, sini-sini tengoknya ke kiri, nah kalau begitu kan..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Anda jarang datang banyak ngomong.

Silakan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Saya kira jam 1 itu adalah waktu yang moderat untuk menunggu Bapak Menteri. Saya kira kita tunggulah sampai jam 1 setelah itu nanti kita pastikan jam 1 itu. Pak Kasdi bisa memastikan jam 1 enggak?

SEKJEN KEMANTAN RI:

Kami pastikan Pak jam 1.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Oke, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi Ibu Ketua?

Eenggak mungkin selesai jam 4, ya tergantung kalau perlu sampai jam 11 malam saya balik nanti rapatnya, itu saja.

Jadi atas pendapat Fraksi-Fraksi lain rapat saya skors kembali ke ruangan jam 13.00 untuk melanjutkan Raker dengan catatan itu pun kalau pimpinannya ada. Loh saya harus ngomong tegas ya, oke?

Rapat saya skors.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DISKORS)**

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang dari Pupuk ini kok belum masuk ini?

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV.
Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajaran.

Pimpinan, terima kasih sudah datang.

Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog.
Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia.
Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Holding Pangan ID Food) yang baru saja dilantik menggantikan yang lama. Yang lama menjadi Kepala Badan Pangan Nasional.

Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhana Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat kerja ini dalam keadaan sehat *wal 'afiat*. Sesuai dengan jadwal acara rapat Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang ditetapkan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 14 Februari 2022 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 16 Maret, pada hari ini Selasa tanggal 22 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas:

1. Ketersediaan stok pangan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional;
2. Strategi peningkatan produksi pertanian tahun 2022;
3. Tindak lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada reses yang lalu;
4. Program prioritas tahun 2023; dan
5. Isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) tentang Tata Tertib, rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA)**

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 13.00 dan akan diakhiri pukul 15.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan agenda sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap agenda hari ini;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Saat ini kita sudah beberapa berada di minggu ketiga bulan Maret 2022 dan dalam hitungan berapa hari akan memasuki bulan suci Ramadhan. Sudah dapat diprediksi bahwa harga-harga kebutuhan bahan pokok akan bergerak naik melihat carut-marut kesediaan pasokan minyak goreng akhir-akhir ini. Komisi IV mengkhawatirkan keadaan yang sama akan terjadi pada beberapa kebutuhan pokok lainnya. Oleh sebab itu Komisi IV meminta Saudara Menteri menjelaskan pasokan komoditas pertanian riil bukan berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas. Yang mana kita sudah memanggil dua kali Menteri Perdagangan, yang bersangkutan hanya bisa bicara bahwa, “ada mafia minyak goreng akan segera menangkap mafia minyak goreng”. Ya saya juga enggak tahu mafianya mungkin ada di sana, mungkin.

Komisi IV juga ingin mendapatkan penjelasan terhadap terobosan-terobosan kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi suplai bahan pokok tersebut, terutama cabai merah, bawang merah, daging sapi, telur ayam serta beberapa pokok bahan pokok lainnya yang merupakan tupoksi utama Kementerian Pertanian dalam pengadaan. Bila diperlukan nanti pada saatnya para Eselon I terkait dapat menjelaskan program-program praktis yang dapat mendukung ketersediaan pasokan hari besar keagamaan yang akan kita hadapi nantinya.

Lebih lanjut Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan mendetail strategi peningkatan produksi pertanian tahun 2022 di tengah situasi pandemi dan situasi geopolitik dunia yang berubah drastis akibat konflik Rusia-Ukraina. Upaya peningkatan produksi juga menghadapi tantangan berat akibat *stunting* yang masih tinggi, laju pertumbuhan penduduk, perubahan iklim global dan cuaca ekstrem. Untuk itu Komisi IV meminta agar Kementerian Pertanian melakukan mitigasi adaptasi terhadap masalah tersebut.

Saudara Menteri Pertanian, masih terkait hiruk pikuk minyak goreng saat ini, Kementerian Pertanian beserta jajarannya perlu membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan produksi kelapa. Sudah teruji bahwa harga kelapa dan produk turunannya tidak rentan terhadap situasi pasar internasional seperti yang dialami oleh CPO, sehingga telah banyak minyak goreng dalam negeri menggunakan kelapa sebagai bahan bakunya diharapkan dapat mengatasi ketidakstabilan pasokan di dalam negeri yang pada gilirannya membuat kesediaan pasokan dan kestabilan harga minyak goreng.

Selanjutnya dalam beberapa rapat kerja pembahasan terhadap produksi kedelai dalam negeri menjadi diskusi yang belum terselesaikan, walaupun Saudara Menteri pernah menyatakan harapan yang fantastis untuk menyelesaikan permasalahan produksi kedelai dalam negeri waktu dua musim tanam. Namun, sampai hari ini masalah kedelai masih menjadi isu nasional yang belum terselesaikan. Komisi IV meminta penjelasan Saudara Menteri, apa strategi Kementerian Pertanian memperbaiki kinerja produksi kedelai lokal, sehingga mampu memberikan sumbangan pasokan terhadap industri tahu tempe di dalam negeri.

Terkait dengan organisasi Kementerian Pertanian untuk sekian kalinya menggaris bawahi proses pendaftaran jabatan di lingkup Kementerian Pertanian yang sangat lambat. Dua Eselon I masih dirangkap oleh pejabat Eselon I, yaitu Inspektorat Jenderal dan Dirjen Perkebunan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar manakala Eselon I ini strategis fungsinya tetap seperti sengaja tidak diisi dengan pejabat yang definitif. Kurang lebih hampir dua tahun Inspektorat Jenderal kosong. Komisi IV juga meminta Saudara Menteri menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Kendala apa yang dihadapi untuk proses pengisian jabatan tersebut? Informasi yang kami peroleh, proses lelang sudah dilakukan namun hasilnya belum ditindaklanjuti.

Beberapa hal lain yang menjadi perhatian Komisi IV, yaitu sejauh mana pelaksanaan Kesimpulan Rapat Kerja tanggal 24 Januari 2022 terkait ketentuan penyelenggaraan karantina dalam satu badan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Karantina Hewan dan Ikan dan Tumbuhan.

Komisi IV juga ingin mendengarkan penjelasan tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV pada saat kunjungan kerja reses maupun spesifik. Mohon agar dijelaskan mengenai SDM Badan Penelitian dan Pengembangan pasca pembentukan BRIN. Jadi sekarang setiap reses masing-masing kementerian akan kami pertanyakan hasil kunjungan reses supaya ada jawaban. Jangan nanti dibilang Anggota DPR ke daerah, rakyat sudah mengeluh tapi di tidak ditindaklanjuti.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar dari kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan hal-hal tersebut di atas. Kami persilakan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI dan Bapak/Ibu hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama kami minta maaf karena tiba-tiba ada pertemuan Ratas terbatas dengan Bapak Presiden. Kami salah, mungkin tidak menyampaikan karena baru malam baru ada penyampaian untuk melakukan. Saya kira apa menjadi kegelisahan kita di gedung ini, sama juga kegelisahan Bapak Presiden untuk terus melakukan komunikasi. Kami minta maaf, kami salah.

Yang pertama puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara rapat kerja dalam keadaan sehat *wal 'afiat*.

Perkenankan kami dari jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Komisi IV DPR atas undangan rapat kerja hari ini untuk membahas: pertama, ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Yang kedua, strategi peningkatan produksi pertanian Tahun 2023. Yang ketiga, tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV. Yang keempat, program prioritas tahun 2023 dan isu-isu aktual lainnya.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati.

Izinkan pada kesempatan yang pertama saya melaporkan kondisi ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan hari besar keagamaan nasional (HBKN) berdasarkan perhitungan prognosa neraca 12 komoditi pangan pokok yang meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah dan lainnya seperti yang terlihat pada stok akhir Tahun 2022 ini. Ketersediaan relatif aman Bapak untuk beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging, ayam, telur ayam, dan minyak goreng ketersediaannya diperkirakan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun, untuk komoditi kedelai, bawang putih, daging lembu, sapi, dan gula konsumsi pemenuhannya selain dari produksi dalam negeri juga terutama dari substitusi impor yang ada.

Kementerian Pertanian juga melakukan antisipasi Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditi pangan pokok tersebut. Sampai dengan akhir Mei 2022, ketersediaan dalam kondisi aman, sekali lagi cukup baik dan terkendali. Stok akhir Mei 2022 untuk beras diperkirakan sebesar 9,84 juta ton dengan telah memperhitungkan perkiraan panen raya. Begitu pula untuk jagung, kedelai, bawang merah, dan komoditas lainnya.

Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga kedelai misalnya, telah disusun agenda meliputi agenda jangka pendek atau darurat (SOS) dengan membangun *buffer stock* 20.000 ton per bulan *in-out*, yang kedua agenda *temporary* yaitu memperluas tanaman kedelai Bulan April, Juni dan Juli, Oktober masing-masing kurang lebih 300.0000 hektar dan yang ketiga agenda permanen, yaitu memperluas tanaman kedelai dengan target satu juta hektar pada tahun ke depan. Agenda yang sama juga dilakukan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan pokok lainnya seperti bawang merah, cabai, daging sapi, dan minyak goreng, dan gula.

Kementerian Pertanian telah mempersiapkan langkah terobosan dengan menggandeng stakeholder terkait untuk mendistribusikan pasokan komoditi pangan strategis dari daerah surplus ke daerah defisit. Khusus contohnya untuk memenuhi defisit cabai besar di Maluku dan Papua didatangkan dari Sulawesi Selatan. Defisit di sebagian Sumatera didatangkan dari Jawa Tengah dan defisit di Kalimantan didatangkan dari Bali.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda kedua dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya tahun 2022, Kementerian Pertanian mengimplementasi program

atau kegiatan melalui strategi cara bertindak pada CB-1 sampai CB-5 yang di fokus pada:

Pertama, kegiatan utama dilaksanakan oleh Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Horti, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dirjen Perkebunan. Kegiatan utama Dirjen Tanaman Pangan, seperti:

- a. meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai, serta pangan lokal;
- b. Penguatan manajemen penyediaan benih;
- c. pengamanan produksi melalui pengendalian OPT dan penanganan kekeringan atau banjir dan keempat hilirisasi pengelolaan dengan penanganan pasca panen untuk mengurangi kehilangan hasil.

Hal yang sama juga dilakukan Dirjen Horti dan Dirjen PKH dan Dirjen Perkebunan sehingga produksi pangan untuk tahun 2022 diharapkan bisa terjaga dengan baik.

Yang kedua kegiatan pendukung. Untuk mendukung kegiatan utama Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi 2022, meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana dan pembiayaan pertanian;
- b. Pengembangan diversifikasi pangan;
- c. Penguatan riset dan inovasi teknologi pertanian;
- d. Peningkatan SDM pertanian dan;
- e. Peningkatan peran perkarantina dan;
- f. Penguatan manajemen dan pengawasan.

Selanjutnya terkait dengan tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI pada kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan permasalahan pupuk bersubsidi yang telah ditindaklanjuti dengan mendorong PT Pupuk Indonesia untuk mengaplikasikan sistem digitalisasi stok pupuk yang dilaporkan ke BPK setiap waktu. Memberi sanksi kepada kios atau distribusi yang melanggar aturan atau penyaluran pupuk yang ada, dan merealisasikan kegiatan Agro Solution dengan target 252.000 hektar di seluruh Indonesia.

Pada kunjungan kerja dilakukan ke Provinsi Sumatera Utara terdapat dua hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu terkait importasi kedelai dengan penanganan permasalahan pupuk, permasalahan kedelai ditindaklanjuti melalui pengamanan *buffer stock* dan distribusi, serta mendorong penanaman kedelai lokal. Terkait dengan permasalahan pupuk, Kementerian Pertanian mendorong PT Pupuk Indonesia untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi ke petani sedangkan jaminan kelancaran penyaluran pupuk non subsidi akan dibangun 1.000-1.500 kios yang ada.

Tindak lanjut dari kunjungan kerja ke Riau terkait kepemilikan kebun kelapa sawit perorangan, koperasi dan/atau perusahaan yang masuk dalam kawasan hutan, oleh Kementan sebagai berikut: yang pertama, mengidentifikasi kepemilikan kebun sawit di lahan hutan seluas 6,4 ribu hektar; kemudian yang kedua, identifikasi dilakukan di 8 Kabupaten dengan total 49 lembaga; yang ketiga, koordinasi dengan KLHK terkait hasil identifikasi dan calon pekebun yang mengusulkan dana PSR di masa yang akan datang; dan keempat, koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kabupaten di Riau untuk menyiapkan data poligonnya.

Kunjungan kerja juga menemukan permasalahan pupuk subsidi yang ditindaklanjuti sebagai berikut: yang pertama, Kementan bersama PT Pupuk Indonesia telah memperkuat pengawasan tenaga lapangan penyaluran pupuk subsidi agar memenuhi yang tepat; yang kedua, mendorong PT Pupuk Indonesia untuk bekerja sama dengan Bareskrim Polri menindaklanjuti dugaan penyelewengan penyaluran pupuk dan indikasi kebocorannya; yang ketiga, mendorong PT Pupuk Indonesia mengaplikasikan sistem digitalisasi stok pupuk yang dilaporkan ke BPK setiap waktu; yang keempat, mendorong PT Pupuk Indonesia untuk memberi sanksi kepada kios dan distributor yang melanggar aturan penyaluran pupuk; dan yang kelima, pendampingan penyuluh dan penggunaan pupuk oleh petani sesuai dosis yang dianjurkan.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda keempat, kami menyampaikan Rancangan Program Prioritas Tahun 2023 Kementerian Pertanian tetap akan fokus untuk meningkatkan produksi pangan dan juga pada aspek *off farm* dengan membangun proses bisnis hulu hilir. Kementerian Pertanian akan melanjutkan program kegiatan prioritas baik yang merupakan kelanjutan tahun sebelumnya maupun kegiatan baru untuk tetap memperkuat produksi pangan kita. Nilai tambah dan daya saing produksi pertanian dalam menghadapi perubahan iklim dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Landasan yang digunakan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Kondusif dan Berkelanjutan”.

Dalam rangka menjabarkan RKP tersebut, Kementerian Pertanian tetap mengacu pada lima program meliputi: Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas; yang kedua, program nilai tambah dan daya saing industri; yang ketiga, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; yang keempat, program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan kelima, program dukungan manajemen. Namun, sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pangan Nasional sesuai program di Badan Ketahanan Pangan dan akan berintegrasi ke Badan Pangan Nasional, sementara untuk kegiatan teknis seperti P2L, Toko Tani Indonesia, dan Bimtek akan tetap berada di Kementan. Selain itu sesuai Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional fungsi Litbang, Badan Litbang Pertanian berintegrasi ke BRIN, oleh karena itu program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan disesuaikan menjadi program standarisasi pertanian.

Terakhir, produksi beberapa komoditas pangan untuk utama pada tahun 2023 adalah untuk padi 56,08 juta ton, jagung 23,21 juta ton, kedelai 0,55 juta ton, bawang merah 1,66 juta ton, cabai 2,93 juta ton, serta komoditas strategis lainnya telah disesuaikan dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran yang ada.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Memasuki agenda terakhir kami akan melaporkan tentang antisipasi dampak perubahan iklim yang diperkirakan sampai akhir 2022 ini. Dia akan mendominasi dan akan diperkirakan mempengaruhi penyediaan pangan pokok. Berdasarkan ramalan BMKG curah hujan tinggi masih akan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim tersebut, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah melalui berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi. Beberapa langkah adaptasi yang dipersiapkan di antaranya pembangunan embung, perbaikan saluran irigasi, perbanyak benih dan varietas toleran rendam atau banjir dan varietas lainnya yang dibutuhkan sesuai wilayah yang ada. Begitu pula dilakukan berbagai kegiatan mitigasi melalui pembangunan kawasan kebun pekarangan dengan tanaman dalam rangka mempercepat serapan CO₂, rehabilitasi lahan kritis, mengurangi *food losses* dan bimbingan teknis adaptasi mitigasi perubahan iklim kepada petani.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Demikian beberapa hal secara garis pokok yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja ini. Mohon izin kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI, apabila diperlukan pada saatnya kepada masing-masing Eselon I untuk dapat menyampaikan tambahan penjelasan. Atas segala perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, kami mengucapkan terima kasih, kurang lebih kami mohon maaf.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih atas penjelasannya Saudara Menteri.

Cuma yang kami sayangkan ini adalah Dirjen Perkebunan, mana ini Dirjen PLT-nya? Anda punya wewenang yang besar sekali terhadap PSR, uangnya sekian triliun tapi Anda tidak pernah berupaya untuk rakyat untuk PSR. Replanting rakyat Anda punya wewenang, itu kan pungutan dari CPO nilainya hampir 140 triliun sekian yang di mana 110 triliun dipakai untuk subsidi, yang dipakai untuk PSR baru 6 triliun. Sementara kunjungilah coba lihat perkebunan kebun, perkebunan rakyat. Jalannya hancur total, di sana kan bisa ambil dana dari BPDPKS itu bisa karena apa infrastruktur, tinggal kerja sama sama PU atau sama BUMN, tidak perlu di aspal. Enggak usah jauh-jauh lah, ikut saya ke Lampung sana. Perjalanan kurang lebih 30 kilo paling cepat dua jam setengah karena apa, hancurnya jalan. Ini bagaimana Dirjen perkebunan kok diam seribu bahasa, uangnya banyak *kok* Anda punya wewenang. Ini loh yang saya sayangkan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi IV untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya.

Kami persilakan yang pertama.

WAKIL KETUA (ANGGIA ERMA RINI, MKM):

Silakan Pak SDA SDK. Kalau di Mamuju rupanya panggilannya SDK.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang hormati Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang terhormat.
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Dirjen, Dirut Pupuk, Dirut Bulog.

Pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri Pertanian, Bapak Prof. Dr. Syahrul Yasin Limpo, M.Si., MH. yang tanggal 17 kemarin mendapatkan gelar Profesor dari Universitas Hasanuddin Makassar. Ya kita bangga karena mitra kita kan profesor juga.

Saya kira tidak ada negara yang bisa unggul atas semua produk pertanian, termasuk kita Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan. Indonesia bisa bangga dan bisa juga sedih terserah sudut pandang kita melihat. Bangga saya dengan sawit karena kita adalah penghasil nomor 1 di dunia tapi kita juga bisa melihat bagaimana kedelai kita harus impor. Saya kira ini ya harus ada imbang-imbang. Kalau kita impor bawang putih minimal kita bisa unggul di bawang merah karena memang masalah topografi dan geografi sangat berpengaruh terhadap setiap tanaman. Untuk itulah saya berharap bahwa Kementan dalam mengajukan neraca pangan benar-benar akurat dan valid supaya tidak terjadi kelangkaan.

Saya ingin pertama melihat bagaimana neraca tentang bawang merah. Bawang merah kemarin di awal tahun ada sedikit gagal panen dan Kemendag sudah mengajukan untuk impor meminta kepada Kementerian Pertanian. Di lain sisi neraca yang diajukan oleh Kementerian Pertanian bahwa untuk bawang merah kita masih surplus. Jadi sebenarnya yang benar ini Kementerian Perdagangan ingin nafsu impor atau memang kalau memangnya tidak mencukupi dalam negeri ya kita harus impor tapi kalau masih mencukupi sesuai dengan neraca Kementerian Pertanian jangan impor dong. Masak petani kita, kita hancurkan dengan impor. Saya sependapat dengan kedelai kita minus 2,5 juta ton bagaimanapun kedelai memang tidak bisa kita dengan produktivitas yang rendah, biaya produksi yang tinggi. Bahkan, dari sambutan Pak Menteri tadi ingin memperluas sampai dengan 300.000 ton eh 300.000 hektar. Saya kira ini juga menjadi tantangan bagi Kementerian Pertanian siapa yang mau tanam kedelai dengan untung yang kecil. Ya selanjutnya saya juga sependapat dengan daging sapi kita memang tidak bisa produksi dalam negeri. Gula konsumsi kita masih minus dari sisi neraca perdagangan kita.

Olehnya itu, kita berikanlah kepada Bulog untuk melakukan impor dan stabilisasi harga karena kalau Bulog, kalau dia untung, untungnya wajar tapi kalau diberikan kepada swasta penuh, saya kira untungnya berlipat-lipat. Ini

yang menjadi sulit dikendalikan oleh negara kalau swasta penuh yang melakukan importasi tapi kalau Bulog, saya kira masih ada idealisme yang ada di Dirut Bulog. Sama halnya dengan subsidi minyak goreng kemarin, kok diberikan kepada pabrik dan pengusaha di mana ada, selagi ada Bulog. Habis dana BPDPKS 7,6 triliun untuk subsidi tapi tidak jelas. Ya saya kira kan mudah sekali ini barang. Bulog beli di pabrik dengan harga ekonomian kemudian negara memberikan subsidi kepada Bulog, salurkan kepada UMKM, salurkan kepada pasar tradisional, saya kira selesai tapi diberikan kepada pabrik-pabrik yang menjadi penguasa minyak goreng. Ini saya kira keliru di dalam melihat persoalan ini.

Saya juga ingin meminta kepada Pak Menteri ini hasil reses Dapil kami terhadap Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS sawit. Aturannya bagus tapi pengawasannya tidak ada. Peraturan ini saya lihat hanya dibiarkan dilaksanakan di tingkat daerah sehingga dengan demikian daerah tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk melawan pengusaha-pengusaha TBS sawit. Akibatnya disparitas harga sawit antar provinsi itu sangat tinggi. Kita lihat seperti di Sumatera harga sawit itu di antara Rp3.500,- sampai dengan Rp3.900,-. Di Sulawesi Barat Rp2.800,- sampai dengan Rp3.040,-. Kalau disparitas hanya Rp50,- sampai dengan Rp100,- saya kira tidak ada masalah. Permentannya berlaku seluruh Indonesia tentang pedoman penetapan harga sawit. Dengan demikian saya berharap kepada jajaran Dirjen Perkebunan untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar Sawit di setiap provinsi karena memang pemerintah provinsi yang menetapkan harga sawit.

Selanjutnya saya ingin juga minta kepada Bulog supaya ada tambahan pembangunan gudang di Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju. Bulognya di sana itu hanya mampu menampung sampai dengan ratusan ton saja tidak sampai dengan 1.000 ton.

Untuk pupuk saya meminta kepada holding untuk penyaluran pupuk 2022 ini supaya bisa mulai mengimplementasikan hasil Panja yang telah kita hasilkan bersama di Komisi IV menyesuaikan dengan implementasi terhadap penyaluran pupuk sehingga dengan demikian 2023 implementasi pupuk sudah bisa dilakukan.

Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih Pak Suhardi Duka.

Saya hanya meluruskan mengenai Permen TBS tandan buah segar tetapi kan hampir setiap bulan itu ada fluktuasi harga maka biasa wewenang

di gubernur. Pergub menetapkan hari ini TBS harganya misalnya 3 ribu, itu saya hanya menjelaskan ya karena ya saya sedikit tahulah belajar sama Pak Ketua ini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik menyambung dulu sebelum ke Pak Ibnu ya. Siap-siap Pak Ibnu. Ya tentang dana tentang perkebunan tadi yang disampaikan baik yang disampaikan oleh Ketua Pak Suhardi. Kita juga ingin tahu ini sebenarnya peruntukannya karena kan kemarin waktu kita undang Dirut itu Ketua kan hanya dua peruntukannya untuk PSR sama biodiesel. Tadi saya sempat mengobrol sama Pak Kasdi ya ada infrastruktur juga di dalamnya ternyata anggaran dana itu ada 5 atau 10. Nah, itu penting ternyata kalau misalnya ada infrastruktur jalan yang enggak karu-karuan itu ternyata ada, ada hal yang lain di samping misalnya PSR yang sama sekali tidak terwujud begitu, hanya 1% dari anggaran yang ada. Itu yang kita ingin juga tahu meskipun ya memang tidak semuanya ada di, di BUN ya di apa di perkebunan ya tetapi kita supaya kita juga *well known* banget begitu tentang ini karena ini enggak manusiawi sama sekali cara mengelola anggarannya enggak manusiawi sama sekali di saat para petani susah, di saat minyak goreng susah, ternyata ada anggaran yang berjibun tapi tidak, tidak *proper* secara pengelolaannya.

Silakan Pak Ibnu senior saya.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan yang saya hormati.

Bapak-Bapak dan Ibu Anggota yang saya banggakan.

Bapak Menteri beserta segenap Eselon 1 dan Kepala Bulog Pak Buwas, Pak Bagir Kepala PI Pupuk Indonesia yang saya banggakan.

Saya mendengar pemaparan Pak Menteri dengan stok pangan cukup itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri tetapi asalnya dari mana pangan itu akan menjadi sebuah keprihatinan juga kalau asalnya dari impor berarti pangan dalam negeri ini kan harus ditingkatkan produksinya. Nah, kaitannya dengan peningkatan produksi pangan itu pasti ada kaitannya dengan pupuk karena untuk meningkatkan produksi itu salah satu variabelnya adalah pupuk.

Untuk itu kemarin kita di sini menerima tamu ada dari KTNA, HKTi mitra pupuk organik Petro yang menyampaikan kegalauan atas rencana pencabutan atau rencana penghilangan subsidi tiga jenis pupuk Pak Menteri dan juga surat yang dikirimkan oleh direktur pupuk dan pestisida yang ditandatangani oleh Pak Hatta. Saya kira pengiriman ke Pupuk Indonesia itu ya lapor Pak Menteri lah kebangetan kalo enggak lapor Pak Menteri. Saya *husnudzon* saja Pak Menteri. Ada surat Nomor B133.132022 yang inti pokok inti surat itu adalah pencabutan atau peniadaan berapa jenis pupuk subsidi

yaitu ZA, SP36 dan organik. Dan kami setelah melakukan reses beberapa saat yang lalu juga mendapat protes dari petani tentang pencabutan beberapa jenis pupuk ini.

Saya bangga dengan Pak Menteri yang telah menerbitkan Permentan Nomor 21 Tahun 2021 saya apresiasi Pak Menteri Pertanian yang telah menerbitkan Permentan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Pupuk Bersubsidi dan HET atau harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Bahkan, kita makan sehari-hari itu kira-kira tidak mengingat bahwa itu jerih payah petani. Coba kita makan di piring, kalau tahu nasinya kurang enak, sayurnya kurang enak kita sudah mengeluh ke pembantu tapi betapa petani kita dengan susah payah menghasilkan apa yang di atas piring dengan keringat dengan tenaga lah ini kok ada upaya untuk mencabut beberapa item subsidi beberapa jenis pupuk subsidi. Ini sangat memberatkan dan menambah beban petani Pak Menteri. Untung Pak Menteri bijak menerbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 21 Tahun 2021. Ini kami minta Pak Menteri untuk mempertahankan Permentan Nomor 21 Tahun 2021 karena saya mendengar “kasak-kusuk” ada upaya untuk mengevaluasi dan mengganti Permentan ini.

Nah, saya kira ini adalah penting karena Permentan itu Pasal 2 ayat (2) jenis pupuk yang disubsidi itu adalah anorganik dan organik. Setiap tahun kan jumlah subsidi pupuk itu kan relatif sama ya 9 juta ton lah kira-kira. Bahkan, tahun 2019 kita pernah mengalami 8,8 juta ton. Kita pernah mengalami subsidi pupuk subsidi itu kuotanya kuantumnya itu adalah 8,8 juta ton, itu juga cukup kok, itu juga cukup. Nah, ini lalu 2022 ini kan rencana kuantum pupuknya kan juga 9 koma sekian juta ton ini kan ya pasti cukup dan subsidi organik itu kan tidak banyak, tidak ada 1 triliun, rata-rata 700 miliar lah kira-kira, rata-rata 700 miliar. Sedang mitra pembuat pupuk organik Petro itu adalah karyawannya plus minus 100.000, sehingga kalau subsidi pupuk petroorganik itu menjadi dihilangkan pasti akan 100.000 tenaga kerja yang bergerak di situ adalah kehilangan pekerjaan, sedang kebutuhan ZA itu juga masih dibutuhkan di beberapa daerah. Beberapa jenis tanaman tertentu itu masih membutuhkan ZA begitu juga SP36 sehingga kami berharap ini sikap dari Fraksi PKB untuk mempertahankan Permentan Nomor 2 Nomor 21 Tahun 2021, apalagi organik. Organik itu tidak semata-mata mensubsidi pupuk tapi itu lebih jauh mensubsidi lingkungan karena bahan baku organik itu dari negeri dari dalam negeri dan itu merupakan kotoran unggas, kotoran sapi, blotong tebu, itu bahan baku utamanya.

Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan secara baik dan benar itu kan akan menyebabkan polusi, akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Siapa yang menggunakan kotoran sapi, kotoran apa namanya unggas kalau nanti Petro itu adalah petroorganik itu mitra-mitranya di tidak memproduksi pupuk subsidi. Jadi ibarat ini rangkaian akhir dari proses alam. Jadi jangan menganggap bahwa ini mensubsidi pupuk, kalau mensubsidi pupuk saja saya kira kurang tepat ini mensubsidi lingkungan. Kalau toh misalnya rangkaian pakan kita melihat di *wild life* atau NGO itu pertama dimakan harimau kerbau itu setelah itu di apa namanya di didekati di di-anu oleh hiena. Terakhir itu adalah burung bangkai, lah Petro itu kira-kira Petro yang itu ya burung bangkai itu supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Maka dari itu saya atas nama Poksi PKB berharap agar Pak Menteri mempertahankan peraturan Permentan Nomor 21 Tahun 2021 yang di dalamnya berkenaan dengan pupuk subsidi pupuk sehingga kita karena Pak Menteri pernah jadi gubernur, pernah jadi bupati, pernah jadi lurah, saya kira pengalaman lah saya kira bagaimana rasanya jadi petani bagaimana berdekat-dekat dengan petani dan bahkan kita yang di sini saya ulangi lagi ketika kita makan apalagi makan enak, lupa siapa yang memproduksi yang kita makan itu lupa kita. Sekali lagi saya sampaikan supaya Permentan Nomor 21 Tahun 2021 itu dipertahankan sehingga pupuk Indonesia tidak ragu-ragu untuk memproduksi pupuk. Pupuk Indonesia tidak ragu-ragu untuk memproduksi pupuk.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Pak Menteri.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik terima kasih Pak Ibnu. Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi IV, Pak Menteri beserta jajaran, Pak Dirut Bulog, Pak Dirut Pupuk Indonesia.

Saya hanya akan menyampaikan dua hal Pimpinan tentang pangan dan pupuk bersubsidi. Yang pertama tentang pangan Pak Menteri. Kalau apa yang Bapak sampaikan memang dari data makro yang Bapak sampaikan untuk tahun 2022 ini memang yang defisit hanya 4 produk pangan kita kedelai, bawang putih, daging sapi kerbau dan gula konsumsi tapi itu akan ditutupi dengan impor sehingga semua komponen pangan kita adalah positif surplus memenuhi kebutuhan.

Untuk minyak goreng yang ramai di masyarakat, sampai dengan akhir tahun masih tersedia stok 716.000 ton. Untuk nanti persiapan lebaran sampai dengan Mei minyak goreng tersedia 663.000 ton, tapi di masyarakat ini masih bergejolak. Oleh karena itu karena Bapak yang menerbitkan data ini tentunya rakyat perlu diobati. Rakyat perlu diberi obat kegalauannya dengan menyampaikan kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng cukup sehingga rakyat tidak perlu berbondong-bondong baris berjubelan menimbulkan juga bahaya sampai ada yang meninggal dunia. Tanpa ada ini pasti rakyat akan selalu berbondong-bondong apalagi menghadapi bulan Ramadhan ini.

Kesalahan yang terjadi menurut hemat kami Pak Menteri, pada saat pemerintah mengambil kebijakan untuk penetapan harga subsidi minyak goreng itu pemerintah menyampaikan ini hanya untuk enam bulan sehingga rakyat itu gelisah berbondong-bondong mengantrekan anaknya untuk mendapatkan itu. Ini yang penting untuk supaya nanti menghadapi bulan suci Ramadhan ini tidak akan kita saksikan kembali untuk apa namanya terjadi hal yang memang apa kita saksikan yang sangat prihatin.

Pak Menteri dari sisi makro semua kebutuhan pangan kita cukup tapi saya menyampaikan ketersediaan pangan sampai dengan ke konsumen itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh produksi. Produksi sampai segmennya, jenis pangan ini ada di wilayah mana ya karena persoalan kita ini adalah negara yang besar, negara yang berpulau-pulau secara makro cukup tapi belum tentu dengan cepat sampai kepada konsumen. Persoalan itulah yang menyebabkan sehingga langkanya apa namanya pangan-pangan kita, sehingga pemerintah tentunya bisa mengambil sikap keputusan yang tepat siapa yang menjadi penyalur yang tepat yang punya jejaring yang sangat kuat di seluruh wilayah.

Yang kedua yang mempengaruhi adalah distribusi, distribusi dan jejaringnya. Berbagai macam pihak menyampaikan termasuk persatuan apa namanya Asosiasi Pasar inginnya distribusinya lewat jejaring yang ada dibangun oleh pasar. Kalau dari pemerintah tentunya yang paling tepat yang paling tepat adalah pulau. Pulau punya jejaring sampai dengan Kabupaten. Pak Menteri ini otonomi daerah Pak Menteri ya, Pak Menteri tidak bisa perintah begitu saja kepada pemerintah daerah otonom. Di sana ada Dinas Perdagangan di sana ada Dinas Pertanian, pertanian yang memproduksi perdagangan yang mendistribusikan. Bagaimana mengkoordinasikan kebijakan ini dengan daerah sehingga pemerintah pusat sangat dengan tahu daerah-daerah mana yang sesungguhnya kekurangan pangan itu. Dengan begitu yang ditugaskan dengan cepat mendistribusikan, mana kala itu tidak dilakukan agak sulit walaupun stoknya cukup bisa sampai ke tempat tujuan.

Masih dalam konteks pangan Pak Menteri. Kemarin Komisi IV menerima masyarakat tadi disampaikan dari KTNI dari HKTI apa tadi KTNA dari HKTI dari Asosiasi Unggas itu termasuk juga penggiat apa namanya tanaman koro, koro untuk bahan baku apa namanya tempe. Koro pedang. Saya ingin memulai dari kedelai Pak. Saya akan menyampaikan dari operasi KOPTI ya, KOPDI sudah menyampaikan untuk bahan baku kedelai itu pengrajin itu memilih untuk menggunakan kedelai impor ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Koreksi sedikit Pak Sutrisno bukan bahan baku kedelai tapi..

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Bahan baku tempe.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nah itu supaya jelas jangan bilang bahan baku kedelai.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Bahan baku tempe itu dari bahan apa dari kedelai impor tetapi untuk tahu itu sangat baik sangat tepat dipakai kedelai lokal. KOPTI minta kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai lokal itu satu tahunnya satu juta ton. Memaklumi kalau masih ada impor untuk tempe tapi untuk tahu mohon diproduksi. Sangat mengejutkan dari data pangan yang disampaikan itu ya kedelai kita tahun 2022 ini hanya mampu 200.000 ton. Dari waktu ke waktu anggarannya cukup besar kalau secara akumulasi, tahun yang lalu sekian puluh 100 miliar, tahun 2022 100 miliar, tentunya akan lebih luas. Sepertinya program-program pengembangan kedelai itu “barlen”, “bubar kelalen” setelah anggarannya tidak ada tidak dilanjutkan lagi. Mestinya harus terbangun kemandirian, yang sudah diberikan harus terus pengembangan kedelai, yang baru diberikan juga mengembangkan kedelai, sehingga secara totalitas jumlah kebutuhan kedelai kita akan mencukupi dari waktu ke waktu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Masih lama Pak Sutrisno? Sudah lima menit karena waktu kita hanya sampai di pukul 15.30 WIB.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Dari apa dari rakyat yang datang satu lagi nanti ke pupuk Pak pupuk apa memang mohon izin itu.

Yang dari apa namanya unggas ya surplus 900.000 ton untuk apa namanya ayam, untuk telurnya 600.000 ton. Saya hanya ingin mempermasalahakan Pak Menteri, ayam juga protein hewani, daging sapi daging kerbau juga protein hewani. Kenapa tidak dikendalikan, tidak usah impor daging sapi, tidak usah impor daging kerbau, bagaimana rakyat dialihkan untuk mengonsumsi daging ayam. Mana kala itu dilakukan, maka persoalan-persoalan apa yang disampaikan oleh Asosiasi Petani Unggas akan terpecahkan karena tentunya rakyat sudah bisa tetap mengonsumsi apa namanya konsumsi makanan protein hewani tapi sumbernya adalah dari ayam.

Usul Pak Menteri dari mereka, usul dari mereka. Persoalan carut-marutnya masalah unggas ini adalah kebijakan pemerintah tahun 2009 yang membolehkan pengusaha besar juga ikut memproduksi. Mereka dari hulu sampai dengan apa namanya hilir menguasai sehingga kartel di sektor unggas ini terbangun. Petani unggas rakyat tidak akan mampu berhadapan sama mereka, mereka punya semuanya. Mereka bisa memainkan semua itu. Oleh karena itu usulnya agar ditinjau kembali Undang-Undang Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 18. Yang terakhir mereka mengusulkan Permentan Nomor 32 itu mohon diperkuat dengan peraturan pemerintah.

Terakhir Pak Pimpinan masalah pupuk bersubsidi. Pak Menteri.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Terakhir benar ya Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ya. Persoalan pupuk bersubsidi itu bukan ada di hilir Pak ya. Mohon kami sudah menyampaikan kepada Eselon I tapi Bapak mempublikasi data kemudian TOR kita juga masih memproduksi, mempublikasi bahwa kebutuhan pupuk kita 24 juta ton. Itu data yang salah Pak. Mohon diperbaiki dulu kebijakan regulator di hulunya. Kenapa salah? Luas lahan kita 7,49 juta hektar menurut BPS. Bapak menyampaikan pada kami indeks pertanian kita petani kita 1,42 yang sekarang sudah ditingkatkan menjadi 1,6 mana kala itu dihitung, lahan sawah kita yang akan ditanamkan kalau indeksnya 1,42 hanya 10 ribu, 10 juta ton. Manakala 1,6 12 juta ton. Pupuk yang ada dengan anggaran 25 30 triliun itu cukup bahkan lebih manakala pengaturan komposisinya itu sesuai dengan kebutuhan.

Mohon untuk ditinjau kembali Pak. Kalau ini terus-menerus ini sama saja mempublikasi kepada rakyat bahwa pemerintah tidak peduli pada kepentingan para petani. Kami alumni dari statistik Pak mohon maaf, metodologi metodologi statistik dalam pengolahan data tidak dipakai itu. Tidak ada verifikasi semuanya mereka yang buat, mereka yang meng-*upload* menjadi e-RDCK bahkan mereka menambahkan kepentingan-kepentingannya. Anggaran jalan terus sampai dengan 150 miliar tiap tahunnya. Mohon untuk diperbaiki ya supaya betul-betul jangan sampai kemudian terus-terusan rakyat menjadi objek kesalahan. Kesalahan kita tidak pernah diperbaiki.

Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Silakan Bang TA Khalid.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua, teman-teman Komisi IV yang saya muliakan. Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, kemudian dari Kementerian lainnya, serta dari Pak Pak Bulog, ID Food juga dari Pupuk Indonesia yang saya muliakan.

Mengingat waktu tadi Pak Ketua juga telah mewanti-wanti waktu mengingat situasi itu situasi kita. Jadi izin saya mewakili Fraksi Gerindra. Ada beberapa rangkuman pertanyaan ada permasalahan yang ingin kami sampaikan tapi mengingat waktu dan banyaknya hal yang perlu kami sampaikan, maka izin kami mencoba merangkum dan mencoba untuk tidak mengulangi apa yang telah disampaikan kawan tadi karena sebagian yang ingin kami pertanyakan juga telah ditanyakan oleh Pak Suhardi Duka dari Demokrat, juga dengan Pak Sutrisno, juga Pak Ibnu.

Jadi pertama Pak Menteri, saya, kami dari Fraksi Gerindra bersyukur dan *Alhamdulillah* berdasarkan prognosa neraca komoditas pangan strategis Januari sampai Desember 2022 di mana kondisinya sangat aman, hanya beberapa komoditas saja yang perlu impor. Maka kami tidak mempertanyakan ini lagi karena teman-teman tadi juga telah mempertanyakan itu dan kami yakin data sajian Pak Menteri dan dari Kementerian Pertanian ini bukan cuma rekayasa tetapi izinkan kami dari Fraksi Gerindra apa yang disampaikan ini bukan, kami memang yakin tapi mohon dipastikan agar ini benar-benar terjadi. Apalagi 10 hari lagi ini menghadapi bulan Ramadhan, yang sering kali setiap bulan Ramadhan itu loncatan harga ketidakstabilannya harga, kemudian langkanya pangan itu menjadi hampir setiap Ramadhan terjadi. Mudah-mudahan Ramadhan kali ini kita Pak Menteri tidak mengurangi dosanya orang Ramadhan orang berpuasa. Jangan mereka menggerutu karena masalah pangan. Mari sama-sama kita berikhtiar agar pangan ini benar-benar aman. Kami minta kepastian semoga *Insha Allah* ini dapat terlaksana seperti data yang disampaikan.

Kemudian kami ingin menyinggung sedikit menyangkut beberapa komoditas.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Pak Sutrisno. Mohon dimatiin *mic*-nya maaf. Terima kasih.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Menyangkut beberapa komoditas untuk mengamankan seperti yang harus impor seperti kedelai, bawang putih, daging, gula. Kemudian saya ingin kami ingin mempertanyakan saja pertama sampai kapan ini Pak kita harus impor. Mungkin kedelai seperti yang disampaikan teman-teman tadi karena mungkin biaya produksi yang tinggi tetapi seperti bawang putih mungkin dari pertama kita membicarakan bawang putih, bawang putih, bawang putih. Apakah itu tidak mungkin jangan diimpor lagi tapi pengalaman kita pada tahun 1994 sampai tahun 1995 kita pernah swasembada bawang putih. Saya pikir tidak mustahil untuk kita tidak berusaha agar kita tidak lagi impor bawang putih, begitu juga hal-hal yang lainnya. Ini mungkin yang menyangkut dengan pangan yang ingin kami sampaikan karena sebahagian besar tadi juga telah disampaikan oleh teman-teman.

Kemudian kami Fraksi Gerindra ingin menyampaikan menyangkut kunjungan kerja Komisi IV ke Riau mengenai kelapa sawit. Kami Fraksi

Gerindra meminta Kementerian Pertanian segera melakukan tindakan dan inventarisasi pelaksanaan program PKS dengan berkoordinasi dengan BPDPKS dan KLHK.

Kemudian kami dari Fraksi Gerindra juga ingin menyampaikan bahwa Program Pekarangan Pangan Lestari yang menjadi sebuah program pertanian yang dirasakan mampu menumbuhkan ekonomi keluarga, kami Fraksi Gerindra untuk mendorong terus dijalankan oleh Kementerian Pertanian.

Kemudian kelangkaan dan naiknya harga pangan menjadi masalah klasik menjelang hari besar agama Islam. Fraksi Gerindra meminta kepada Pertanian agar *Insy Allah* Ramadhan kali ini kita tetap aman dan terkendali. Sedangkan beberapa pertanyaan lainnya dari Fraksi Gerindra telah disampaikan oleh teman-teman yang lain juga saya pikir tidak perlu mengulang lagi yang penting kita hadir di sini *nawaitu* kita sama Komisi IV dan Kementerian *nawaitu* hanya satu bagaimana pengabdian tanpa batas kita untuk Republik untuk rakyat Indonesia.

Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang saya hormati Anggota Komisi IV.

Mohon kalau apabila Anggota lain sudah bertanya jangan diulang lagi, biar agak singkat supaya semua Anggota yang hadir dapat bicara dapat menyampaikan pendapatnya.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik terima kasih Ketua.

Selanjutnya Pak Andi Akmal.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi IV.
Yang saya hormati Pak Prof. Syahrul Yasin Limpo. Selamat Pak Menteri atas penganugerahan guru besar, dan jajarannya.

Pak Dirut Bulog, Dirut RNI dan juga Pupuk Indonesia, Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia.

Pertama saya kira saya hanya fokus ke dua Ibu Ketua. Pertama bagaimana meningkatkan produksi kita khususnya kedelai dan daging karena yang lainnya saya kira surplus ya Pak Menteri ya. Kita bersyukur bahwa menghadapi Ramadhan ini pangan kita cukup. Walaupun memang minyak goreng ini langka dan mahal tapi saya kira masalahnya bukan di Mentan. Baik untuk kedelai ini Pak Menteri saya memberikan usulan sebenarnya kalau ada *off taker* ada jaminan pembelian itu saya kira kuncinya di situ Pak. Petani kita ini kita berikan insentif apa benih pupuk kalau tidak ada kepastian pembelian harga pembelian jelas mereka tidak akan menanam. Jadi kata kuncinya adalah kita meningkatkan produksi, mengurangi impor karena enggak mungkin juga impor kita tidak lakukan ya Pak Buwas ya?

Nah, impor pun harusnya dilakukan oleh Bulog bukan oleh swasta. Kalau saya baca bahannya Pak Buwas ini untuk kedelai ini Bulog membeli dari importir ini kan harusnya negara tidak boleh negara punya stok Pak. Kenapa misalnya pangan kita ini bermasalah di hilirnya bukan hulunya Pak Menteri ya. Hilir Pak karena negara tidak punya stok. Negara kenapa tidak punya stok karena Bulog tidak diperkuat kan begitu Pak Buwas. Saya kira ini Pak sudah 7 tahun saya di Komisi IV selalu bicara masalah ini Pak Buwas bahwa tidak ada instrumen negara yang bisa melindungi kepentingannya produsen kita petani kita pada saat harganya anjlok.

Saat ini hari ini Bulog hanya bisa beli 10% dari produsen dari produksi petani kita Pak. Pada saat konsumen harganya melonjak harusnya Bulog operasi pasar kan begitu Pak. Kalau ada stok, kalau tidak ada stok bagaimana ini jadi saya kira ini Pak Menteri bisa dibicarakan mungkin di Ratas atau dengan Presiden bahwa penguatan Bulog itu penting Pak. Ya saya kira itu yang ini jadi jadi kedelai tadi Pak Menteri mengatakan 300.000 hektar ini akan berhasil Pak bila Bapak bekerja sama dengan BUMN yang ada. Kepastian harga Pak dan pembelian. Saya kira dari Pupuk Indonesia Pak Bakri punya konsep apa namanya Agri Solution Pak. Bagaimana terintegrasi dari hulu ke hilir, bibitnya, pupuknya kemudian asuransinya dan pembelannya. Ini baru bisa Pak kalau tidak cerita Pak itu tak bisa kita laksanakan Pak Menteri ya jadi saya kira bisa di contoh Pak.

Nah, yang kedua daging. Saya kira juga terutama daging sapi, kalau daging sapi kita tahu bahwa sebenarnya Kementan dulu punya konsep namanya SPR (Sentra Peternakan Rakyat) Pak. Kita tahu bahwa kita ini tidak seperti apa Australia apa New Zealand yang punya peternakan banyak Pak ya karena kita di kandang-kandangnya rakyat kita. Nah, masalah di rakyat kita adalah pada saat mereka mau menjual tidak ada yang membeli. Sekali lagi kata kuncinya adalah *off taker* Pak. Ini ada RNI di sini Pak Frans ya ataupun Bulog juga bisa menjadi *off taker* kalau dikasih uang ya Pak ya. Nah, seperti di kampung saya Pak Menteri di Bone itu penghasil sapi terbesar di Indonesia timur Pak. Ini tidak ada yang apa namanya mempertemukan yang mengkolaborasi antara potensi apa peternak kita dengan sehingga kita

bisa mengurangi impor kan begitu Pak ya. Jadi impor ini bisa dikurangi kalau produksi ini meningkat. Saya kira itulah yang pertama.

Yang kedua, sekali lagi bahwa saya berharap Bulog ini memang harus diperkuat Pak Buwas ya Pak ya bahwa petani kita ini sudah cukup memproduksi tapi mereka tidak bisa apa-apa pada saat harganya anjlok. Kita maklumi bahwa apa namanya Bulog kemampuannya sangat terbatas.

Kemudian yang terakhir Pak Ketua, saya berharap Panja Sawit ini ya segera Pimpinan segera mungkin mulai bekerja agar kita bisa membantu misalnya sarana prasarana, sarana prasarana, perkebunan sawit rakyat. Kalau sawit besar ini tidak perlu dibantulah karena sudah sangat kaya dan kita sangat miris sekali seperti kata Pak Ketua tadi BPDPKS ini Pak Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit ini anggarannya sangat besar menyubsidi perusahaan-perusahaan besar sementara untuk *replanting* ini sangat kecil. Saya kira ini menjadi *concern* Pak ya harapan kita pada Menteri Pertanian agar segera dikonsolidasikan Pak dikomunikasikan agar betul-betul tahun ini sawit rakyat kita ini bisa maksimal dan kita berharap betul-betul juga Bulog ini Pak Buwas saya berharap minyak goreng ini di *stop* Pak kalau bisa ya, di stop juga kalau bisa Bulog mungkin nanti punya pabrik minyak goreng Pak supaya tidak dimainkan oleh para spekulasi ataupun pabrik-pabrik besar ini yang ingin mendapatkan keuntungan besar dan sekali lagi subsidi sekali saya bersama dengan Pak Suhardi Duka bahwa subsidi ini harusnya melalui ya lembaga negara kita Pak apakah Bulog atau BUMN sehingga betul-betul apa namanya bisa dinikmati oleh rakyat kita.

Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Wa'alaikumsalam.

Nanti Hari Kamis kita sudah Rapat Panja tentang sawit ya. Jangan.. *don't miss it.* Selanjutnya Kang Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua, Pimpinan Komisi IV, Anggota Komisi IV yang terhormat. Saudara Menteri Pertanian, *Alhamdulillah* dapat gelar Profesor mudah-mudahan berkah baik bagi negara terutama, dan seluruh jajaran Eselon I yang hadir.

Mitra dari Pupuk Indonesia, RN apa RNI dan Bulog yang juga hadir Pak Jenderal dan semua yang hadir yang saya hormati saya cintai.

Pertama kami dari Fraksi PAN merespons apa yang mereka sampaikan pada saat RDPU kemarin. Mereka mengeluh permasalahan kedelai yang tidak kunjung tiba subsidiya. *Wallahua'lam* ini di mana subsidi ini kedelai ini yang 1000 itu di mana posisinya kita kurang terlalu paham tapi kita sampaikan saja karena ini amanah dari mereka. Yang kedua, minta perubahan peraturan Dirjen Peternakan yang pada persoalan apa pemberian ruang kerja, ruang apa namanya tugas dalam konteks penyiapan BoC dan yang lain yang akhirnya dan telur termasuk daging yang para UMKM kita yang bergerak baik daging, telur dan apa di unggas itu mengalami kerugian. Tentu butuh perhatian dari Kementan karena itu adalah rakyat kita. Mereka itu diperimbangkan antara mereka sebagai Ellyas Pical dan pengusaha besar sebagai Mike Tyson tentu sebelum perang sebelum bertanding sudah kalah.

Yang selanjutnya kita juga ingin sampaikan apa yang di RDPU kemarin tentang pupuk subsidi. Saya sampaikan kemarin dulu Komisi IV pada saat merespons kebijakan Permen KKP apa Peraturan Menteri KKP dan dianggap merugikan para nelayan, sementara dalam hitungan dianggap baik untuk perbaikan proses bagaimana amannya nelayan kita dan amannya ruang laut kita dan itu mogok luar biasa, banyak nelayan kita jadi pengangguran, surat izin susah. Bertahun-tahun dengan Ibu Susi Komisi IV melakukan proses negosiasi berapa kali raker agar itu diubah walaupun tidak kunjung tiba. Kita lakukan demi rakyat semua.

Hari ini tentu rakyat kita juga dan hari ini disaksikan dalam *streaming* dan hari mungkin yang terbesar respons dari publik mengikuti rapat kerja kita di Komisi IV dengan Kementan, mereka punya harapan bagaimana pupuk subsidi ini ada keadilan. Saya ingin sampaikan sebetulnya Kementan memberikan baik dari Balitbang bagaimana pupuk ramah lingkungan itu dan rata-rata demplot itu kita sukses dan tentu mengurangi beban pupuk yang harusnya tadi tiga kuintal, urea dalam 1 luasan 1 hektar menjadi 1 kuintal dan itu di dibantu oleh organik dan itu bisa diterapkan secara meluas dalam proses bagaimana subsidi kita mendapatkan keadilan, baik yang organik maupun non organik.

Jadi kita minta kepada Kementan Dirjen PSP terutama perbaiki data. *Insyah Allah* kalau datanya baik dari dulu subsidi kita baik 8 juta ton, 9 juta ton, sebetulnya tidak terlalu kisruh seperti hari ini biasa-biasa saja. Walaupun kita ingin memberikan semua harus dijamin kebutuhan mereka itu mustahil Bahasa Arabnya tapi artinya negara hadir memberikan stimulan. Kalau toh mereka didorong nantinya maju mereka *Insyah Allah* bisa mandiri dan tidak butuh lagi subsidi.

Yang kedua Pak Menteri, kita ingin pada tingkat teknis. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan ada perbaikan lahan itu bukan hanya tanggung jawab Kementan, tanggung jawab negara, tapi seluruh yang terlibat baik kios, distributor, produsen mereka sama-sama bertanggung jawab minimal mengkampanyekan pentingnya pupuk subsidi itu. Dulu pernah dipaksa untuk menebus sekarang ditiadakan tentu ini menjadi penyerapan sangat rendah karena titik kesadaran akan perbaikan lahan dengan organik

itu sangat rendah di petani kita dan itu butuh dorongan kita butuh negara hadir.

Yang ketiga, dari kami harap bahwa KUR untuk kedelai itu betul-betul bisa lancar Pak Menteri. Jadi masyarakat kita baik bisa menanam apa pun pernyataan-pernyataan itu tapi ini memang fasilitasnya rendah mungkin. Apa *science*-nya apa cara apa kemampuan keilmuannya apa teknologinya, butuh didorong oleh kita semua agar kita bukan hanya swasembada tapi daulat dan kemandirian pangan itu betul-betul terwujud dan terjadi.

Itu dari kami dari Fraksi PAN. Mudah-mudahan kita bisa berbuat lebih bijaksana terhadap respons kita terhadap rakyat kita, terhadap masyarakat kita yang terutama tentu kawan-kawan yang hadir menyaksikan mitra petroganik ini menyaksikan rapat kerja ini punya harapan besar baik menyelamatkan dirinya, investasi usahanya ataupun karyawannya yang itu sudah menyangkut ratusan ribu orang.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan selanjutnya Ibu Yessy.

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Oke baik terima kasih Ibu Ketua yang cantik.

Yang saya hormati Ketua bertiga di depan, beserta seluruh Anggota Komisi IV.

RMS, loh enggak, semuanya ganteng Ketua.

Yang saya hormati Pak Menteri beserta Eselon I yang hari ini hadir kemudian dari Dirut juga Bulog, Pupuk Indonesia juga hadir.

Yang pertama kami menggarisbawahi terkait prognosa neraca komoditas pangan strategis nasional per Januari eh periode Januari dan Mei 2022 tadi beberapa rekan-rekan dari Fraksi sudah mengapresiasi dan menyambut baik bahwa data ini akan pasti betul begitu kan. Nah, tapi kami hanya mengingatkan dan memberikan catatan bahwa bagaimana menjamin ketersediaan ini sampai akhir Mei. Ini harus betul-betul dilakukan kontrol yang ketat, monitoring yang terus ke lapangan dan banyak tindakan-tindakan masif yang harus kita lakukan bersama karena kalau melihat di sini ada beberapa komoditi yang rawan seperti bawang merah, cabai merah keriting dan rawit juga telur ayam ras. Kalau melihat dari stok awal 2022 ini kita tidak ada

stoknya dan yang menjadi data pendukung pertama adalah perkiraan produksi dalam nasional.

Nah, kalau kita tahu bahwa prediksi perkiraan produksi dalam nasional ini kan bergantung sekali dengan dinamika yang saat ini sedang kita hadapi seperti persoalan kelangkaan pupuk. Kemudian yang kedua lagi terkait cuaca yang begitu ekstrem yang seharusnya ini musim hujan jadi musim kering yang seharusnya ini musimnya kemarau menjadi banjir dan lain sebagainya. Ini jadi catatan penting karena saya mengambil salah satu contoh itu di Dapil saya Kabupaten Sintang yaitu ada beberapa kecamatan yang merupakan sentra cabai rawit. Jadi sudah beberapa bulan ini mengalami serangan hama seperti jamur, pembusukan buah.

Jadi ini saya sudah mendapatkan surat memang dari dinas dan beberapa minggu yang lalu juga sudah saya teruskan kepada Dirjen Horti yang bersangkutan tetapi sampai sekarang belum ada tindakan lanjut. Nah, seperti contoh ini kenapa saya sampaikan karena mengingat di Sintang itu sentra yang paling utama memang tiga kecamatan itu tadi. Kalau di situ sudah lumpuh total untuk produksi cabainya di Kabupaten Sintang pasti akan langka. Nah, ini yang kita takutkan ke depan kalau tidak ada mitigasi-mitigasi yang baik dari kementerian blunder begitu di lapangan tapi kami yang pasti mengapresiasi data ini. Semoga ini tugas kita bersama untuk melakukan kontrol di lapangan.

Kemudian yang kedua terkait BPDPKS tadi Pak Ketua juga menyinggung ini memang sangat penting dan beberapa bulan yang lalu juga saya sudah berkali-kali mengatakan ini ketika Raker di beberapa wilayah saya di Dapil bukan cuma di Kalimantan tapi hampir di seluruh provinsi yang produktivitas sawitnya ini besar mengalami hal yang sama. Jadi banyak masyarakat kita itu yang masih enggan untuk mengikuti program ini. Nah, ini menjadi catatan serius di mana mereka takut masa tunggu tanamnya ini tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tidak ada penggantinya di situ dan selain itu ini juga ada kaitannya dengan klaim asuransi Idapertabun yang dulu juga pernah saya tanyakan. Memang ini sudah lama sekali tapi ketika turun ke lapangan kita coba sosialisasikan tentang target PSR dan begitu pentingnya ini kan termasuk program strategis nasional yang harus kita dukung bersama tapi masyarakat selalu mengatakan bahwa kami takut untuk mengikuti ini karena asuransi kami saja belum dibayar klaimnya. Jadi kami bingung masa tunggu ini mau mengharapkan penghasilan dari mana dan lain sebagainya alasan tetapi itu sangat masuk akal.

Untuk asuransi ini Pak Dirjen mungkin Pak Sekjen juga saya minta arahan. Ini harus ke mana saya mencoba membantu masyarakat karena kemarin dengan Pak Dirjen sudah memang sudah ada jawaban. Apakah harus sampai ke OJK dan lain sebagainya ini mohon nanti arahan karena ini sangat penting untuk kasus klaim asuransi yang ada di Indonesia karena miliaran bahkan mungkin triliunan juga dan kalau memang target BPDPKS ini di PSR ini masih sangat lemah kenapa sih tidak dimaksimalkan mungkin di program yang lain seperti penguatan untuk akses infrastrukturnya kemudian juga pelatihan kepada petani-petani sawit rakyat karena di sana itu banyak

juga beredar cara membedakan bibit sawit palsu dan asli saja masyarakat kita tuh bingung. Petani kita banyak yang tertipu meskipun dikatakan ini dari PPKS dan lain sebagainya tapi masih banyak juga sawit yang bibitnya ternyata palsu. Jadi tidak bisa berbuah dan lain sebagainya. Jadi banyak kekhawatiran masyarakat kita terhadap Program PSR ini makanya enggan untuk mengikuti.

Kemudian yang terakhir terkait pupuk memang dari Fraksi Nasdem satu suara dengan rekan-rekan yang lain. Pada intinya kita menginginkan pupuk ini bisa terus ada untuk masyarakat karena ini memang masih sangat-sangat dibutuhkan. Kalau berbicara untuk dicabut atau mungkin ditanggihkan subsidiya bisa dipikirkan mungkin berkali-kali lagi untuk rencana ini karena memang kelangkaan yang besar membuat produktivitas pertanian kita juga akan mengalami efek yang begitu besar juga dan terkait pupuk apakah Kementan juga sudah mempunyai akses atau peran yang begitu luas untuk penentuan karena berkaitan juga dengan fungsi kontrol karena yang saya dengar bahwa Kementan ini tidak terlalu punya peran atau ruang untuk mengakses secara keseluruhan rantai distribusinya. Jadi mulai dari Lini 1 oke Kementerian Pertanian dengan yang berkaitan. Kemudian Lini 2-4 itu lebih ke provinsi apalagi yang Lini 4 ini kan sampai ke pengecer dan distributor. Nah, ini apakah Kementan juga punya akses untuk menekan untuk mengintervensi, mengontrol, bagaimana rantai pasok distribusi dari pupuk bersubsidi ini karena ini juga menjadi peran penting Kementan karena ketika ada masalah ada gejolak dengan pupuk pasti yang mendiskusikan berat dan tugasnya ada di Kementan bersama dengan Direktur Pupuk tentunya Indonesia.

Untuk Direktur Pupuk saya mau menanyakan bahan yang disajikan. Ini per sampai Maret pupuk organik cair dan organik granul ini cenderung mengalami belum signifikan penyerapan, ini kenapa. Mungkin bisa dijelaskan apalagi yang organik cair karena sebetulnya Kalau dilibatkan mungkin Anggota untuk mencari atau mensosialisasikan di Dapil, saya pikir kebutuhannya sangat besar cuma mungkin tidak tersampaikan dan lain sebagainya.

Terima kasih Ketua itu saja waktunya.

Selamat sore.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Selanjutnya Ibu Alien Mus silakan tiga menit.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Waduh yang biasanya yang terakhir harus lebih itu Ketua.

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Alhamdulillah Ketua saya bertiga hadir. Tadi saya pikir enggak ada Pimpinan yang mau pimpin rapat karena ada bahasa bahwa mungkin enggak ada Pimpinan. Terima kasih. Berarti komitmen untuk Kementerian Pertanian ini lebih besar.

Bapak Ibu Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Tentunya Selamat ulang tahun Bapak Syahrul Yasin Limpo. Ada ulang tahun, hadiahnya tadi gelar profesor, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian Bapak Budi Waseso, Bapak Dirut Utama Bulog, Dirut Utama ID Food dan juga yang kita fans banget nih Direktur PIHC. Oh kesayangan banget.

Langsung saja Bapak Menteri karena saya dikasih waktu 3 menit biasanya sebelum 3 menit sudah dipotong tapi tadi ya tadi dipotonglah jangan dipotong. Pak Menteri tahun 2021-2020 saya menjadi Anggota DPR RI Komisi IV ini saya sangat menekankan tentang kedelai. Beberapa kali saya bertanya tentang kedelai. Kenapa, karena memang sering terjadinya masalah impor kedelai dan juga selalu saya orang Maluku Utara tapi saya suka makan tahu sama tempe apalagi tahu gratis dari Pak Ketua. Saya ingat persis waktu itu Pak Menteri sampai bertanya ulang kali tahun 2020, saya masih punya hasil rapatnya Pak di sini, tanya ke Pak Wandu, Pak Wandu mengiyakan bahwa 400.000 ton itu akan terjadi dan terlaksana. Bulan September sampai November saya tanya ke Pak Wandu dalam RDP, RDP katanya sudah tercapai tapi *Alhamdulillah* belum sampai belum ada datanya. Yang menjadi permasalahan kita sekarang zaman Pak Harto waktu itu tahu kalau enggak, eh kedelai itu hampir 1,2 juta ton kalau enggak salah Pak. Saya sangat detail sekali soal kedelai. Saat ini hasil dalam negeri, Pak Wandu kalau memang salah coba nanti dipaparkan hasilnya kalau enggak salah itu hampir kurang lebih 200.000 ton. Permintaan dalam negeri kita 3 juta ton kurang lebih. Saya bingung ini benih yang dianggarkan setiap tahun ini sampai saat ini apakah benih itu dikasih ke petani dimakan atau ditanam? Karena sampai saat ini saya bingung. Enggak tahu susu kedelai itu dari mana dari impor atau apa. Saya punya data Pak, kawasan kedelai 600.000 hektar anggaran non APBN. Ada nanti saya sampaikan. Terus yang APBN *piye*? Hasilnya bagaimana? Benih sebenarnya kita bisa berikan di atas 2 ton per hektar saat ini hanya 0,8 sampai 2,2 juta ton per hektar.

Tadi sempat disinggung tapi saya ulang lagi Pak Menteri. Harga kedelai ini *off taker* 7.000 siapa yang *off taker* harga kedelai ini. Saya ingin tanya saja Pak karena kalau enggak salah juga pernah ada operasi pasar.

Pengembangan lahan untuk kedelai 400.000 hektar ini lokasinya di mana, bagaimana kabarnya, apakah ada hasilnya atau busuk semua atau hilang semua. Jangan ketawa Bu Endang saya serius karena setiap tahun saya bertanya soal ini. Kalau memang kita masih, masih peduli sama keadaan masyarakat tolong kita seriusi.

Kemudian untuk bawang putih. Bawang putih ini selalu terjadi impor tapi juga saya bingung ini RIPH ini masih ada apa enggak begitu. Makanya saya kemarin minta kalau memang bisa kedelai juga ini bisa masuk dalam RIPH. Kenapa begitu, karena setiap kali orang yang melakukan impor harus melakukan wajib tanam Pak sehingga ada keterlanjur apa kok keterlanjuran KLHK jadinya. Keberlanjutan petani juga merasa bahwa, oh tanam kedelai ini benar-benar akan diserap. Kayak tadi ada yang menyarankan kalau bisa serapannya langsung dari Bulog atau mungkin ada kerja sama dengan pihak swasta yang lain sehingga ada jaminan itu.

Kalau enggak saya kemarin melihat hasil laporan dari pangan kita Indonesia ternyata hampir 60% impor plus kesehatan kita 80% impor. Bahaya kalau perang di mana-mana ini kita. Padahal, kita punya lahan yang luas tapi ini tidak bisa dimanfaatkan karena Ketua bilang yang sudah ditanyakan tidak harus ditanyakan lagi, saya langsung saja Pak. Semoga di Raker ini nanti mengambil kesimpulan dan keputusan. Saya melihat di optimalisasi lahan itu ada 804 Pak Sekjen penganggarannya tapi saya lihat di rekomendasi PEN itu 464. Apa dasarnya kelebihan anggaran tersebut untuk apa? Terus konservasi lahan rehab itu 181 yang terpakai itu hampir 63. Tolong Pak penganggarannya tuh sesuai dan tepat sasaran. Jangan bikin banyak-banyak anggaran baru tidak tepat sasaran, alamat lagi enggak ada hasilnya.

Kemudian untuk saya mau sampaikan ke Pak Dirut PIHC. Tolong kita dipastikan penyesuaian untuk yang dari PSP, ada surat enggak yang tadi ditanyakan oleh Pak Ibnu. Tolong disampaikan agar tidak ada salah sangka atau tidak ada salah paham.

Pak Ketua, izin karena 10 hari lagi ini adalah sudah masuk bulan suci Ramadhan tentunya 9 bahan pokok itu harganya pasti naik melonjak terutama saya minta kemarin kalau tidak salah Menteri Perdagangan dan juga Menteri Perindustrian telah melakukan operasi pasar dan melakukan *pers conference* juga tentang harga minyak curah minyak goreng curah yang disubsidi oleh pemerintah. Kita sama-sama mengawal ini kalau bisa Pak Menteri Pertanian juga ikut maksudnya walaupun tidak dalam bidang industri minyak kelapa tapi untuk menyampaikan kepada seluruh jajarannya bahwa minyak kelapa minyak goreng curah itu ada subsidinya Rp14.000 apabila ada yang menjadi *cuan-cuan* di situ tolong kita selesaikan bersama.

Saya karena orang Maluku Utara Pak hasil kelapa perkebunan kelapa kalau memang kelapa VOC untuk pembuatan minyak kelapa itu minyak VCO. VOC lagi tadi karena ngomongin, ya VOC juga. VCO itu agak sulit, saya ingin untuk kelapa sawit tolong jangan lama-lama kalau Hari Kamis janganlah, kalau bisa Panjanya tuh di hari Rabu besok jalan karena ini BPDPKS anggarannya begitu besar kita perlu tahu juga nih barang taruh di mana karena jangan sampai. Oh besok KKP ya. Hari Kamis kalau bisa kita tanya ini Pak Sekjen juga sesama Dirjen BUN ini. Pak Menteri masih berapa lama ini 6 apa nih PLT BUN sama PSP ini satu orang ini kapan nih Pak. Tolong dijawab karena kalau sesuai aturan kayaknya sudah 6 bulan lebih.

Itu saja Pak Menteri. Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik terima kasih. Ini dari Fraksi semua sudah ada masih ada 4 pendalaman dan sebelum ke pendalaman beberapa waktu yang lalu Raker Pak Menteri saya tanya tentang saya juga diskusi dengan Pak Sekjen tentang ZA. Tadi juga sempat diangkat oleh Pak Ibnu Multazam juga. Kalau misalnya itu dicabut subsidiya, apa solusinya untuk para petani tebu karena di dalam salah satu hasil Panja juga tebu ini salah satu yang di diperhatikan dibantu bahasanya bukan disubsidi ada ada ada istilahnya bantunya ada beberapa komoditas yang memang menjadi prioritas untuk dibantu. Nah, saya minta solusinya seperti apa jika memang tadi kalau hasil Panja kan tidak termasuk ZA di situ dan Pak Kasdi pernah mengatakan bahwa itu bisa di meskipun dalam kajian ya, diganti oleh urea tapi juga saya juga diskusi sama Pak Dedi itu belum bisa juga maksudnya kajiannya seperti apa. Ini untuk membantu para petani tebu terutama.

Itu saya langsung ke izin langsung ke pendalaman Ketua, masih ada 5 karena tambah. Mohon kerjasamanya karena sudah jam 14.30 lebih ya jadi jam untuk *strict to the point* saja. Terima kasih. Bu Endang.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Baik terima kasih.

Pertama kali tentu saja saya dan teman-teman mengucapkan selamat kepada Pak Profesor dan juga selamat hari ulang tahun. Pak Ketua dan Ibu Ketua yang saya hormati dan saya banggakan.

Saya sudah menulis semua permasalahan yang ada di Dapil kami di setiap Direktorat Jenderal. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan program yang salah sasaran Pak. Kami sudah tulis semua jadi saya tidak perlu mengungkapkan satu persatu hanya tolong Pak ada binaan di Pesantren Cianjur, binaan dari Bank Indonesia yang sekarang terlantar karena bantuannya sudah terputus. Pak Direktur dari Direktorat Jenderal Hortikultura sudah meninjau karena kualitas melonnya nomor satu di Indonesia, enggak di dunia. Nah, mudah-mudahan Pak Menteri dan para Dirjen mengantisipasi apalagi ada pesan merdeka ekspor.

Kami sudah membina kelapa-kelapa yang di Argabinta jadi 5 jam dari Cianjur yang jalannya rusaknya bukan main dan bantuan dari LHK tentang cultivator sudah sampai, cuma tadi Pak jalannya jelek. Jadi mohon ada koordinasi antara Kementerian Pertanian dan PUPR. Eh dari KLHK eh bukan sebentar dari Kementerian Perikanan untuk penggaraman.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik terima kasih. Kalau cultivator. Baik terima kasih Eyang. Selanjutnya Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat.

Yang pertama saya akan menyoroti tentang pupuk. Jadi kami menegaskan karena ini juga hasil dari perjalanan kami di bawah Pak Menteri jadi nyaris tidak ada kelompok tani yang bersepakat kalau beberapa item subsidi itu dicabut khususnya juga pupuk organik termasuk kemudian ZA-36 dan juga NPK. Apalagi kalau kemudian mengingat keinginan ambisius ya dari Kementan yang punya IP400 mestinya kan justru pupuk subsidi khususnya organik ini dipertahankan. Kalau 300 saja kondisi tanah seperti itu, bagaimana IP400.

Kemudian yang kedua yang terkait dengan harga soal pupuk ini. Kalau kita mengenal ada BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia apakah tidak dimungkinkan juga adanya ketetapan satu harga untuk pupuk yang non subsidi itu sehingga tidak ada pihak-pihak yang terus-menerus mempermainkan soal harga ini dan itu yang paling dirasakan berat oleh para petani kita.

Nah, yang kedua yang soal kedelai Pak Menteri. Dulu pernah kita sampaikan juga yang terkait dengan antara pembatasan importasi kedelai yang kedua peningkatan produksi di dalam negeri dan yang ketiga dengan skema *off taker* yang itu difasilitasi oleh Kementan. Kemarin kita sudah ketemu dengan koperasi gabungan ya tahu tempe dan mereka menyatakan siap untuk menjadi *off taker* bahkan kemudian kita perjelas lagi kalau kebutuhan mereka itu 3 juta per ton katakanlah dibatasi hanya 2 juta per ton sehingga yang satu juta itulah yang digenjut diproduksi dalam negeri. Mereka siap dan bahkan bisa memberikan harga 9 hingga 10.000 per kilogramnya.

Nah, di sisi lain untuk yang pembatasan impor saya kira memang agak riskan dan menyedihkan kalau sepenuhnya 100% itu dilakukan oleh pihak swasta. Nah, saya kira Bulog harus kita kembalikan sebagai bagian yang sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan khususnya di di kedelai ini. Dan yang berikutnya skema soal akses permodalan Pak. Jadi pihak koperasi tahu tempe juga ingin diberikan akses modal sebagai *off taker* itu dari KUR dan bilamana mungkin saya kira Bulog juga bisa diberikan akses yang sama sehingga tidak mencari dari skema apa ya pembiayaan perbankan yang normal dan kemudian dikenai bunga yang normal saya kira kita memberatkan BUMN kita sendiri.

Nah, yang berikutnya Pak Menteri yang terkait dengan unggas ini atau daging. Jadi kemarin juga ada keluhan yang sangat berat sekali harga daging pedaging ayam ya di pasaran itu enggak sama dengan yang dinikmati oleh para peternak yang ada di kandang dan ini juga dikarenakan adanya pemain besar yang menguasai pasar dari hulu sampai hilir. Mereka berkali-kali sudah menyarankan harus ada ketegasan sikap dari pemerintah untuk mengatur agar integrator ini juga jangan main di budidaya begitu. Bagaimana mereka

yang punya dana itu pun juga bisa dari, dari pihak yang lain sementara harus berhadapan dengan para peternak kita yang itu dari modal sendiri dan utang-utang lagi kayak begitu. Jadi saya kira memang akan enggak adil kalau ini disandingkan ya dengan mereka.

Kemudian yang terkait dengan minyak goreng saya sepakat ini untuk didalami di Komisi IV. Yang saya heran di sini kan ada saya baca dari RNI ya kalau tidak salah, kemudian RNI melalui ID Food ini berperan sebagai distributor ini saya tidak ingin bercuriga. Ini kan persoalan kemarin kelangkaan minyak goreng diduga kan ada permainan distributor yang mencoba menyembunyikan dan sebagainya. Apakah ID Food ini RNI ini itu ikut bermain begitu loh di sini. Ini sebenarnya RNI atau pihak lain ataukah selain RNI itu juga ada distributor yang lain.

Kemudian yang kedua yang terkait dengan subsidi ternyata kan subsidiya itu untuk produsen. Produsennya ini ternyata mereka juga korporasi yang punya sawit begitu. Ini artinya kan ini ada kesalahan atau luar biasa yang menurut saya mohon maaf Pimpinan menurut saya memang ini harus dibongkar tuntas karena BPDPKS itu sesuai dengan fungsinya. Dulu tidak untuk ini semuanya begitu. Nah, ke mandat untuk bisa melakukan bahkan kemudian untuk subsidi intervensi yang kemarin 3,7 triliun kemudian yang sekarang ini dengan dicabutnya HET kemudian akan ada lagi subsidi itu atas dasar pertimbangan apa dan apakah ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang karena ini akan menguntungkan pasti perusahaan. Jadi korporasinya sudah mendapatkan insentif melalui Biodiesel 110 triliun, kemudian mereka mendapatkan lagi subsidi sebagai produsen minyak goreng dan jangan-jangan mereka juga mendapatkan keuntungan yang lain karena mereka juga yang menguasai jaringan distribusi itu.

Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri dan Bapak/Ibu sekalian.

Semangat.

*Wallahul muwwafiq illa aqwamin thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Terima kasih Mbak Luluk.

Tapi memang masalah minyak goreng ini luar biasa kejahatannya. Kejahatan kemanusiaan benar, kami kalau lihat memang kurang ajar banget ya.

Baik selanjutnya Pak drh. Slamet. Pertanyaan Bu Sa'adiyah sudah dititipkan? Oke. Selamat ulang tahun juga.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik terima kasih Bu Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan sidang, Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bu Wakil Ketua yang saya hormati.

Teman-teman Anggota Dewan, Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama Pak Ketua Pimpinan kita harus mendudukan hal yang tepat supaya kita tidak salah kaprah. Ketika hari ini kita tanya terkait dengan stok pangan, mohon izin saya lepas, terkait dengan stok pangan hari ini sudah ada Badan Pangan Nasional ya. Sudah ada Badan Pangan Nasional harusnya yang kita hadirkan hari ini adalah Badan Pangan Nasional walaupun kita belum tahu sudah sampai di mana ya sehingga saya sampaikan kepada Pimpinan mohon segera ditindaklanjuti ini mitra siapa begitu ya. Kalau secara nalar harusnya ini mitra Komisi IV nah sehingga kita segera bisa menghadirkan. Jangan sampai kemudian permasalahan ini kita serahkan sepenuhnya ke Kementan terkait dengan stok dan lain-lain. Saya pikir ini menjadi catatan kita bahwa badan pangan yang sudah terbentuk harus segera dihadirkan di Komisi IV. Ini ini terkait dengan itu karena apa ini juga nanti implikasinya pertanyaan saya ini kepada ke Pak Menteri ini kan implikasinya ke P2L juga Bu Ketua, Pak Ketua, Pak RMS ya. Dengan terbentuknya ini yang dibintangin P2L mau ke mana ini, ini harus jelas di Raker sekarang ya supaya ini kaitannya dengan itu. Ya makanya ini perlu kejelasan itu, itu yang yang terkait dengan catatan kita nanya stok pangan untuk lebaran dan lain-lain mungkin perlu segera dihadirkan Badan Pangan Nasional yang sudah dilantik.

Nah, ini penggantinya juga harus diperkenalkan ini ID Food jadi mungkin ini penggantinya atau sudah definitif Pak ID Food? Sudah. Saya pikir nanti perlu diperkenalkan, itu yang yang yang yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan stok pangan.

Yang kedua, saya juga mengomentari Komisi IV harus melakukan aksi yang nyata terkait dengan minyak goreng dalam kerangka di mana kita ada. Dalam hal ini konteks minyak goreng mungkin kita ada di perkebunannya oleh karena itu secara riil Komisi IV rasa-rasanya perlu memberikan dukungan atas terbentuknya Pansus Minyak Goreng. Nah, ini nih mungkin harus ada tindakan riil supaya kita tidak sebagai sebuah lembaga politik perlu memberikan satu keputusan-keputusan sehingga nanti ini segera terurai walaupun ini ranahnya di Raker tapi perlu saya sampaikan di forum ini supaya nanti kita tidak pada hal-hal yang kurang tepat di di di forumnya.

Kepada Pak Menteri saya ingin sampaikan juga Pak Menteri terkait dengan keluhan teman-teman di perunggasan ya dan ini setiap tahun berulang yaitu terkait dengan stok yang selalu melimpah apa TOC dan solusi yang diberikan selalu sederhana *cutting cutting cutting*. Padahal, ujung dari ini semuanya adalah pasti berawal dari impor GPS-nya. Saya ingin tahu berapa sih sebenarnya kebutuhan stok eh kebutuhan final stok kita untuk apa untuk ayam kita sehingga nanti berapa kemudian yang akan dilakukan impor. Yang

saya tahu dari pengusaha itu *over stock* untuk impor GPS-nya Pak. Wajar kalau kemudian dari atasnya saja sudah berlebih pasti terjadi *cutting* dan ini berulang. Apakah tidak ada kebijakan yang kemudian betul-betul di-*strict* bahwa tidak boleh melebihi stok impor.

Saya curiga akhirnya kemarin makanya saya japri ke Pak Dirjen, apakah impor GPS itu berdasarkan permintaan yang mengajukan atau berdasarkan kebutuhan nasional itu. Saya curiga ini yang berdasarkan kebutuhan pengusaha bukan kebutuhan stok oleh karena itu saya minta data kebutuhan nasional berapa sih. Saya minta data itu sehingga nanti kita bisa akan konfirmasi berapa realisasi dari dari impor yang dilakukan GPS.

Nah, terkait juga titipannya masalah kedelai Pak Menteri. Testimoni mengatakan dari mereka bahwa memang kedelai lokal lebih enak, lebih empuk, lebih manis, lebih legit katanya untuk terkait dengan tahu dan tempe, tahu ya dan dipastikan bahwa kebutuhan Asosiasi Koperasi itu setahun 1 juta ton siap membeli tinggal permasalahannya dalam masalah kualitas dan di situlah kemudian pemerintah harus hadir dari sisi produktivitas untuk kemudian memberikan bimbingan supaya kualitasnya menjadi baik sehingga dia bisa membeli di angka sampai Rp9.000.-

Tinggal kan begini Pak kenapa produktivitas kita tidak tidak tercapai karena ada satu hal yang tidak kita pikirkan. Hari ini Kementerian Pertanian memang tugasnya adalah menggenjot dari sisi produksi itu tidak salah tetapi jangan lupa kalau kemudian kesejahteraan dalam hal ini harga panen petani sudah dijamin bahwa dia selalu untung, maka tidak perlu didorong-dorong untuk produksi dia akan nanam kok. Makanya pastikan bahwa dia untung dari sisi pascapanennya maka tidak usah didorong-dorong untuk kemudian bertanam pasti dia bertanam sehingga produktivitas stok akan tercapai. Oleh karena itu masukkan saya Pak segera kita nanti rencanakan di 2023 bagaimana pembinaan di petani lokal kita gadeng koperasi itu yang memang dia kemarin mengatakan kita minta jaminan bagaimana kalau harga murah juga dia tetap harga Rp9.000,- begitu ya semua Anggota mendengarkan itu sehingga nanti kita perlu aksi yang nyata dari kementerian yang kemudian diawasi oleh Komisi IV itu.

Kemudian beberapa hal saya terakhir Pak Menteri terkait dengan *slide* yang ada di halaman 4 Pak. Saya mohon penjelasan saja agak-agak kurang paham dari awal itu misalnya beras neracanya plus 7 juta sekian. Di stok akhir juga sama begitu ya. Kemudian misalnya bawang merah plus 236 itu nah belakangnya kosong ya. Kemudian juga cabai merah keriting neracanya plus ya plus 204.000 sekian kemudian stok akhir kosong. Kemudian rencana impor juga kosong. Nah, yang kosong-kosong ini agar tidak terjadi spekulasi pikiran kita ke mana-mana mohon dijelaskan apakah memang nanti ini akan ada kuota impor yang tidak terkendali sehingga ujungnya nanti pas panen juga sama lagi ya produk impor. Walaupun memang izin impor bukan ada di kementerian kita tapi nampaknya RIPH kan masih ada ya. RIPH masih ada sehingga pintunya ada di juga di Kementerian Pertanian. Nah, ini mohon disampaikan mohon dijelaskan terkait dengan tabel-tabel ini yang kosong-

kosong apakah ini memang ada ruang impor yang datanya tidak bisa kita kontrol.

Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Wa'alaikumsalam.

Saya itu setuju kalau minyak goreng di Pansus-kan saja.

Selanjutnya Muhammad Dhevy Bijak anak baru.

F-P. DEMOKRAT (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ayo kita plonco.

F-P. DEMOKRAT (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan, Ibu Wakil Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Kementan sekali lagi selamat atas gelar barunya sebagai Profesor dan selamat ulang tahun Pak Mentan. Kemudian juga Dirut Bulog, Dirut RNI dan kemudian Dirut Pupuk Indonesia dan seluruh Anggota baik yang secara fisik hadir dan kemudian yang secara virtual.

Seperti arahan Pak Ketua tadi secara substansi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Namun kemudian, ada beberapa saya tambahkan yang pertama sesuai poin Raker kita bersama dengan Kementan hari ini tentu saya mengapresiasi Kementan dan seluruh jajaran atas paparannya dan kemudian pengantisipasiannya untuk ketersediaan bahan pangan di bulan suci menjelang bulan suci Ramadhan. Tentu kami berharap penuh dan seluruh rakyat Indonesia tentu berharap agar kiranya sampai bulan suci Ramadhan ketersediaan bahan pangan bisa betul-betul tersedia.

Yang kedua, izin Pak Mentan pada halaman 7 dari bahan Raker yang diberikan oleh Pak Mentan. Di sini terkait dengan masalah kedelai pada tahun 2023 produksi ditargetkan sekitar 1,12 juta ton dengan luas tanam 750 hektar eh ribu hektar. Sedangkan di halaman 25 Pak itu beda sekali Pak, di situ

malah 2 cuman 550.000 ton. Ada ketidaksesuaian di situ, tolong dijelaskan kemudian yang benar yang mana Pak. Halaman 7 sama halaman 25 di situ 0,55 juta ton untuk kedelai sedangkan di halaman 7 1,12 juta ton. Tolong jelaskan yang mana yang benar.

Yang terakhir atas anjloknya produktivitas bawang merah sekitar 40% di sentra tanam akibat cuaca buruk pada awal tahun ini Kemendag berencana membuka izin impor bawang merah untuk mengantisipasi kenaikan harga. Ketulan saya kemarin di Komisi VI dan baru hari ini pindah di Komisi IV Pak Menteri. Kalau memang itu diberitakan bersurat kepada Pak Menteri tolong apakah itu benar dan kemudian apa tanggapan Pak Mentan terhadap berita tersebut.

Ibu Pimpinan mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik selanjutnya Pak Edward. Tolong waktunya ya.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Ya tidak sampai 7 menit tenang saja.

Terima kasih banyak Pimpinan Komisi IV beserta Anggota Komisi IV yang saya banggakan.

Bapak Menteri beserta jajarannya.

Bapak Dirut Bulog, Bapak Dirut RNI, Bapak Pupuk Indonesia dan semua yang hadir saja supaya jangan kurang jangan lebih terima kasih banyak.

Jadi memang sudah banyak yang kita dengar saya singkat saja. Jadi Pak Menteri saya ingin memberikan masukan bahwa saya dengar tadi omong daging sapi itu sebenarnya hati saya sedih karena NTT itu Pulau Timor itu zaman dari dulu saya belum lahir itu sudah terkenal dengan produksi sapi, cuma sekarang saya baru dapat WA bahwa banyak sapi-sapi yang di sana itu mengalami penyakit sapi, babinya juga, ayamnya juga. Jadi saya mohon kalau bisa Pak Menteri tolong diperhatikan agar itu saya kira itu bisa mengurangi impor kita kalau peternakan unggas, sapi, dan babi dan kambing di sana itu kita memberikan perhatian khusus karena kepada siapa lagi kita harus mengadu kalau enggak kepada Kementerian Pertanian

Dan berikutnya mengenai pupuk karena saya dulu di Panja Pupuk, saya tidak membela siapa-siapa tapi saya punya tanggung jawab moral masalah pupuk ini masalah uang subsidi yang kurang. Biar kita panggil Profesor dari Amerika juga dia kali bagi kurang tetap sama kurang, *wong* kebutuhannya 23 juta atau 24 juta ton yang disubsidi duitnya hanya 9 juta 33 triliun atau berapa itu bagaimana mau cukup. Jadi setiap orang boleh berargumen tidak ada yang larang itu haknya dia, tapi apa yang sudah Panja putuskan saya kira itu yang terbaik untuk sementara itu yang terbaik. Kita

jangan utak-atik lagi. Silakan berargumen terserah itu haknya pribadi masing-masing. Kita tidak usah saling menyalahkan, jalan saja dulu karena upaya dari Kementerian Pertanian selama ini yang saya melihat menurut saya, mata, telinga, otak, hati, dan mulut ini saya melihat ada upaya dan sudah ada usaha ke arah untuk pemenuhan pangan republik ini tapi ini barang kan butuh waktu toh. Dari barang enggak ada baru mulai bantu tambahkan segala macam ya kita butuh waktulah. Kasih kesempatan Pak Menteri dengan jajaran stakeholder yang ada. Jadi mari kita bahu-membahu. Kami Komisi IV ini bukan bukan juru juru ini apa bukan juru persalahkan orang, tidak. Kami mau bekerja sama dan mau saling memberi masukan karena kegagalan Kementerian Pertanian juga atau bersama stakeholder yang lain, kegagalan kita bersama. Kami juga dianggap tidak berhasil karena Komisi IV kan membidangi pertanian, perikanan, Bulog dan lain-lainnya ini.

Jadi begini kalau mengenai minyak goreng ini memang stoknya banyak tapi kita tahu di dunia ini ada mafia minyak goreng, ada mafia sapi, ada mafia segala macam mafia ada di dalam situ.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Sudah Pak Edward?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Sedikit lagi Bu supaya saya tutup. Jadi mari kita berantas bersama kita harus ada kejujuran, komitmen dan konsekuen dan harus punya niat yang baik hanya itu saja. Saya sampaikan banyak terima kasih, mudah-mudahan Pak Menteri ke depan kita akan lebih baik lagi.

Selamat siang.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Selamat siang.

Terima kasih Pak Edward. Terakhir Bu Nuraini.

F-P. DEMOKRAT (HJ. NUR'AENI, S.Sos, M.SI.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati.

Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran.

Direktur Pupuk Indonesia, Direktur ID Food serta Direktur RNI yang saya hormati saya banggakan.

Ucapan selamat ulang tahun buat Pak Menteri semoga panjang umur dan bahagia selalu serta selamat atas diraihnya Profesor kemarin.

Mencermati kondisi saat ini fenomena yang terjadi tentang kelangkaan pangan strategis nasional kita di masyarakat ini yang membuat kami merasa prihatin Pak Menteri. Dengan situasi dan kondisi saat ini di mana rakyat kita juga dihadapkan Covid yang belum berhenti juga, belum di wilayah saya kemarin terjadi banjir bandang yang luar biasa ini membuat keprihatinan yang mendalam sehingga *Alhamdulillah*, Pimpinan memiliki komitmen agar bagaimana persoalan pangan strategis yang langka di masyarakat ini bisa mencari solusi yang tepat serta bijak untuk bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan dalam hal ini mungkin kami juga memberikan apresiasi ya.

Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan sudah dibaca terhadap dokumen yang disampaikan mengenai prognosa neraca komoditas pangan strategis serta beberapa upaya yang akan dilakukan baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, hanya saja yang ingin saya tanyakan apakah dari prognosa neraca komoditas yang disampaikan beberapa, 4 item yang di sini dijelaskan bahwa stok ini diasumsikan tidak ada. Apa yang akan diupayakan nanti di beberapa item ini 4 item yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian karena kalau melihat di keterangan ini tidak ada. Bagaimana upaya yang akan dilakukan agar 4 stok item tersebut bisa ada ya sehingga untuk mencapai stok di menghadapi bulan Ramadhan ini kita tidak ragu-ragu ya dan yakin dan percaya serta adanya kegiatan yaitu mengenai apa namanya gelar operasi pasar. Yang ingin saya tanyakan ini di waktu yang kapan karena ini menjelang 10 hari kita akan menghadapi bulan puasa. Nah, untuk itu kita juga dari kementerian bisa menggandeng kami di masing-masing Dapil dalam rangka operasi pasar agar kami juga ikut berbuatlah menjawab terhadap persoalan yang ada saat ini.

Dan kalau melihat dari pembangunan pertanian Pak Menteri tentu ini harus didukung dari 3 sisi yaitu bagaimana penguatan dari sisi anggaran, yang kedua penguatan dari sisi regulasi dan ketiga adalah penguatan dari sisi kelembagaan. Saya ingin mendalami Pak Menteri dan butuh keyakinan, apa yang sudah Pak Menteri sampaikan melalui dokumen ini bahwa sudah dilakukan *mapping* terus juga bagaimana memberikan solusi yang tepat dan saya ingin lebih percaya lagi dengan kondisi APBN kita untuk Kementerian Pertanian yang hanya diberikan 14 triliun. Pak Menteri apakah mau mengakomodir semua melihat dari solusi yang diberikan, apakah sanggup dan mampu dengan kondisi anggaran yang minim tersebut. Ini yang kami butuhkan.

Terus dari sisi kelembagaan melihat kondisi saat ini, bagaimana peranan kelembagaan Bulog dan BPN. Di sini ada saya melihat ada kekosongan kewenangan terhadap peran dan fungsi penugasan dari kelembagaan. Ini juga yang harus segera dibicarakanlah secara serius antara BPN dan Bulog. Seharusnya mendorong lebih baik Bulog begitu yang untuk bisa melakukan stabilisasi stok barang dan harga untuk pangan nasional kita karena kalau melihat perkembangan BPN juga sampai saat ini kan belum ada *action*. Ini yang kami tidak merasa percaya kehadiran BPN untuk bisa melakukan stabilisasi pangan dan harga pangan untuk rakyat kita.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Masih lama?

F-P. DEMOKRAT (HJ. NUR'AENI, S.Sos, M.SI.):

Satu lagi ya, satu lagi kaitan dengan regulasi. Kemarin kita itu kan mendapatkan aspirasi dari beberapa asosiasi yang intinya adalah untuk bisa bagaimana mendorong ataupun mengevaluasi terhadap Undang-Undang 18 Tahun 2009. Yang saya tahu Undang-Undang 18 ini kan sudah dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang 41 juga sudah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Ciptaker. Nah, pertanyaannya dari beberapa undang-undang dilakukan pembaharuan sudah melakukan apa di internal Kementerian Pertanian supaya rakyat kita khususnya peternak kita tidak salah persepsi tidak salah pengertian. Mereka berharap banyak pemerintah ini hadir sebagai regulator. Ini yang ingin saya tegaskan.

Dan terakhir kaitan dengan subsidi pupuk. Kalau pun pemerintah kita membuat kebijakan mencabut subsidi pupuk, apa yang akan diberi nilai insentif untuk para petani kita yang seharusnya pupuk itu kan harusnya diberikan secara cuma-cuma subsidi kepada petani kita, akan tetapi karena kebijakan yang akan diambil adalah mencabut subsidi itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup Bu Nuraini, waktunya sudah lebih dari 5 menit karena tadi sesuai kesepakatan apabila bisa kita 15.30 WIB kita selesaikan, apabila tidak kita perpanjang.

Ya terima kasih.

F-P. DEMOKRAT (HJ. NUR'AENI, S.Sos, M.SI.):

Ya baik ya mungkin itu saja ya Pak Ketua cukup saya kira.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / KETUA KOMISI IV DPR RI):

Silakan Kiki.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Tolong Bang Bang RMS pindah sana duduknya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya ini terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri bolehlah Pak Menteri ini saya mau nanya Dewasnya langsung duduk sebelah kiri saya Pak Menteri.

Pertama yang ingin saya pastikan tadi saya sempat diskusi sepintas, ini kita itu agak bingung Ketua ada Bulog, ada ID Food, ada apalah, apalah dan apalah begitu ya. Jadi kita ini dibingungkan ya mungkin secara hulunya yang senang-senang saja Kementerian Pertanian ibaratnya distributornya banyak ya kan tapi ya jangan sampai distributor banyak tapi enggak jelas ntar hilang lagi di pasaran kan begitu.

Kedua, saya tadi berbicara keras karena Pak Menteri enggak datang ya tadi tapi kayaknya Pak Menteri kalau memang enggak jelas itu Eselon I-nya ya mohon maaf coba dievaluasi ya. Evaluasi saja batik sebelah kanan Bapak ya begitu ya, hah? Apa. Kalau dipecat dia ASN Pak enggak bisa ya kan. Enggak maksudnya begini dalam arti kata begini, kita kepengen lembaga ini dihargailah dihormatinlah ya karena apa bukan hanya masalah hari ini ada miskomunikasi saya anggap saja miskomunikasi tapi contoh ya, saya di Komisi IV sudah dari jauh-jauh hari bicara masalah antisipasi Badan Pangan Nasional ya kan. Antisipasi BRIN, mungkin Pak Menteri sudah ngomong tapi enggak pernah tuh direalisasiin. Yang akhirnya kena siapa, menteri lagi, ya mohon maaf Bapak bosnya ya enggak Pak Menteri. Ya coba dievaluasi lagi itu. Saya sudah disemprit nih sama sebelah kiri ya kan jangan *offside* katanya, Dewas.

Ya jadi prinsipnya apa Pak Menteri Badan Ketahanan Pangan P2L oke. Suratnya katanya sudah ada, dikemanain kan begitu yang jelas-jelas gitu loh. Anggarannya di bintang kemarin dikemanain, tolong Pak Sekjen. Kalau enggak dievaluasi benar nih Bapak ini begitu loh ya apalagi Ketua sudah marah-marah tahu sendiri kalau Ketua sudah marah ya. Terus kedua Pak Fajri, kalau memang Bapak mohon maaf Pak saya hormat Bapak punya gelar profesor kan tapi tolong masalah anak buah Bapak yang ribuan jumlahnya karena sudah bertransformasi ke BRIN diperhitungkan juga dong. Jangan mikirin Bapak sendiri. Ya saya mohon maaf Ketua karena kita pada dasarnya *men-support* pemerintah tapi pemerintah juga harus mencari jalan terbaik supaya semuanya jelas.

Ketiga, Bulog ID Food apalagi lah namanya banyak banget masalahnya bingung saya. Hah? Ya itulah pokoknya ya. Jadi supaya penugasan-penugasan ini mungkin tidak selesai oleh Menteri Pertanian sendiri, Pak Buwas dan teman-teman yang lain duduklah bareng begitu loh. Ya diberi kewenangan yang *clear*, kalau ini enggak jelas bahaya. Jadi mungkin itu saja Ibu Ketua tiga poin yang ingin saya sampaikan karena mungkin Pak Bakir sudah mulai lelah ya. Ya oke, ya saya takutnya lelah makanya saya bilang ya saya takut pingsan tadi loh enggak tahunya masih ada ya.

Jadi itu saja Pimpinan, terima kasih banyak. Saya akhiri.

Wabillahi taufik wa hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sudah habis tapi saya pengen *highlight* tentang relaksasi kemarin Pak Menteri minta.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd):

Pimpinan. Izin, izin satu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Sebentar ya. Saya lagi ngomong maksudnya Ibu Maria yang cantik.

Relaksasi yang diminta Pak Menteri waktu itu waktu Raker sebelumnya nah itu sejauh mana perkembangannya. Apakah sudah dibicarakan di dalam Ratas atau bagaimana itu terkait dengan transformasi Badan Litbang ke BRIN itu termasuk juga yang dipertanyakan oleh Ibu Kiki, begitu saja.

Bu Maria tidak lebih dari 1 menit.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd):

3 menit lah Bu, nawar 3 menit.

Ya Pimpinan rapat beserta Anggota Komisi IV.

Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta Eselon I, Direktur Bulog, Direktur RNI dan Direktur Pupuk Indonesia.

Di sini saya ingin bertanya ini sedikit program dari PT Rajawali Nusantara Indonesia di sini kita melihat dengan adanya Program Makmur di halaman, enggak ada halamannya di sini Pak, oh 10. Dengan Program Makmur di sini karena melihat di sini ada target tanam, luas tanam, dan mitra petani yang ingin saya tanyakan, apakah program tersebut ya Program Makmur tersebut sudah dikoordinasikan bersama Kementan karena kita takutnya di sini juga anggaran tumpang tindih, satu, nah ya kan. Nah, lokasinya juga sudah ada ini Bapak, nah ini satu.

Nah, yang kedua ini terkait minyak goreng. Kenapa di sini hanya distribusinya minyak goreng ini tidak ada Kalbar. Apakah Kalbar bukan NKRI ya kan, nah ini kenapa, kenapa ini ya Kalbarnya tidak ada ini kosong. Padahal, emak-emaknya juga perlu minyak goreng ya kan. Nah, ini tolonglah distributor distribusinya itu harus ada Kalbar juga ini cuma ada berapa ini. 1, 2, 3, 4 enggak sampai 30 provinsi ya kan Pak. Tolong ini Pak ini ada dua ini, Kalimantan Kalimantan Barat enggak ada ya kan, Kalimantan Utara enggak ada ya ini berbicara Kalimantan Barat sajalah karena daerah Dapil saya.

Nah, yang ketiga ini untuk Pupuk Indonesia. Ingin saya karena permasalahan pupuk di mana-mana, yang ingin saya tanyakan berapa sih Pak kemampuan produksi NPK per tahun. Berapa Pak pertahun ini NPK? Nah, padahal, kemampuan produksi untuk NPK ya kan di Bapak itu hanya 2,4 ya kan, yang diperlukan itu 6 juta ton itu bagaimana Pak karena kendala Bapak sendiri untuk produksinya saja kurang ya.

Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih kepada Anggota.

Ya saya baru menerima info ini enggak tahu ini Menterinya paham atau tidak atau Eselon I-nya yang gagal paham ya. Menteri Pertanian telah merubah Permentan Nomor 07 Tahun 2019 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan peremajaan serta sarana prasarana perkebunan kelapa sawit dengan Permentan Nomor 03 Tahun 2022 tentang hal yang sama. Dalam perubahan Permentan tersebut terdapat bentuk peremajaan kelapa sawit dengan pola kemitraan. Saya tegaskan dengan pola kemitraan. Dalam pola penyelenggara peremajaan semuanya menjadi kewenangan BPDPKS tanpa memerlukan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Perkebunan, lembaga-lembaga yang punya kewenangan terkait dengan budidaya perkebunan. Pola kemitraan dilakukan oleh BPDPKS bekerjasama langsung dengan perusahaan perkebunan sebagai pelaksana peremajaan. Jadi tidak perlu lagi ya tidak perlu lagi rekomendasi teknis.

Saya yakin Pak Menteri tidak mengetahui detil undang apa Permen ini. Dengan adanya dua pola dinilai menjadi dualisme ini yang tidak benar. Kewenangan kok dikasih orang lain. Saya beberapa kali saya bilang ke Sekjen tolong bantu saya, tolong bantu saya, setiap Kementerian Pertanian mengeluarkan Permen bagikan ke kami jadi kami mengerti dan paham. Jadi percuma tadi saya ngomong masalah BPDPKS dari awal ya. Ini jangan seperti yang sana itu Januari, Februari, Maret mengeluarkan 12 Peraturan Menteri. Hari ini keluar, besok keluar lagi dengan yang beda. Saya bilang di sana kan orang pintar semua di sana itu ya.

Bayangkan coba 12 Peraturan Menteri. Hari ini subsidi Rp4.000,- minyak goreng besok cabut karena belum ada persetujuan Menteri Keuangan. Besok keluar lagi, besok cabut lagi. Jadi gimana kok peraturan dibuat seperti mainan. Ini loh saya ini bingung juga ini kewenangannya secara teknis kok dilimpahkan ke BPDPKS. Jadi gimana caranya ini berarti Dirjen BUN nanti keluar dari dewan pengawas atau dewan pengarah di situ ya. Kemudian terjadi banjir nih di Cilacap, di Banyumas, Purworejo apa yang sudah dilakukan. Ini tugasnya TP apa PSP nih. Apa yang terjadi. Permasalahannya adalah petani ini bingung mau bayar asuransi ke mana, ke dinas, orang dinas ditanya. Mohon maaf saya juga kurang mengerti. Ini hampir semua wilayah, saya tegaskan hampir semua wilayah seperti itu, mau bayar asuransi bagaimana caranya.

Kemudian juga ada saran dari Ombudsman yang harus ditindaklanjuti berapa sebenarnya penetapan beras cadangan beras pemerintah. Ini yang paling penting supaya jelas ya.

Jadi silakan Saudara Menteri untuk menjawab pertanyaan Anggota. Kalau ada yang kurang jelas Eselon I harus membantu menjelaskan secara baik dan benar.

Silakan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati.

Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang sama saya muliakan.

Yang pertama ingin kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas tanggapan, kritikan, pertanyaan dan saran dari 14, 17 Anggota DPR Komisi IV Bapak Suhardi Duka, Bapak Ibnu, Bapak Sutrisno, Bapak Khalid, Andi Akmal, Haerudin Pak Haerudin, Ibu Yessy, Ibu Alien, Ibu Endang, Ibu Luluk, Bapak Slamet, Bapak Muhamad Bijak, dan Bapak Edward dari NTT, Ibu Nuraini kemudian terakhir Ibu Maria, Ibu Kiki.

Saya kira dari 17 yang apa yang telah menyampaikan tanggapan dan beberapa pernyataan yang ada kami anggap sangat berharga untuk kami. Kami coba tindaklanjuti Ketua. Pimpinan sekarang kami balik dari sini akan coba menelaahnya satu per satu untuk seperti apa bisa mengimplementasi dan memasukkan atau merubah berbagai hal yang terkait dengan saran dan kritikan serta masukan yang tadi. Saya yakinkan bahwa masalah kami menyesuaikan seperti apa yang selalu kami lakukan setelah kembali dari pertemuan seperti ini tidak ada yang tersia-siakan dan saya anggap apa yang menjadi masukkan inilah kondisi nyata, kondisi objektif, kondisi normatif yang dihadapi oleh kita hari ini tentang pertanian.

Namun, satu hal yang paling pasti dari data yang kami miliki tentang pangan yang ada, pangan memang harus dilihat dari dua orientasi Bapak. Yang pertama ketersediaan dan produktivitas itu sepenuhnya menjadi tupoksi Kementan. Ketersediaan dan produktivitas tetapi pendekatan pangan yang kedua adalah konsumsi dan stabilisasi harga. Ini tidak di Kementan oleh karena itu memang selama ini karena kami selalu beberapa tahun yang lalu selalu melakukan langkah lebih daripada tupoksi yang ada melakukan pendekatan-pendekatan sehingga *Alhamdulillah* setiap kontraksi terhadap momen-momen *peak season* seperti Ramadhan dan Idul Fitri bisa kita antisipasi seperti apa yang ada.

Oleh karena itu Ketua, saya ingin mengatakan bahwa data yang kami sajikan terhadap sebenarnya 11 komoditi kita tambah minyak goreng karena ini juga menjadi masalah yang ada sekarang. Dua belas komoditi ini

produktivitasnya dan ketersediaannya sangat-sangat tersedia. Kami sudah validasi ini kami sudah faktualisasi walaupun di antaranya ada 4 yang memang ketersediaannya menggunakan subsidi substitusi impor. Jadi tersedia tapi impor antara lain kedelai, antara lain bawang putih, antara lain daging sapi dan gula konsumsi, kira-kira itu yang ada tetapi dari prognosa yang kami miliki sampai Desember juga aman Bapak dan Ramadhan sangat-sangat aman produktivitas.

Nah, Bapak sekalian yang kami hormati.

Oleh karena itu saya kira masalah minyak goreng menjadi pembelajaran untuk kita dan tentu pemerintah walaupun ingin kami katakan minyak goreng yang ada di beberapa negara memang sekarang di Afrika Rp80.000 per kilo Bapak. Ya di Filipina Rp47.000 27 di Malaysia seperti itu Bapak tapi bukan ini yang saya maksud karena bukan tupoksi kita di sana tetapi ini juga harus memang disikapi bahwa kepentingan nasional harus terjaga dan saya sependapat kalau Bulog menjadi penyangga utama dan memang baru bisa berfungsi Bulog kalau bukan, dia bukan menjadi lembaga apa ya apa, ya dia lembaga penyangga lembaga pemerintah lah negara bukan profit center.

Kalau dia *profit center* dia enggak bisa bikin apa-apa lebih kalah lagi dia dengan dengan pengusaha yang lain. Jadi mungkin peranan Bulog dan izin Pak Buwas, dulu Bulog di bawah Kementan dan dia pernah rugi itu ya maafkan saya Yang lain juga di bawah Kementan enggak pernah rugi karena bukan *profit center*. Nah, memang ini yang paling sulit Pak Ketua Pimpinan saya jaga di produksi hulunya tapi hilirnya kita bersoal selalu saja di hilir begitu Bapak dan tentu saja kita enggak biarkan ini sendiri dan bukan melempar-lempar tanggung jawab bukan. Kami akan turun dan izinkan saya Ketua kalau bisa Ramadhan kita turun yuk. Bisa pasti bisa.

Kedelai memang cukup dan mungkin sekali-sekali kita injak juga kakinya itu importir sudah 15 tahun dia mengimpor melulu begitu Pak. Kalau kita lihat di data Pak Ketua semenjak IMF menetapkan itu, maka importasi kita cukup besar Bapak, sangat besar dan tidak ada larangan terbatasnya. Jadi salah satu tadi saya masuk ke Bapak Presiden menyampaikan harus ada Lartas. Nanti kami produksi lagi kedelai besar-besaran dimasukkan impor padahal sulit banget kalau harga kemarin itu kenapa harus impor dan kita tergantung lebih dari 12 tahun impor beras eh impor kedelai karena harga di luar 5.000-an sementara petani kita enggak bisa untung kalau dia di bawah Rp7.000 Bapak karena satu hektarnya hanya bisa mampu kurang lebih 1,5 ton per hektar dan itu hasilnya kurang lebih 13 juta karena harganya kalau dia di bawah Rp7.000 enggak bisa masuk sementara jagung dia tanam satu hektarnya bisa 5 ton paling sedikit dengan harga di atas Rp5.000 juga dia bisa menghasilkan di atas 20 juta. *Cost* produksinya kurang lebih 7 sampai 8 juta maka hasilnya jauh lebih banyak. Enggak ada yang mau tanam kedelai dan kalau kita suruh tanam maksimal ini merugikan begitu.

Oleh karena itu barangkali ini juga menjadi *challenge* Pimpinan untuk kita menanam karena harganya sudah bagus Rp10.000 dan kemungkinan

masih akan naik nanti. Kalau 10 ribu ke atas maka harga tempe tahu akan naik dan pengalaman dari kedelai ini ketergantungan Bapak dan saya siap saya sangat siap saya paksa diri dan izin kedelai ini saya akan coba kendalikan dan mohon bantuan Komisi IV yang mana daerah yang mau ditanam kedelai kita masuk Pak, cuma persoalannya memang Pak Ketua mulai dari kemarin kan kita *refocusing*, 14 triliun saya 7 triliun lebih dikasih hilang untuk menjaga republik besar begini. Sementara ekspor saya untuk ekspor saja kan 648 triliun Pak, total-total dari seluruh produktivitas di atas 2.100 triliun. Nah, kita cuma 14 triliun mau bikin apa. Kemarin 400.000 hektar diturunkan menjadi 200.000 hektar karena *refocusing*, sekarang tinggal 57.000 karena itulah anggaran yang tersedia. Jadi enggak mungkin dengan anggaran yang ada dalam APBN.

Tadi Bapak izin saya lapor saya sudah laporkan ke Presiden bahwa kita harus masuk Pak. Ini saatnya petani kita harus dibeli Rp10.000,- jangan Rp9.000 ,- kalau Rp9.000,- masih bisa tidak bisa beralih dia akan ke jagung dan kita harus paksakan tanam 400.000 minimum. Untuk tahun ini 400.000 tahun depan kami akan tanam 1 juta hektar. Harus karena kita makan tempunya kurang lebih 3 juta ton. Kalau masih ada barangnya enggak apa-apa kalau besok semuanya tertahan karena mereka juga sekarang menahan impornya, ekspornya keluar karena mereka juga terganggu dengan *climate change* yang ada oleh karena itu kita harus tanam Ketua. Saya minta izin untuk itu.

Memang sekarang persoalannya di mana uangnya karena rakyat ini harus di stimulan minimal bibitnya dan per hektar bibit minimal 15 50 kilo per hektar seperti itu Ketua. Jadi saya siap kira-kira kita harus ada, izin saya ingin mengundang terbatas Pimpinan untuk bicara sendiri masalah kedelai. Saya masih yakin bisa. Oleh karena itu ada tiga agenda kami menghadapi kedelai ini yang pertama agenda darurat agenda SOS Ramadhan dan Idul Fitri untuk kita jamin. Kalau dia kontraksi sekian belas persen ada ukurannya tidak bisa dibuka di publik maka perlancar distribusi ke pasar itu sudah ada dalam agenda kami.

Kalau kemudian dia di atas sekian belas persen, maka distribusinya itu produksi didekatkan pada konsumen. Ada caranya salah satunya subsidi transportasi Bapak itu di Kementan Pak. Yang kemarin fungsinya Badan Ketahanan Pangan yang sekarang dananya semua lagi dibintangin. Padahal, menurut saya Badan Pangan Nasional itu *steering committee* operatornya tetap Bulog dan operatornya tetap Kementan dan BPN. Jangan rancu-rancu lagi. Kalau rancu ini barang mendesak di depan mata Bapak, nanti tunjuk-tunjukkan lagi. Toko Tani Indonesia yang ada di semua Kabupaten itu hilirisasi harus stabilisasi produksi pangan kita. Sekarang anggarannya dibintangin lagi di situ jadi ini menjadi masalah di kami. Mohon maaf Ketua tidak juga saya jago banget menghadapi semua ini. Maafkan aku butuh memang kita sama-sama menghadapi ini dan saya kerja, saya siap kerja habis-habisan di lapangan saya siap Bapak. Kita punya negara cukup bagus.

Yang kedua memang saya berharap dengan 7 700 hektar sampai 1 juta hektar itu hasil kita baru 1,5, kita imporkan hampir 6 juta kedelai dan

orang-orang yang harus didahulukan adalah Jawa karena sudah terbiasa dengan kedelai cuma harganya harus kita beli di atas Rp10.000,- Kalau begitu kalau Gapoktan atau kelompok tani tahu tempe mau beli Rp9.000,- harus ada subsidi Rp1.000,- lagi enggak apa-apa untuk rakyat, kami setuju Pak. Masukan kesimpulan ini Ketua nanti saya coba. Enggak kalau kita terus begini kita tergantung Bapak, kita tergantung dan siapa yang melaksanakan, Bulog. Bulog dikasih uang per kilo Rp10.000 dia harus jual ke rakyat Rp9.000,- enggak apa-apa, jadi memang Bulog enggak bisa untung tapi kalau pakai dana bank dengan bunga komersil enggak bisa masuk itu enggak mungkin.

Saya setuju itu Pak dimasukkan saja nanti saya berjuang kita nanti dengan Pak Buwas tentu mohon izin Ketua sekali-sekali kita menghadap Presiden sama-sama lah. Minta maaf kalau saya keluar dari konteks karena saya kira ini barang harus kita selesaikan tidak boleh hanya bicara lagi terus sebentar *refocusing* turun lagi dengan 400, turun 200 turun tinggal 57 ini main-main kita sebenarnya dan sebenarnya tapi mohon maaf 14 triliun sukses kali saya bisa, untung ada KUR saya bisa main-main Bapak. Bapak sekalian yang sama saya hormati itu jawaban saya secara umum.

Kemudian yang kedua masalah pupuk Bapak. Aku juga bingung karena di Panja menetapkan hanya 2 NPK dengan urea, bukan saya. Kenapa Panja tetapkan begitu sekarang Panja tanya lagi sama saya, yang mana yang harus saya ikuti nih Ketua itu. Yang kedua, jadi kalau kita mau ulang lagi nih Panjanya gimana ini kan hasil Panja. Jadi kalau ditanya lagi pusing saya gimana caranya. Kita kembali, nah kalau begitu kita cari solusi saja. Saya berharap di kesimpulan yang ada dari Panja yang hanya 2 kemudian 60 komoditas ditetapkan hanya 9 komoditas itu hasil Panja, hasil Ombudsman, hasil KPK Bapak, bukan kami itu yang ditetapkan menjadi penjabaran dari Pupuk Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang pupuk non..

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya interupsi Ketua.

MENTERI PERTANIAN RI:

Saya selesaikan dulu Pak.

Pupuk non subsidi itu tetap dibuat non organik.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Sutrisno mic-nya matikan dulu. Mic-nya matikan dulu Pak Sutrisno.

MENTERI PERTANIAN RI:

Pupuk organik kita tetap butuh. Saran saya kita masukkan dalam kesimpulan saya akan coba berjuang lagi kepada Bapak Presiden bersama Komisi IV dibelikan tetap bukan subsidi tapi KUR subsidi, KUR-nya yang

disubsidi kepada penggunaan itu. Kenapa, alasan saya sebenarnya pertanian itu berskala ekonomi Bapak. Kalau dia pakai pupuk hasilnya di atas 5 ton maka kurang lebih harganya di atas 20 ton 20 juta per hektar dikurangi cost produksi kurang lebih 10 masih ada. Kalau dia pakai 10 juta itu beli pupuk non subsidi tidak disubsidi saja sudah menguntungkan sampai 10 juta kira-kira begitu. Oleh karena itu 10 juta itu kan cost produksi yang ada itu paling yang normatif itu 6-7 juta. Kemudian ditambah dengan space-nya 2 juta dengan segala macam kepentingan-kepentingan sebenarnya berskala ekonomi oke.

Nah, sekarang bagi mereka yang tidak bisa masuk dalam subsidi yang kita tetapkan karena skalanya kita mau naikkan dari hanya 8 juta penerima menjadi 10 juta lebih. Bahkan, kita berharap bisa sampai 11 sampai 12 juta itu tetap subsidi, penerimanya lebih banyak itu, itu arahan Panja kemarin Pak yang saya terima Bapak, arahan Panja lebih banyak yang dapat yang non subsidi jalan keluarnya adalah menggunakan KUR subsidi bukan KUR biasa. Nah, ini yang sementara kalau ini masuk dalam kami coba maju lagi untuk menjelaskan kepada perbankan khusus itu karena KUR ini kita harus, saya sependapat dengan pendapat tadi Pak Ibnu bahwa kita butuh memang.. Pupuk harus Bapak kalau enggak produktif bersoal apalagi dalam kondisi cuaca yang seperti ini nutrisinya harus cukup.

Yang kedua, yang ketiga memang pupuk organik menurut kami ini harus sudah mulai diedukasi rakyat sendiri yang buat. Oleh karena itu pelatihan-pelatihan terhadap KUR ini dan fasilitasi KUR ini harus dilakukan karena dia jangan tergantung terus dengan hanya dengan subsidi. Dia bisa membuat KUR sendiri dengan itu pupuk organik dengan itu Bapak.

Itu yang BPDPKS terhadap ini Bapak. Ini yang saya katakan termasuk SK yang terakhir edaran Mentan terakhir itu memang agak berat semua kalau keuangannya ada di Kementerian Keuangan saya lihat kami harus menyelesaikan jujur saya sampaikan seperti itu oleh karena itu mungkin dimasukkan saja catatan Pak. Kami mendapatkan biasanya kalau ada catatan seperti itu saya meneruskan by surat kepada Menko bahwa ini semua pengumuman ini melalui Pak Menko dan penanganannya langsung di Menko ya begitu ya oleh karena itu memang agak berat termasuk tadi kemarin itu cuma saya Pak yang belum mengeluarkan sampai berbulan-bulan itu dan saya dapat teguran dalam Ratas terbatas bahwa kenapa tidak diserahkan seperti itu. Sama dengan waktu penetapan pengalihan dana yang ada itu yang komplain saya Bapak, itu dana *replanting* enggak boleh dipakai begitu. Akan disesuaikan dengan APBN yang ada untuk sementara karena dana yang tersedia itu dulu itu dulu yang digunakan kira-kira begitulah. Semua ini dengar waktu rapat terbatas Bapak jadi memang ini tentu ini *policy-policy* yang harus kita bisa menyesuaikan.

Saya kira untuk untuk secara umum itu dan yang lain kami akan jawab secara tertulis Pimpinan.

Dan saya kira yang terakhir yang terkait dengan kelapa tadi. Saya pendapat Bapak dimasukkan kita enggak usah dengan sawit, kelapa dengan industri primer saja Pak. Jadi ada percontohan semua *basic-basic* kelapa kita

termasuk di Maluku Utara kita kasih saja penggorengan, tungku dan kan satu kelapa kan satu liter minyak goreng itu hanya butuh 10, 10 buah 10 biji di 7-10 Bapak itu di Litbang saya baca tadi soalnya itu dan kalau begitu tinggal kita buat sekian ribu kelompok yang ada disubsidi dengan itu dengan secara cepat bila perlu melakukan dulu *replanting* dan lain-lain yang ada saja pada laman tertentu untuk bisa membuat minyak goreng dan saya berharap Ramadhan kalau bisa Ramadhan kemungkinan, kemungkinan Ramadhan saya ingin bicara secara khusus dengan Pimpinan melakukan *spillway* kalau ada untuk penyikapan sementara karena saya yakin menurut saya dengan kontraksi yang ada minyak ini masih terus bersoal ke depan Bapak. Jadi mungkin ada yang langkah-langkah yang seperti itu dengan biaya yang tertentu kita selebihnya di tentu dibantu dengan KUR. Ini masih perlu kita bicarakan tetapi saya pikir kalau ini menjadi bagian kenapa kalau Pimpinan tadi yang menyinggung ini masalah kelapa kemudian kita sudah coba jabarkan tadi bahwa kemungkinan bisa jalan keluarnya dengan kelapa yang sudah ada.

Sebelum terakhir Pak saya ingin petunjuk untuk provinsi dari kalau kontraksi yang ada dari dinamika Horti cabai dari peta yang ada boleh coba cabai, cabai ya Pak Dirjen ya cabai. Saya izin kalau cabai dan ayam yang pakai panah-panah distribusi Pak. Jadi kalau misalnya ini cabai rawit ber daerah merah ini bersoal Bapak defisit, ada daerah surplus hijau, daerah yang waspada atau biasa ada ini maka tentu saja pengalihannya dari kita sudah tentukan daerahnya Pak dan untuk menyikapi khususnya Ramadhan yang ada.

Next. Ini daerah ini merah Pak dari daerah yang surplus hijau ke daerah merah akan kita lakukan begini dan kita kendalikan secara ketat untuk bisa. Nah, pola-pola ini yang akan kami coba mainkan khususnya dalam menghadapi Ramadhan sebentar sehingga pergeseran cabai dan lain-lain bisa kita lakukan. Memang saya berharap dengan segala wibawa yang kita miliki Bapak saya berharap mengontrol kedelai ini yang paling utama karena ini yang paling dulu bersoal oleh karena itu mudah-mudahan Ramadhan ini kita bisa lakukan.

Kalau sapi kami sudah cek mulai dari Aceh Pak sampai Maluku. Jadi memang kalau kita potong semua sesuai kebutuhan masih ada Pak sampai Januari atau dua kali Ramadhan masih ada tapi habis. Oleh karena itu sesudah kita potong Bapak untuk persiapan kebutuhan yang ada harus segera kita importasi untuk memasukkan lagi sapi minimal untuk menghadirkan kembali indukan yang ada tapi ini membutuhkan konsepsi yang tersedia tetapi untuk Ramadhan sampai satu tahun ini lebih khusus kepada baik *live stock* maupun sapi daging bekunya kami sudah kontrol sampai faktualisasi lapangan semua masih siap Bapak. Ya masalah ayam juga siap masalah telur juga hampir semua siap seperti ini daging sapi.

Boleh ayamnya. Ini telur ayam Bapak hampir semua aman kalau telur ayam. Daging ayam, daging ayam ya daging ayam, telur ini telur itu daging ayam ini, telur ayam ada di sedikit masalah di Kalimantan Utara dan

beberapa tempat di ya tinggal ini Pak. Mohon kami kita kontrol sama-sama dan coba menyesuaikan.

Pimpinan dan Bapak sekalian

Saya berharap komunikasi yang terbuka khususnya menghadapi Ramadhan Pimpinan untuk dapatkan petunjuk saya harus bergerak seperti apa. Intinya saya siap Pak bersama Komisi IV dan kita tidak boleh kayak minyak goreng Pak. Saya tidak mau kita saling menunjuk yang mana ya, kita sama-sama saja Pak Khalid semuanya di mana daerah

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi sedikit Pimpinan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Saya kembalikan Pimpinan, kurang lebih saya siap mendapat petunjuk.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tunggu, tunggu dulu. Saya perpanjang dulu ya satu jam ya.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Silakan Pak Suhardi Duka.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Bukan yang interupsi duluan Ketua.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Oh kalau duluan di sana, silakan saya mengalah.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bapak ini sudah jarang datang, mau ngomong banyak pula.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Baik Pak yang ingin saya sedikit tanggapan dari Pak Menteri mengenai masalah Permen Nomor 1 itu karena kalau ini tidak diawasi sedikit saya melihat disparitas itu akan terjadi di setiap provinsi namanya pembelian karena pengusahanya kuat.

Yang kedua terhadap pupuk organik. Saya kira kita semua sepakat bahwa ini penting. Kita semua setuju bahwa pupuk organik itu pentingnya organik yang benar karena banyak juga organik-organik yang abal-abal hanya memang Panja kemarin memang sulit karena memang kita hanya mendapatkan subsidi hanya 25 triliun, tidak sekiranya sampai dengan 30-40 triliun saya kira bisa kita akomodasi semua jenis pupuk itu untuk masuk di area biaya subsidi. Begitu juga tanaman dari 60 kemudian turun 19 menjadi 9 saya kira ini juga menjadi sulit bagi kita walaupun hampir semua tanaman butuh pupuk butuh subsidi tapi karena kondisinya seperti itu ya apa boleh buat. Itulah yang menyebabkan sehingga terjadi seperti itu di Panja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Satu menit Pak Ibnu.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Enggak ada Ketua saya juga, terima kasih.

Pak Menteri, Pimpinan rapat ini saya kira kan rapat kerja dengan apapun yang diputuskan di dalam rapat kerja itu mengikat karena Pak Menteri ini hadir karena atas nama Presiden juga untuk itu di dalam Pasal 255 dan 270 Tatib itu bahwa rapat kerja ini bisa memutuskan sesuatu termasuk kesimpulan yang akan diminta oleh Pak Menteri.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi sedikit saja, izin menanggapi dari penyampaian dari Pak Menteri. Luar biasa terima kasih stok dijamin cukup hanya ada sisi yang harus kita perhatikan Pak Menteri tidak hanya faktor kecukupan dari rakyat tapi ada rakyat kita yang berprofesi sebagai petani dalam kondisi kerugian. Ini yang harus menjadi catatan kita. Peternak kita rugi, petani kita dalam kondisi rugi. Jadi pemerintah harus hadir di tengah-tengah bahwa rakyat sebagai petani harus terjamin keuntungannya, rakyat sebagai konsumen juga harus terpenuhi.

Saya menarik yang kedua Pak Ketua terkait dengan penjelasan Pak Menteri dengan kedelai ya dengan semangat yang luar biasa juga apresiasi tinggal begini saya mohon kalau memungkinkan dimasukkan kita ingin mendapatkan *grand design* dari Kementan tahun depan mau kayak apa

seperti apa. Kalau alasannya anggaran kita sepakati 2023 kita sisir anggaran yang tidak penting kita alokasikan ke sini tapi kita ingin mendapatkan *grand design* karena masalah kedelai ini tahun kemarin jawabannya juga seperti ini Pak Ketua, sekarang juga seperti ini.

Nah, kita ingin *grand design*nya kayak apa. Di tahun *action*-nya kayak apa tinggal nanti kemudian kita akan support kalau memang anggarannya hanya segitu-segitunya kan kita pasti punya skala prioritas sehingga ini menjadi perhatian saya karena kita ingat nih tahun kemarin Pak Menteri datang ke pengusaha tahu bukan datang ke petani kedelai kan begitu. Padahal, kalau kewenangannya harusnya datang ke kementerian, nah dengan penjelasan tadi yang luar biasa kita ingin mendapatkan grand strategi apa untuk kemudian kejadian kedelai tahun ini tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan Komisi IV pasti akan support.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Ketua, Ketua enggak lebih dari tiga menit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Satu menit boleh.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Boleh.

Jadi saya langsung saja Pak Menteri. Memang semangat Pak Menteri saya sangat senang sekali. Kalau memang begitu adanya kita pastikan bersama dalam Raker ini untuk mengikat kegiatan anggaran untuk 2023 nanti yang akan kita susun karena setahu saya penjelasan yang sudah disampaikan ke kami, kami juga pernah melakukan rapat bersama dengan pengusaha tani, pengusaha tempe dan juga tahu dan kita juga pernah rapat bersama dengan petani kedelai dan mudah-mudahan, mudah-mudahan Pak Menteri apa yang menjadi targetnya Pak Menteri itu bisa tercapai. Kenapa tahun kemarin saya tekan-tekan ini Pak Menteri bisa enggak bisa enggak karena kita tahu masalahnya apa yang terjadi di petani kedelai. Kalau memang ada desain yang baik kita juga harus memikirkan hilirnya seperti apa yaitu jaminan harga. Kalau memang tadi sudah harus dikerjasamakan untuk ada subsidi dari pemerintah melalui Bulog ayo kita sama-sama karena ini menjadi permasalahan yang tahun ke tahun, tahun ke tahun dan kami punya data semuanya. Pak Ketua juga punya data karena saya tadi lihat Pak Ketua punya data.

Ini besar sekali Pak, untuk impornya ini juga besar. Siapa yang mengawasi impor kedelai ini setiap tahun. Bulog enggak dilibatkan untuk

mengimpor. Kalau Bulog yang impor kan kita tahu pengawasannya seperti apa, ini liar Pak, ini liar dan ini sudah menjadi ketergantungan yang luar biasa. Enggak ada, enggak ada daging, enggak ada ikan, enggak ada ayam, tahu tempe bisa menghidupkan rakyat Indonesia. Ini harus menjadi perhatian yang lebih dan kalau memang seperti itu saya rasa Komisi IV dan pemerintah juga pasti mau bekerjasama dan untuk membuktikan itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup Mbak Alien?

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Ya cukup Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Satu tadi pertanyaan yang jawabannya menggelitik mengenai BPDPKS. Kewenangan kita kok kita kasih orang lain. Coba saya enggak mengerti ini yang membuat Permen ini siapa. Kewenangan kita loh perkebunan itu harus mempunyai *legacy* karena yang nama sawit rakyat itu ada di Dirjen Perkebunan bukan di Menteri Keuangan, bukan di BPDPKS, bukan dewan pengarah. Ini loh yang terjadi, masa kita punya kewenangan kita kasih orang lain. Saya minta kalau perlu segera dicabut ini ya. Saya tidak mau, karena apa, ini kan uang rakyat. Jadi kalau bicara banyak yang ngomong itu orang banyak yang sok pinter kalau ngomong itu yang ekspor kan pengusaha bukannya petani. Hei 40% petani sawit itu ada di Indonesia berarti dia pun mempunyai hak 40% CPO yang diekspor. Apa CPO-nya ada KTP-nya, ada identitasnya ini milik pengusaha A, milik B ini punya petani tidak ada. Jadi ini alangkah orang kewenangan kita, kita kasih orang lain. Saya minta segera ini dicabut, masukan kesimpulan rapat, itu yang pertama.

Yang kedua, Suwandi saya tanya, tadi kalau Pak Slamet bicara 2023 saya bicara yang hari ini. Berapa target tanam kedelai?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (SUWANDI):

Izin Pak.

Dari APBN 52.000 hektar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (SUWANDI):

Dari Program KUR kita kejar 600.000 hektar.

Izin Pak Menteri.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bibitnya dari mana?

DIRJEN TANAMAN PANGAN (SUWANDI):

Bibit *existing* dari pertanaman *standing crop* sekarang.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tidak bisa. Anda jangan bohongi saya. *Existing* tidak bakal bisa mencukupi 30 juta kilo yah. Anda sudah keliling-keliling nih yah. Saya tegaskan di sini, saya ini bukan sebodoh yang Anda pikir saya ini bodoh. Anda sudah keliling-keliling siapa yang bisa impor bibit dari Brazil bibit kedelai. Tidak mungkin 30 juta kilo atau 30 ribu ton. Jadi Anda jangan bilang keliling sudahlah. Mereka kan bilang memang Indonesia butuh bibit, bibitnya dari mana? Brazil. Lama perjalanan 40 hari Brazil-Indonesia bibit itu. Selama perjalanan siapa yang mengurus merawatnya? Jadi ini, ini, ini omong kosong Pak Suwandi. Sudahlah sudah cukup. Saya katakan ini omong kosong. Tadi Pak Menteri mengatakan panen 1 hektar 1 ton setengah tapi Anda tulis di sini 1,7 kenapa enggak, enggak tulis 17 ton sekalian satu hektar sama tanahnya, sama traktornya, sama yang petaninya sekalian timbang. Iya 30 juta kilo loh bibitnya ini yang cocok cuman dari Brazil sudahlah sudahi sudahi cukup ya.

Kemudian masalah jagung. Kalau jagung ini surplus ya, tuh tanya tuh Dirjen PKH tuh. Satu tahun berapa impor gandum untuk pakan? 3 juta ton atau 5 juta ton? Tolong dijawab.

DIRJEN PKH (NASRULLOH):

Spesifik pakan tidak ada kami keluarkan rekomendasi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya paham tapi Anda enggak bisa menghitung?

DIRJEN PKH (NASRULLOH):

Ya Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak bisa menghitung?

DIRJEN PKH (NASRULLOH):

Belum.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Belum bisa?

DIRJEN PKH (NASRULLOH):

Estimasi saja sekitar 2 juta Pak kemungkinan tapi data..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jangan bilang kemungkinan. Jangan bilang kemungkinan. Harus *fix* kalau ngomong. Kasihan Pak Menteri sudah kerja capek, kasihan Presiden Republik Indonesia keliling pagi siang malam yah begitu loh. Harga bisa Rp8.500,- sampai Rp9.000,-, bisa 1,7 juta 1,7 ton per hektar tanya di lapangan bisa 1 ton saja sudah bagus. Ini saya bicara kenyataan. Saya bukan ahli pertanian tapi saya selalu keliling bertanya karena saya orang bodoh. Kalau sudah bodoh tidak bertanya cuma ngomong ya matilah. Saya bertanya yang nama Fakultas Pertanian saya bertanya di Lampung. Saya tanya sama IPB berapa sih yah.

Kemudian lagi ya kedelai impor kan kita semua tahu. Ini kan banyak orang yang pintar ngomong subsidi saja kedelai, ya pemerintah turun. Yang mau disubsidi siapa, importirnya? Pengrajin tahu tempennya? Saya bicara impor kedelai dulu ya. Siapa yang mau di subsidi, pengrajin tahu tempe yang jumlahnya 100 ribu lebih. Bagaimana caranya kecuali ya Bulog ditugaskan oleh pemerintah untuk menyerap hasil produksi kedelai. Berapa biaya produksi Rp7.000,- oke berarti petani paling tidak harus menjual ke Bulog Rp8.000,- nanti tinggal itung-itungan dengan Kementerian Keuangan berapa yang disubsidi untuk kedelai, satu tangan.

Kalau di duit sekian triliun dikasih ke pengusaha importir *wassalam* Sekjen tahu enggak berapa impor kedelai satu pengusaha jumlahnya tahu?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (KASDI AKBAR):

Kalau total Bapak sama dengan kebutuhan lain itu sekitar 6 sampai 7 juta ton.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kedelai segar?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (KASDI AKBAR):

Kenapa?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kedelai segar untuk tahu tempe?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (KASDI AKBAR):

Untuk konsumsi 2,5 juta ton Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Anda tahu dari mana 2,5? Kebutuhan untuk kedelai segar 2,9 Pak Buwas pasti tahu ya. Satu pengusaha menguasai 2 juta ton impor, tanya Pak Buwas tuh. Ya saya kan kalau ngomong kan bukan asal saja saya punya data maka saya bisa ngomong itu saja.

Jagung, jagung kan mahal sekali dan jagung ini akan lebih mahal lagi karena apa, impor gandum terhalang, impor terbesar dari Rusia Ukraina sebagian dari Turki itu saja.

Terus satu lagi, harusnya karantina nih kencang sekali nih. Kenapa saya katakan kencang, impor gandum *food* and *feed* itu beda. Kalau *food* tidak kena 5% tapi kalau *feed* wajib 5%. Siapa yang ngawasin, enggak ada yang ngawasin bos 5% bos. Kali saja 5 juta 3 juta lah 3 juta ton sudah berapa duitnya.

Begitu juga dengan BPDPKS 110 triliun untuk B-20. Satu pengusaha mendapatkan nilai yang sangat fantastis 39 triliun satu pengusaha. Sekarang kita bertanya, eh berapa yang, berapa juta kilo ton Bio B-20 yang kamu buat satu kilonya berapa. Ini kan seolah-olah gelap gulita. Inilah yang saya agak bingung kenapa kedelai kok impor seenak-enaknya saja. Tadi Pak Menteri mengatakan daging sapi cukup untuk lebaran, ya kalau cukup nanti rekomendasikan kita Pak di kesimpulan rapat Bulog juga tidak boleh impor daging kebo, kita mau tahu cukup enggak. Kalau cukup ya kan. Periode yang lalu periode yang 2009-2010 ada Pak Ibnu Multazam Pimpinan saya dulu itu ada sensus sapi. Sapi disensus itu dia Pimpinannya yang duduk di sini tuh dia beliau itu. Sensus sapi hari ini ada di desa dusun ini 200 ekor, besok pindah lagi ke dusun lain itu dicatat semua itu. Jadi populasinya tuh wah banget. Karena apa, kita tidak punya data yang jelas, data yang valid.

Kalau masalah beras saya memuji setinggi langit bahwa Kementan sangat hebat, kalau masalah beras. Berapa yang lalu masih ada impor. Ini kan ada juga akal-akalan ini. Impor beras khusus sampai 400 ribu ton jam ini kan ketahuan yang di sana yang main situ. Datanya saya punya PT-nya pun saya punya, ngakunya selalu beras khusus, seberapa banyak sih orang makan japonica Beras Jepang, Beras India ya kan. Ini kita jadikan pelajaran semua lho zaman dulu setiap importir beras ketan wajib menyerap ketan lokal bekerjasama dengan Gapoktan wilayah paling besar Jawa Timur tapi *Alhamdulillah* cuma surat to' yang keluar, surat keluar mereka enggak beli inilah rekom untuk dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Apapun peraturan yang kita buat pasti ada juga yang mengakal-ngakali Pak Menteri. Saya enggak mau itu jadi seperti itu.

Seperti kemarin yang rapat gabungan ya toh, rapat gabungan saya bilang tidak ada pertanyaan untuk Menteri Pertanian. Menteri Pertanian

hanya hulu, hilirnya urusan sana. Padahal, sudah diperingatkan kalau sampai ketiga kali tidak datang panggil paksa. Tadi saya dengar PKB sudah bikin Pansus, PKS Pansus, mungkin Ibu Kiki juga ikut Pansus juga nanti untuk minyak goreng. Demokrat juga Pansus, Nasdem Pansus ya kita jadikan Pansus supaya terang benderang. Kita bukan bicara, oh kamu salah, kamu salah, kamu salah. Orang Menteri kok ngomongnya melenceng-melenceng. Harga kedelai naik karena babi di Cina makannya kedelai, wah beda lagi dengan Dirjen Dalam Negeri Perdagangan Dalam Negeri ngomongnya. Kami tidak bisa mengatur harga kedelai karena impor. Loh saya punya catatan detil mengenai perkataannya itu, ya kan.

Dipanggil pertama kali enggak dateng keliling Makassar. Kata Pak Rusdi Masse lagi ngopi. Wah enak sekali. Satu bulan keliling berapa puluh miliar *book* sewa pesawatnya itu. Hasilnya ada? Kagak ada bos, ini loh enggak ada hasilnya. Kenapa enggak dari awal subsidi saja kan selesai enggak ribut. Kalau dibilang harga bebas, pasar bebas ya enggak usah ada Menteri Perdagangan. Saya Pak Menteri mau beli minyak mau bagikan ke rakyat, saya telepon ke pabrik, pabriknya bilang apa, "Mohon maaf Bos", begitu "saya enggak bisa jual", kenapa, "di pabrik saya ada Satgas Pangan, ada Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian ditungguin". Terus kalau saya mau beli minyak goreng siapa, melalui Dinas Perdagangan. Logikanya di mana. Saya belilah 2.000 kilo enggak bisa, cuma 500 kilo bolehnya tapi saya bilang boleh enggak boleh gue harus beli. Saya buat surat pernyataan bahwa ini bukan untuk diperjualbelikan tapi dibagikan kepada rakyat saya. Maka saya bingung kok jadinya begini.

Ya Pak Menteri ini kita berbagi pencerahan. Saya juga ingatkan jangan ada data-data yang bohong ya. Saya ini memang saya sudah tunggu sudah sebulan lalu ini datanya. Ya kalau masalah yang tadi BPDPKS saya minta segera dicabutlah karena kewenangan, kewenangan kementerian harus tambah, bukan tambah berkurang terutama wilayah-wilayah di luar Jawa yang banyak ini kebun sawit. Paling tidak kan Dirjen Perkebunan merekomendasikan jalan 100 kilo di berapa provinsi diperbaiki untuk keluar TBS (Tandan Buah Segar) paling enggak kan enggak ada. Ini sudah enggak ada wewenang mau apa.

Selanjutnya tadi ada pertanyaan kepada Pak Buwas kepada ID Food kepada Pupuk Indonesia. Silakan siapa, Pak Buwas duluan.

DIRUT PERUM BULOG (BUDI WASESO):

Terima kasih Pak Ketua, seluruh Anggota dan Pak Menteri Pertanian dan seluruh staf.

Yang pertama kami ingin menjawab permasalahan tadi pembangunan gudang untuk di Mamuju Pak. Ini juga sudah ada sebenarnya sudah ada suratnya Pak dari Bupati kepada kami Pak. Namun demikian, Bapak/Ibu sekalian perlu kami jelaskan bahwa Bulog sampai hari ini Pak punya kemampuan gudang itu Pak untuk 3,7 juta ton Pak untuk seluruh Indonesia. Namun, hari ini kita juga belum ada kepastian Pak berapa sih yang harus kita

siapkan untuk CBP, berapa banyak Pak karena yang dengan peraturan yang lama, yaitu Keputusan Menteri Pertanian 2018 kita hanya 1 sampai 1,5 juta ton Pak untuk CBP. Jadi otomatis Pak gudang kita ini banyak yang kosong sedangkan itu juga menyangkut *cost* perawatan dan penggunaan gudang itu Pak sendiri. Ini juga kita sedang berhitung ulang Pak. Namun, kalau ada wilayah-wilayah yang memang mendesak nanti Pak produksi berasnya seperti kami lihat di Merauke Pak itu produksinya berasnya banyak Pak tapi daya tampung kita memang kecil. Itu mungkin menjadi prioritas saat ini Pak tapi bukan berarti daerah Mamuju tidak menjadi prioritas kita Pak, sedang kita telusuri Pak kita pelajari berapa banyak sih yang harus kita tampung di sana bisa pasti Pak dan itu akan kita tindaklanjuti nanti Pak.

Kemudian mengenai kesiapan kita Pak, ini perlu saya sampaikan kesiapan kita untuk mendukung untuk puasa dan lebaran ini Pak. Tentunya kami juga sudah menyiapkan tapi Pak sekali lagi ini dengan jalur komersial Bulog karena sampai saat ini kita belum ada penugasan Pak. Jadi bukan berarti kita harus menunggu juga penugasan karena saya kira ini sudah otomatis tanggung jawab Bulog untuk stabilisasi dan ketersediaannya di seluruh Indonesia.

Terhadap minyak goreng sebenarnya dari awal kita sudah siap Pak sebenarnya hanya ada perubahan peraturan menteri itu yang akhirnya Pak kita tidak bisa lagi menjual minyak goreng itu atas Rp14.000,- karena itu sudah diatur dalam Permendag yang baru sehingga sebenarnya Bulog menyiapkan stok dengan sekian banyak Pak itu akan jadi permasalahan Pak yang selama ini. Yang pertama adalah kita tidak bisa membeli lagi Pak dari produsen seperti tadi Pak Ketua sampaikan Pak itu sama dengan kita alami Pak karena sudah ada pembatasan-pembatasan. Padahal, kita untuk stok dan untuk operasi pasar.

Nah, yang kedua dengan kita kemarin membeli yang awal Pak kita membeli dengan harga Rp16.000,- untuk harga dasar Pak, kita sekarang tidak bisa menjual lebih dari itu Pak sehingga kita harus menjualnya adalah Rp14.000,- sedangkan selisihnya Rp2.000,- ini juga menjadi permasalahan di Bulog karena ini akan jadi beban kerugian Bulog karena sekali lagi kita ini mendanainya dengan tadi Pak dengan pinjaman komersial Pak sehingga harus menjadi perhitungan kita.

Untuk kebutuhan yang lain tadi seperti Pak Ketua sampaikan bahwa masalah untuk daging ayam kita juga siap Pak, untuk telur sudah siap Pak untuk seluruh wilayah Indonesia ini memang sudah kita kerja sama Pak dengan para produsen-produsen khususnya dari petani atau peternak mandiri Pak yang kita, kita tampung jadi kita tidak bisa lagi ke pengusaha-pengusaha yang besar Pak tapi ini petani-petani atau peternak mandiri yang kita mobilisasi kita rekrut untuk kita tampung Pak produksinya. Jadi siap Pak untuk daging ayam telur segala macam kita sudah siap Pak.

Kemudian juga Pak untuk daging Pak. Daging kerbau memang kita mendapatkan penugasan Pak yang dari Rakortas bahwa Bulog ditugaskan untuk impor daging kerbau dari India itu sejumlah 100 ribu ton. Kebutuhan

yang sekarang jadi masalah adalah memang daging sapi Pak bukan daging kerbau Pak. Daging kerbau ini hanya untuk imbalan saja jadi kita juga melihat Pak dari kebutuhannya karena sebenarnya yang dari data yang ada kebutuhan daging sapi ini 500 ribu ton Pak. Sedangkan kita dapat penugasan untuk daging kerbau itu 100 ribu ton jadi kalau plus ditambahkan itu sebenarnya kebutuhannya kurang lebih 600 ribu ton Pak daging secara keseluruhannya.

Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa kami terus terang Pak mengikuti daripada perkembangan pasar Pak. Kami juga Jujur saja tidak akan mematikan produksi dalam negeri karena itu kan komitmen kami Pak, hanya memang nanti kami juga mohon bantuan nih dari Pak Menteri Pertanian karena kami ini sifatnya penugasan Bapak/Ibu sekalian. Jadi kayak kemarin kami mendapatkan tugas awal dari 100 ribu adalah 20 ribu ton karena kecepatan yang harus kita lakukan maka kami segera untuk melakukan pengadaan itu 20 ribu ton. Kami hanya dikasih waktu satu bulan untuk pengadaan itu sedangkan mengurus rekomtek-nya itu memakan waktu dua minggu. Sedangkan produksi di India itu minta waktu 25 hari kalau normal produksi dagingnya karena ini bukan asal-asalan produksi Pak, Bapak/Ibu sekalian dan kita harus menjamin juga kualitas sesuai dengan yang ditentukan.

Nah, jadi saya juga terima kasih karena kemarin setelah kita saya koordinasi dengan Kementerian Pertanian akhirnya rekomtek itu selesai Pak tapi mohon izin untuk ke depan ya kami juga berharap tidak lagi seperti itu lagi terjadi karena di sisi lain ada yang mengajukan rekomtek dalam waktu hitungan satu hari sudah selesai Pak dan diberikan izin satu tahun. Bulog dikasih izin hanya satu bulan, ini kan jadi masalah Pak. Padahal, kita ini penugasan Pak bukan cari untung seperti tadi Pak tadi disampaikan Pak Ketua Bulog tidak kapasitas untuk mencari keuntungan karena kita diaudit Pak oleh BPK. Ini memang seperti ini Pak juga perlu kami sampaikan pada kesempatan ini jadi kemarin dari Ombudsman juga menyampaikan tentang keterlambatan atau penundaan daripada pembayaran, kepastian pembayaran Pak dari disposal beras yang 20 ribu ton. Ini juga akhirnya sampai saat ini juga tidak selesai Pak.

Demikian juga pelaksanaan bantuan beras PPKM yang diperintahkan oleh Presiden untuk wilayah seluruh Indonesia. Kita sudah menyelesaikan Pak 288.000 ton *clear* Pak tidak ada masalah sampai ke Papua juga tidak masalah, hanya yang bermasalah adalah pembayarannya. Jadi sampai saat ini kan menjadi masalah kan pembayaran Pak jadi pembayarannya sampai hari ini juga saya tidak tahu karena surat kami sudah berkali-kali, kami menghadap ke kementerian itu juga sudah berkali-kali, koordinasi berkali-kali tapi berkali-kali tidak ada kepastian nah itu Pak. Ya pada akhirnya kan ini kan masalah berasnya pemerintah Pak jadi kembali lagi tadi. Nah, sampai hari ini Pak kami yakin bahwa untuk beras juga tidak ada masalah Pak karena beras yang ada di Bulog untuk puasa lebaran ini dijamin cukup sangat cukup, hanya ada persoalan perlu kami sampaikan tadi juga saya sampaikan Pak Menteri Pertanian bahwa hari ini ini panen di mana-mana, panen beras. Bulog tidak bisa mengambil karena kita HBB-nya 4.300 untuk gabah kering panen,

sedangkan di lapangan sekarang diambil oleh swasta-swasta banyak itu harganya Rp4.700,- Rp4.800,-. Satu sisi saya bangga karena petani diuntungkan, ini saya senang sekali Pak tapi juga berarti beras ini banyak Pak sekarang diserap oleh swasta-swasta berarti kita tidak ragu lagi kekurangan beras. Persoalannya Pak bilamana nih yang ditentukan nanti CBP oleh Pak Menteri Pertanian katakan 1,5 juta, maka kami pasti tidak bisa menyerap sejumlah itu karena aturan tadi Pak. Jadi tidak mungkin kami serap.

Saya hanya takut Pak mudah-mudahan tidak terjadi bahwa begitu Bulog tidak bisa menyerap CBP, maka kita dipaksa untuk impor mau tidak mau karena ini CBP. Kalau CBP itu kan sudah cadangan pemerintah yang ditentukan oleh negara. Nah, kalau sudah ditukar ini harus impor ini permasalahan baru lagi Pak karena kita akan mematikan petani lagi Pak. Nah, ini menjadi masalah jadi produksi Pak Mentan yang luar biasa ini nanti akan dipatahkan dengan impor Pak. Ini juga bermasalah. Ini lagi sekarang yang sedang saya dengan teman-teman di Bulog kita tetap menyerap Pak tapi tidak bentuk CBP tapi komersial Pak. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini.

Mengenai kedelai Pak, pada prinsipnya kami siap saja Pak tapi kami ini kan berhadapan dengan importir-importir yang kuat yang selama ini sudah mengakar mereka. Jadi seperti kemarin penugasan ya mau enggak mau kita harus beli pada importir kan yang akhirnya ya tujuan kita sasaran kita yang tadinya mau lebih murah jadi enggak bisa juga Pak. Banyak negara-negara lain Pak yang memproduksi kedelai sudah kami jajaki Pak, kurang lebih ada tujuh negara produksi kedelai Pak, yang relatif lebih murah daripada kita impor dari Amerika. Nah, persoalannya kembali lagi Pak ini dibuka enggak, diizinkan enggak kita mengambil dari negara lain selain Amerika. Ini juga kembali lagi nanti dari Kementerian Pertanian tentunya kalau itu ada penugasan ke Bulog.

Ya saya tidak tahu Pak, Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat Permen 48 2016 itu Pajale itu dikendalikan oleh Bulog tapi hari ini karena beras pun kita tidak punya kewenangan hanya karena kita memaksakan diri saja Pak karena tadi mau tidak mau kita harus berpihak kepada petani. Kalau jagung sama kedelai ya kita hanya penugasan Pak. Nah, kemarin juga dari pengrajin tempe tahu juga menanyakan kepada kami Pak, kami bilang tunggu dulu karena kami ini baru penugasan sekarang sudah hitungan-hitungannya belum juga Pak selesai kan. Nah, ini juga ke depan harus kita sikapi bagaimana untuk masalah-masalah ini bisa ditangani dengan Baik Pak.

Saya kira kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah supaya tidak terulang termasuk hal yang lain Pak. Saya tidak akan berbicara yang lain karena memang selama ini kita hanya dalam penugasan-penugasan itu dan pada prinsipnya Pak Bulog siap untuk melakukan stabilisasi dan ketersediaan barang apapun selama itu memang dibutuhkan atau ditugaskan. Namun demikian, kita otomatis Pak sekali lagi Bapak/Ibu sekalian dengan situasi yang sekarang kita melalui komersial kita Pak itu kita sudah menyiapkan terus tadi Pak. Saya kira itu Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan.

*Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih. Kemudian dari ID Food.

Bapak Ferry baru Pak Slamet, biar *clear* dulu sekalian karena ID Food kan cuma menjawab pertanyaan Ibu Maria. Kemudian Pupuk nanti kan cuma singkat baru Pak Slamet.

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA):

Baik terima kasih Pak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan rapat.
Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati.
Bapak Menteri Pertanian, Pak Sekjen dan para jajarannya.
Bapak Dirut Bulog Pak Budi Waseso dan Bapak Dirut PIHC Pak Bakir Pasaman dan Bapak/Ibu semuanya yang hadir.

Seperti permintaan Pak Slamet karena hari ini pertama *officially* saya hadir di sini perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Frans Tambunan baru dapat amanah menjadi Dirut RNI per Senin kemarin.

Jadi ini hari kedua saya mendapat apa menjadi Dirut. Dari catatan kami, saya tadi dapat dua pertanyaan satu dari Bu Luluk dan satu dari Bu Maria. Ya ada tentang migor ada tentang Makmur. Baik saya jawab tentang Makmur dulu jadi Program Makmur ini adalah program pengembangan dari program Pak Bakir Pasaman di PIHC yang dulu namanya Agrosol Pak. Jadi memang *thinker*-nya, pelaksanaannya Pak Bakir namun di akhir tahun lalu Pak Menteri minta RNI sebagai Ketua PMO-nya untuk dilebarkan ke beberapa komoditi seperti padi, jagung, kemudian tebu. Kebetulan kami juga ditugaskan menjadi *off taker* atas ketiga komoditi tersebut jadi itu hubungannya Pak.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi sedikit Pimpinan, sedikit saja sedikit. Boleh enggak Pimpinan sedikit saja?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bu, sampai selesai baru tanya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Eggak mau tanya ini sebelum jadi direktur dia ngapain begitu, jadi kita bisa tahu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Direktur juga ya?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA):

Ya. Jadi baik terima kasih Bu. Sebelumnya saya Direktur Komersial PT RNI juga. Terima kasih.

Nah, Program Makmur ini adalah program *close looks* ada sinergi antara BMN dari hulu ke hilir yang melibatkan masing-masing fungsi BUMN dari hulu ke hilir. Contohnya untuk penyiapan lahan ada di sini teman-teman PIHC juga untuk Agroinput dan pupuknya ada teman-teman PIHC di sana. Kemudian untuk KUR-nya ada ditugaskan BRI dan ada asuransi gagal bayar dan gagal panen. Ini teman kita Askrido dan Jasindo. Kemudian untuk off taker ditugaskan sinergi ada RNI kemudian ada PTPN, Perhutani dan juga di mungkinkan untuk bermitra dengan swasta untuk meng-*off-take*-nya. Itu untuk sekilas tentang Makmur tadi.

Kemudian untuk pertanyaan Bu Maria dan Bu Luluk tentang minyak goreng. Jadi kami jelaskan Bu jadi kami bukan bagian dari mafia atau spekulan yang menyebabkan minyak goreng langka tapi kami menjelaskan bahwa tugas kami sebagaimana waktu itu adalah sejak keluarnya Permendag 06 Tahun 2022 sama-sama kita lihat pasokan itu susah didapatkan. Kemudian kami diminta untuk berkontribusi untuk membantu distribusinya Bu. Jadi kami kalau kita lihat secara garis besarnya produsen minyak goreng ini ada dua, yaitu produsen yang mempunyai jaringan distribusi domestik dan produsen yang memang *totally* sekarang ini mereka hanya ekspor dan tidak membangun jaringannya sama sekali domestik.

Nah, karena adanya kewajiban DMO DPO 20% waktu itu, maka kami diminta Pak Menteri dari Kementerian Perdagangan untuk membantu menyalurkan minyak goreng yang berasal dari produsen yang tidak punya jaringan domestik Pak. Jadi kami mendapat pasokan untuk didistribusikan di daerah *remote* juga yang ditentukan oleh Kemendag.

Jadi Bu Maria mohon maaf jika tadi di Kalimantan Barat belum ada sebenarnya bukan belum ada, belum kesampaian karena terlanjur Permendagnya dicabut, DMO DPO-nya dicabut seperti itu. Jadi kami baru melakukan distribusi ini baru satu bulan Bu. Jadi Kalimantan pun baik Kalimantan Barat, Utara itu ada dalam *plan* distribusi karena adanya perubahan, maka belum kesampaian ke daerah Kalimantan Barat Bu.

Nah, apa yang kami lakukan begitu perubahan dicabut kami tetap nanti menunggu karena sekarang sama-sama kita ketahui kewenangan distribusi

ada di Kemenperin dan di Permenperin Nomor 8 di Ayat 8 distribusi minyak goreng curah yang saat ini satu-satunya minyak goreng dapat HET itu bisa dilakukan distribusinya lewat dua. Pertama lewat distributor swasta lewat pendaftaran juga dimungkinkan penunjukan ke Badan Usaha Milik Negara. Nah, kami selaku Badan Usaha Milik Negara menunggu jika ini sudah fix kami pun siap membantu pemerintah untuk mendistribusikan minyak goreng curah terutama saat ini kondisinya dua minggu menjelang puasa dan saat ini kita lihat disvarietasnya minyak goreng curah dan kemasan cukup tinggi Pak. Kalau tadinya hanya 11-5 ke kemasan Rp14.000,- sekarang Rp14.000,- kemasan itu Rp23.000, jadi disvarietasnya itu ada 40% ini yang harus kita jaga sama-sama.

Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan dari pertanyaan Bu Luluk dan Bu Maria. Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih kepada Dirut ID Food.

Ini saya jelaskan ada DMO ada DPO ya kan, enggak memang ada DMO ada DPO benar cuma nanti kalau ketemu yang di sana itu tanyakan. Eh yang ngawasin siapa Bos, kagak ada yang ngawasin, itu saja. Minyak goreng tiba-tiba bisa sampai ke luar negeri gampang kok penyelundupan. Ini loh ada DMO ada DPO enggak ada yang ngawasin ya percumalah.

Selanjutnya Pupuk silakan.

DIRUT PIHC (BAKIR PASAMAN):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI beserta seluruh Anggota yang kami cintai dan kami banggakan.

Menteri Pertanian RI beserta seluruh jajarannya, rekan-rekan kami Dirut Bulog dan Dirut RNI beserta seluruh undangan.

Pada kesempatan ini kami izinkan kami menjawab beberapa pertanyaan yang tadi diajukan oleh para Anggota Dewan yang terhormat. Terkait dengan pertanyaan tadi ada beberapa pertanyaan saya singkat saja mengenai pupuk organik kenapa serapannya rendah. Ya ini karena sebenarnya memang pupuk organik banyak petani juga membuat pupuk organiknya sendiri, tidak selalu apa namanya mengambil dari ini jadi ada kemampuan daripada para petani untuk membuat pupuk organik. Untuk pupuk organik cair memang kita masih perlu memerlukan sosialisasi ataupun pengenalan mengenai PMC.

Kemudian terkait dengan kapasitas pabrik. Mengenai kapasitas pabrik sebenarnya kemampuan kami adalah 3,5 juta ton tapi karena kondisi bahan baku yang sangat mahal pada saat ini kami terpaksa mengkonversikan pabrik

NPK itu menjadi bahan baku NPK karena kami harus membuat DAP sehingga produksi kami turun menjadi 2,4 sampai 2,6 juta ton itu penjelasannya Bu. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai Agro solution sudah dijawab oleh sahabat saya Pak Frans jadi sudah cukup ya Pak Andi ya, Pak Andi Akmal tadi.

Kemudian juga terkait mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Ibnu sedikit bahwa rekomendasi Panja seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Menteri tadi bahwa kami mengikuti Panja. Namun demikian, kami masih mempunyai stok SP-36 itu sekitar 19.500 ton, ZA sekitar 24.700 ton dan ada masih ada pupuk organik 35.000 ton, itu pun masih di atas stok ini masih di atas stok minimum. Jadi kalau misalnya tadi SP-36 masih 177% di atas stok minimum, ZA 209% di atas stok minimum, dan organik 110% jadi masih kami masih bisa menyalurkan ini dan ini pun sudah disetujui oleh Komisi IV untuk tetap menyalurkan pupuk-pupuk lain selain daripada NPK dan urea dan untuk stok urea dan NPK kami jamin cukup untuk saat ini karena stok urea ada 179% di atas ketentuan minimum dan juga stok NPK 150% di atas kebutuhan minimum.

Mengenai pertanyaan bahwa bagaimana kami bisa mengontrol harga komersil, sesuai dengan rekomendasi dari pada Komisi IV juga kami saat ini sedang membuat kios 1.000 kios komersil. Biarkanlah kami menyelesaikan hal ini dulu, sehingga nanti masalah harga komersil ini bisa kita kontrol. Saya rasa itu Bu yang bisa ini.

Demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau enggak salah waktu itu saya pernah mengusulkan segera koordinasi dengan kementerian teknis maupun Kementerian Keuangan perihal ada HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk non subsidi. Sudah hampir satu bulan loh Dirut saya ingatkan ya, sudah hampir 1 bulan lebih kalau enggak 1 bulan setengah apa 2 bulan. Saya minta pada Raker yang akan datang tolong ada HET tersebut. Jadi tidak ada permainan di tingkat bawah dan sesuai dengan keputusan rapat kerja yang lalu Lini 1 sampai Lini 4 menjadi tanggung jawab PIHC. Apabila ada terjadi penyimpangan PIHC turut bertanggung jawab secara hukum ya itu sudah jelas cuma saya minta HET-nya segera supaya ada kepastian dan kalau perlu dipampang di tiap kios HET pupuk non subsidi urea sekian, NPK sekian supaya jelas *clear*. Jadi jangan ada main-main ini di bawah ini begitu.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya eh Pak Slamet dulu tadi Pak Slamet belum. Maaf Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik terima kasih Pak Ketua.

Saya hanya menggarisbawahi dan perlu menjadi perhatian kita semuanya terkait dengan pernyataan Pak Jenderal Kabulog begitu ya terkait dengan harga ini juga menjadi perhatian nanti oleh Kementan bahwa hari ini Bulog tidak ada tanda kutip “tidak ada” kemampuan untuk membeli karena HET yang sudah ditentukan lebih rendah dari pasar, sehingga efeknya adalah ke CBP, begitu Pak Jenderal ya. Apakah ini nanti bisa dijawab atau ini menjadi perhatian kita semuanya kalau tadi beliau menyampaikan bahwa kalau kemudian nanti CBP di angka 1,5 juta harus ada, kemampuannya tidak ada muncullah kemudian desakan untuk impor begitu.

Nah, ini yang perlu kita waspadai bahkan saya mengatakan jangan sampai ini menjadi upaya yang memang terstruktural atau tersistem bahwa memang ke depan sudah direncanakan impor beras dengan Bulog hari ini tidak ada kemampuan karena harganya di pas seperti itu tidak bisa menyiapkan nanti pada akhirnya impor sehingga menjadi perhatian kita semuanya Pak Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi IV, Pak Kementan kita catat hari ini bahwa pernyataan Pak Kabulog bisa jadi menjadi kenyataan kalau memang tidak dikondisikan untuk CBP yang akan datang.

Demikian Pak Ketua pernyataan tadi, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih.

Pak Bakir tolong mic-nya dimatikan dulu. Silakan Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Terima kasih Ketua.

Merespons pernyataan Pak Menteri aku bingung mana yang mana. Kebijakan itu kan bukan benar salah tetapi tepat atau tidak. Baru lalu kita memutuskan bagaimana subsidi pupuk perikanan kita stop dan setelah itu ternyata ada komplain juga karena memang berikut hal yang tidak tepat di keputusan kita akhirnya di Raker di RDP terus dibawa ke Raker kita cabut juga agar tetap kasih ke perikanan, pun hari ini kalau keputusan kita dan waktu itu memang kita Alfa tidak mengundang mitra petroganik untuk dihadirkan dibicarakan pun hari ini mereka merasa ada sesuatu yang tidak ada keadilan dan mereka protes itu hal yang wajar kita respons dengan baik.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saudara Menteri Pertanian tadi masalah CBP mau ditanggapi langsung atau nanti konsultasi dulu karena kan ini tidak bisa memutuskan sembarangan loh karena wewenangnya memang di Kementerian Pertanian tetapi kan paling tidak harus konsultasi Kemenko atau Kementerian Keuangan ya.

Demikian kami akan membacakan kesimpulan rancangan rapat kerja hari ini. Tolong tampilkan. Silakan Pimpinan membacakannya gantian.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Terima kasih Ketua.

Baik saya akan bacakan kesimpulan atau keputusan rapat kerja hari ini.

Yang pertama,

1. *Komisi IV DPR RI menggarisbawahi data perencanaan pencapaian produksi bahan pangan terutama mengantisipasi kebutuhan bahan pangan menjelang hari raya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID Food dan Perum Bulog untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional.*

Pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Selanjutnya yang kedua,

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkan kinerja pertanian Tahun Anggaran 2022 yang fokus kepada upaya

penyediaan pangan nasional yang diikuti dengan upaya meningkatkan daya saing produk pertanian untuk mengisi pasar ekspor. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membuat skenario pencapaian produksi kedelai dalam jangka menengah dan panjang.

Anggota?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Izin.

Apa tidak kalimat itu, *selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membuat skenario tata kelola produksi kedelai.*

Jangan skenariolah memang kita mau main film apa.

ANGGOTA:

Road map saja yang tepat sebenarnya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Atau *road map* ya, peta, peta jalan bahasanya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Eenggak sudah tata kelola saja sudah paling benar.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Ketiga,

- Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera mengisi kekosongan jabatan Eselon I dan II dengan pejabat yang definitif dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Kementerian Pertanian.*

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, izin Pimpinan.

Kalau bisa usul poin 3 itu sekaligus bunyinya misalnya begini, *untuk segera mengisi kekosongan jabatan mendukung optimalisasi Kementerian Pertanian dan mengafirmasi kesetaraan gender.*

Eselon I tidak ada sama sekali perempuan dan di Eselon II saya kira juga masih sangat sedikit dan ini kebijakan nasional.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mbak Luluk kalau kesetaraan gender itu terserah Pak Menteri, nanti kalau enggak lolos mau dipaksakan? Ya kan nanti di situ mau ada perempuan mau enggak itu nanti tergantung *fit and proper test*-nya.

Sudah.

Anggota gimana? Pemerintah?

MENTERI PERTANIAN RI:

Minggu ini saya lantik.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Keempat,

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian terkait rencana program-program prioritas tahun 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023 fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Anggota? Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

5. *Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkan produksi kelapa sebagai alternatif solusi untuk produksi minyak goreng*

sekaligus substitusi minyak sawit melalui percepatan gerakan nasional kelapa.

ANGGOTA:

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pemerintah? Ini kan ... nya kan sudah ada dalam kesimpulan Raker yang lalu.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Enam, Komisi VI, Komisi IV DPR RI maaf.

6. *Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan untuk memanfaatkan kewenangannya dalam melakukan pemanfaatan dana perkebunan yang dikelola oleh BPDPKS lebih besar lagi untuk kegiatan peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi dan perbaikan infrastruktur perkebunan kelapa sawit sehubungan dengan kerusakan infrastruktur dan rendahnya kualitas budidaya perkebunan rakyat.*

ANGGOTA:

Setuju.

MENTERI PERTANIAN RI:

Saya berharap ditambahkan seperti apa yang tadi bahwa meninjau kembali keputusan Kementan, biar saya kan melakukan minimal melakukan..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bukan nanti di bawahnya nih ada lagi Om perkataan.

Ya. Jadi saya minta penelitian dan pengembangan, CPO tidak perlu di promosi itu akal-akalan orang BPDPKS. Enggak ada promosi juga laku kok, dihapus "promosi"nya.

Ya Anggota setuju?

Pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

7. Komisi IV DPR RI menyarankan Kementerian Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Anggota? Pemerintah?

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Usul Pak Ketua tentang standarisasi bibit Pak. Iya maksud saya..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini bukan masalah bibit Bu ini masalah kewenangan yang dipaksa diambil oleh BPDPKS, bukan masalah bibit ya oke.

Pemerintah?

MENTERI PERTANIAN RI:

Izin Ketua.

Mencabut garis miring saja Pak kalau saya sarankan atau melakukan peninjauan kembali begitu Pak. Maaf tentu ada dibalik apa yang dalam pikiran saya untuk membuat sedikit ruang untuk saya bergerak begitu. Saya sependapat sebenarnya Pak. Kami sudah bertahan ini kurang lebih dua bulan dan saya terpaksa dalam melakukan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak Pak Menteri ngomong saja coba masalahnya di mana mereka yang menyarankan untuk dicabut. Begini lho mereka secara teknis enggak mengerti ya toh, yang mengerti kan yang paling jago kan Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Perkebunan bukannya mereka secara teknis.

MENTERI PERTANIAN RI:

Ini bertahan hampir tiga bulan Bapak untuk mengeluarkan ini jadi saya butuh ini Pak, saya butuh ini tapi sedikit dibuat ruangnya mencabut atau melakukan peninjauan kembali jadi enak saya bisa melakukan konsultasi bahwa ini kesimpulan DPR yang harus saya lakukan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Atau melakukan evaluasi mungkin Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jangan evaluasi. Kita minta dicabut, sudah. Kalau perlu peninjauannya di dihapus itu biar Pak Menteri bilang saya dipaksa Komisi IV untuk mencabut karena secara teknis masalah perkebunan ada di kami di Kementerian Pertanian bukannya di Kementerian Keuangan atau BDPKS.

Setuju?

MENTERI PERTANIAN RI:

Kasih saya ruang Ketua. Kalau bisa saya kasih ruang sedikit supaya enak saya melakukannya Pak. Ada cara saya untuk menyelesaikan ini, saya tahu maksudnya Ketua tapi ini ya saya akan, saya butuh ini untuk saya berhadapan kembali. Saya pastikan itu tetapi untuk kata mencabut atau melakukan peninjauan kembali sehingga itu menjadi bagian..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Peraturan garis miring "peninjauan kembali" oke.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, izin Pimpinan. Boleh?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Begini Pak Menteri ya ini poin 7 ini ingat ya BDPKS itu bunyinya dalam undang-undang apapun itu semua termaktub di situ. Apabila Bapak ingin melakukan ini jangan sampai nanti Bapak diasumsikan tidak melaksanakan perintah undang-undang ya. Saya menggarisbawahi itu saja, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya di dalam undang-undang kan menyatakan Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Perkebunan. Maka yang nyuruh-nyuruh nyabut ini kan, ampun dah. Bagaimana harusnya ditelaah dulu Sekjen bagian hukumnya, Dirjen Perkebunannya. Ini undang-undang ini begitu loh. Jadi peninjauan mau tetap dicantumkan?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Kalau undang.. Ketua izin.

Kalau undang-undangnya memang sudah menyatakan secara tersurat secara teknis itu Dirjen Perkebunan sebagai apa, kenapa ini harus melakukan proses peninjauan ulang karena peraturan itu bertentangan dengan undang-undang kan sederhana Pak Menteri. Kita paham apa yang dibalik pikiran Pak Menteri itu abcd-nya atau gajah-gajahnya kira-kira begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau saya jujur saya tidak suka ada kata-kata melakukan peninjauan kembali, cabut saja sudah wewenang kita hak kita itu saja ya.

SEKJEN KEMANTAN RI:

Izin Pimpinan.

Pak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan.

Maksud Pak Menteri melakukan ada ada ada mencabut masih ada Pak kalimat mencabutnya tapi juga melakukan peninjauan kembali jadi tadi kita sepakat Bapak, Pak Pak Ketua bahwa kita pun juga sampai saat ini dua bulan ini Bapak. Nah, melakukan peninjauan kembali itu dengan maksud nanti, bukan secara teknis rekomendasi teknisnya tetap tidak ada *it's okay* karena itu administrasi tapi semua harus mengikuti pedoman teknis Kementan. Mulai memilih bibit, menanam begitu Bapak makanya itu diberi celah begitu Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya kan tadi sudah jelas Permennya bunyinya apa sudah saya bacakan tadi, tidak ada rekomendasi teknis. Ini kita punya lho kita punya ini. Apakah BPDPKS mengerti mengenai teknis perkebunan? Tidak mengerti. Apa Kementerian Keuangan mengerti? Sudahlah kita tegas-tegas saja Pak Menteri itu saja kalau menurut saya, yang penting apa, kepentingan kita untuk rakyat bukan kepentingan segelintir. PSR itu adalah untuk rakyat terutama infrastruktur, jalan dan lain-lain itu saja. Pak Menteri kan tinggal bilang, saya dipaksa Komisi IV sudah. Kalau meninjau nanti Pak Menteri enggak usah meninjaulah biarin saja dulu nanti bla bla bla bla bla janganlah, tegas-tegas saja.

MENTERI PERTANIAN RI:

Saya, kami butuh ini Pak, kami butuh. Saya tahu teknisnya, butuh pedoman untuk melakukan pencabutan tetapi kasih ruang untuk bahwa ...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke Anggota gimana setuju enggak dengan ini?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Begini izin Pimpinan.

Kalau ada klausul melakukan peninjauan kembali berarti dikasih waktu penjualan kembali itu berapa lama. Kalau butuh kajian itu apakah sebulan atau setengah bulan atau dua bulan begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang lain?

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Izin Ketua. Kalau diperkenankan bahasanya bukan peninjauan kembali tapi dievaluasi, peninjauan kembali kan ini bukan kasus ya.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Jadi bahasanya ini Ketua evaluasi untuk mencabut. Jadi setelah dievaluasi baru dicabut itu prosesnya seperti itu Ketua. Jadi Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi untuk mencabut.

ANGGOTA:

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

ANGGOTA:

Kalau tadi penjelasan Pak Sekjen arahnya bahwa Permen itu akan tetap berlaku ya orientasinya nanti melalui peraturan apa namanya menteri, cabut saja Pak Ketua.

Terima kasih.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Begini. Izin Pimpinan.

Kita konkret saja. Pimpinan konkret saja.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tolong satu-satu.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Izin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Kita sudah hampir 10 menit hanya membahas ini. Saya pikir untuk kata yang paling tepat untuk mengakomodir dua kepentingan atau dua pendapat saya pikir evaluasi untuk mencabut peraturan itu paling, paling tepat.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Suhardi.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Kalau tujuan kita ingin mencabut maka ya kita cabut. Kalau tujuan ingin meninjau yang kita tinjau tapi saya kira tujuan kita hanya mencabut ya cabut begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya rasa ini kata-kata yang sudah tepat Pak Menteri, *Komisi IV menyarankan Kementerian Pertanian melakukan evaluasi untuk mencabut.* Ya Anggota setuju?

ANGGOTA:

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pemerintah setuju?

PEMERINTAH:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

8. *Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data kepemilikan kebun kelapa sawit perorangan, koperasi atau perusahaan yang masuk kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mendorong percepatan legalisasi kebun rakyat maksimal 5 hektar agar dapat mengakses program pengembangan sawit rakyat.*

Anggota?

ANGGOTA:

(suara tidak terdengar)

PEMERINTAH:

Setuju Pak.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya izin sebentar, saya enggak yakin Dirjen BUN punya catatan ini itu saja. Jadi LHK itu saya tanya berapa kebun ilegal kamu, menurut poligon katanya konon kemungkinan itu jawabannya. Jadi kalau ditanya enggak, enggak tahu sana sebelah itu, makanya selalu saya katakan selalu saya katakan setiap rapat kerja yang merusak hutan Indonesia adanya di sebelah kantornya.

Itu saja lanjut Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

9. *Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk segera mengaplikasikan sistem digitalisasi stok pupuk yang dilaporkan kepada BPK RI setiap waktu untuk mengantisipasi penyimpangan dan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dan segera merealisasikan*

kegiatan agro solution dengan target 252.000 hektar di seluruh Indonesia.

Anggota?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Matikan dulu mic-nya sebentar. Ini bagaimana masalah ini?

DIRUT PIHC (BAKIR PASAMAN):

Ini kami yang 250 itu, itu adalah sinergi antara BUMN seperti yang tadi disampaikan dengan oleh RNI.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sinergi BUMN untuk pencapaian begitu kan.

DIRUT PIHC (BAKIR PASAMAN):

Jadi termasuk ya di agro solution-nya ini. Untuk agro solution itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya masalah kerja sama kan urusan mereka lah, kita enggak usah ikut campur ya, setuju ya?

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Nanti keliling-kelilingi ya enggak supaya *surprise*.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin Pimpinan sebelum ke poin 10 karena masih kaitannya pupuk tadi kan ada juga usulan yang terkait penetapan HET ya. Saya tadi juga bertanya dan Pimpinan juga tadi menanyakan kalau enggak dicantumkan di situ sekalian ini kita mau menunggu sampai kapan yang HET pupuk yang komersial.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mbak Luluk itu sudah ada kesimpulan yang lalu. Ya iya kan tadi Wasekjen nagih, Anda enggak dengar saya nagih? Ya toh saya bilang segera

ditindaklanjuti pada rapat berikutnya ada jawaban. Jangan nanti setiap itu masuk lagi masuk lagi tapi tidak ada realisasi.

Ya lanjutkan Pimpinan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ketua, Ketua, karena ini menyangkut masalah pupuk saya sekalian. Jadi nomornya itu nomor 10. Jadi nanti yang nomor 10 jadi nomor 11 apa namanya kesimpulan dari rapat kerja ini yang baru.

Komisi IV coba ditulis, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian untuk menjalankan Permentan Nomor 21 Tahun 2001, tentangnya saya tidak hafal.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Lah orang ngomong kok itu tentangnya enggak hafal gimana. Jangan menjerumuskan Pimpinan dong. Enggak paling enggak 2001 itu apa bunyinya masalahnya apa harga kah, pengaturan kah.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Tentang kalau tidak salah bunyinya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Entar tidak salah loh.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Entar tak buka Google dulu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya buka buka silakan saya tunggu.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Pak Sekjen bisa membantu saya untuk tentangnya itu..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya sudah dihafalin dulu lanjutkan kesimpulan yang lain.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Itu berarti nanti kembali ke..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya stop dulu stop dulu sudah sudah, paham saya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Oke kita lanjut. Selanjutnya,

10. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah ke Kementerian Keuangan untuk membayar tagihan pelepasan stok CBP kepada Perum Bulog sebesar Rp185.809.449.124,55,- sehingga perusahaan dapat beroperasi melakukan tugas dan fungsinya sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan pokok nasional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan administrasi penagihan dan pembayaran atas tagihan Perum Bulog.

Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pemerintah setuju ya? Oke.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Sudah bisa kembali Ketua, saya sudah ketemu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh bisa yang penting tahu judul, tahu isi.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Iya. Jadi Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menjalankan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian 2021.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

2001 apa 2021?

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

2021.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Itu saja judul saja sudah salah.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

2021.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya ini agak bingung juga ini kalau HET pupuk subsidi itu kan sudah *fix*, yang belum *fix* itu HET non subsidi.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Iya tapi di sini ada.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

HET-nya kan sudah jelas Pak enggak ada perubahan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ya sudah jelas memang, sudah jelas. Masalahnya adalah tahun 2022 dasarnya kan Permentan 2021 untuk penyaluran pupuk subsidi. Nah, sementara ada edaran surat dari yang ditandatangani Pak Hatta.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Direktur Pupuk?

DIRJEN PSP:

Izin boleh Pak Ketua, izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

DIRJEN PSP:

Izin Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua. Izin Pak Menteri.

Jadi gini kan sudah kita jalankan ini Pak inilah yang berjalan berlaku hari ini Pak tapi kan waktu Raker kita kemarin RDP itu kan nanti Panja itu akan diberlakukan per 1 Juli. Nah, surat itu kami kirimkan ke PI adalah untuk

warning Pak karena ada hasil Panja, itu saja Pak maksudnya itu Pak. Ini kita sudah jalankan inilah yang dijalankan hari ini Pak. Selama 2022 ini inilah Permentan alokasi untuk seluruh daerah, itu sudah jalan Pak makanya kan pupuk organik masih terus Bapak, izin. Masih terus semuanya masih terus tapi nanti di per Juli diminta itu nanti yang dua jenis itu tadi permintaan Panja Pak.

Terima kasih Pak izin, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi Pak Ibnu masih tetep mau dicantumkan karena sudah di, sudah jalan?

DIRJEN PSP:

Sudah itu yang kita jalankan Pak hari ini Pak untuk saat ini.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ini sudah jalan kan pada bulan mulai Januari 2022 dua itu kan sudah jalan pupuk subsidi yang semua itu disubsidi. Tadi itu sudah terbuka oleh Pak Direktur..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dirjen ini Dirjen Pak makanya sering masuk Bapak.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Pak Dirjen PSP.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya betul pintar.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Itu kan tak bulan Juli itu kan mau dihentikan cuman dua.

DIRJEN PSP:

Itu izin Pak hasil Panja Pak itu ditulis di situ nanti per 1 Juli supaya diminta keputusan kita yang kemarin itu kan ada dua jenis, urea, NPK, 9 komoditas yang yang dijelaskan Bapak-Bapak tadi juga itu yang Panja itu Pak. Itu Pak, Pak Ketua izin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Izin Pak Ketua. Ketua.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Pimpinan, Pimpinan izin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya Pak Haerudin ini kan sudah ini kan sudah di sudah jelas ini apalagi yang mau ditanyakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Kita kan sudah paham ini ya karena ini pembicaraan dua minggu lalu atau tiga minggu lalu tentang persoalan 1 Juli tuh ada pertanyaan dari Mr. Bakir waktu itu dimulai kapan. Nah, tadi kan kita sampaikan bahwa proses kemarin di keputusan kemarin dan dijalankan untuk *warning* itu tidak direspons oleh masyarakat secara luas karena ini ada RDPU yang kemarin. Nah, apakah kita akan tetap melanjutkan ini yang diprotes ataukah kita akan merubah artinya apa yang dipahami oleh Mas Ibnu itu Permen yang Nomor 21 Tahun 2021 tetap berjalan pelaksanaan sampai 2023, itu yang dimaksud oleh Pak Ibnu tadi itu.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Saya menjadi heran tapi enggak perlu diperdebatkan lagi ini hasil Panja yang dikeluarkan oleh Komisi IV dan semua Fraksi sepakat itu dan Kementerian melakukan tindakan sesuai dengan hasil keputusan Panja. Tidak perlu dibahas lagi dan tidak perlu di-konkret-kan lagi. Jadi ini sudah jelas yang sudah jalan. Tolong Ketua ini di poin 10 tidak mengurangi rasa hormat tolong ini ditiadakan kalau enggak Panja yang dikerjakan oleh seluruh Fraksi Komisi IV sia-sia juga. Tolong ini tidak usah dibahas lagi karena ini marwah kita juga Komisi IV.

Kemudian izin Pimpinan, saya mau melihat Raker kemarin kita Komisi IV sudah meminta Kementerian Pertanian melakukan restrukturisasi proporsi anggaran. Tolong ini tadi saya sudah sempat menyinggung ada beberapa anggaran yang tidak tepat sasaran dan mungkin akan dialokasikan ke anggaran yang benar-benar menjadi kebutuhan para petani yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di sini ada 5 poin ada kebutuhan petani antara lain program vertical dryer, bengkel alat mesin pertanian dan juga pupuk organik pengembangan kawasan peternakan pengembangan tanaman kelapa dan pengembangan sayur buah, serta combine harvester yang beberapa saat kemarin sudah ada yang terakomodir dan belum terakomodir. Saya melihat di sini juga, ada yang mau ditambahkan Pak?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Pimpinan. Saya kira kalau yang usulan Pak Ibnu tadi daripada kita panjang ini debat ya mungkin di *skip* dulu ya artinya ini enggak menjadi kesimpulan Pak Ibnu karena kalau enggak ini ya saya cuma menekankan tadi mengenai masalah apa namanya dana anggaran optimalisasi lahan Pak Ketua yang 800 miliar itu ya menurut dari apa namanya dari PEN itu kebutuhannya hanya 464 miliar. Ini mungkin sebaiknya dialokasikan kepada program-program kemasyarakatan misalnya pupuk organik atau UPPO atau yang lainnya yang kira-kira memang sangat dibutuhkan di Dapil Anggota.

Mungkin demikian Ketua.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Izin Pimpinan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Sebentar, sebentar biar persepsinya tidak salah. Ini kan bukan persoalan marwah, waktu kita tetap sama memutuskan tentang mencabut subsidi dari perikanan dan kita tetap berikan lagi padahal sudah keputusan Panja kan kita tidak merusak marwah apapun, tapi ya tepat atau tidak pada sebuah kebijakan itu. Nah, hari ini mereka meminta begini kenapa tidak mereka lakukan toh perikanan juga bisa melakukan yang sama padahal sudah keputusan Panja kita cabut.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya rasa ini tidak perlu dimasukkan nanti kan berlaku bulan Juli ya toh. Kalau memang tidak tepat ya kan kita revisi Panjanya, yang boleh yang tidak diubah itu Alquran sama Alkitab yang lain masih boleh kok. Undang-Undang saja boleh kok ya.

Mengenai tadi yang 425 miliar untuk perikanan saya juga ditegur sama Pimpinan saya, kok kenapa hilang, bukannya hilang, ada temuan BPK bahwa itu bukan tupoksinya Kementerian Pertanian, tupoksinya KKP. Maka saya bilang KKP, Dirjen segera koordinasi dengan Dirjen PSP yang men-*collect* data hal untuk tambak ikan.

Oke setuju? Ada lagi yang mau dimasukkan?

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Pimpinan. Ketua masuk dulu kesimpulan yang karena ini sudah kesimpulan raker kemarin yang saya singgung tadi bukan yang masalah tadi yang soal *refocusing* anggaran itu tolong dimasukkan dulu karena ini karena ini hasil keputusan rapat kerja dan saya sudah melihat ada beberapa tempat

anggaran yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan para petani termasuk UPPO dan juga pupuk organik. Tolong masukan kesimpulan dulu.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Interupsi Ketua.

Tadi Ketua Pak Sudin bilang berbicara bahwa kalau nanti bulan Juli ternyata itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat bisa dievaluasi lagi itu mohon, mohon dicantumkan di kesimpulan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bapak sama saya sama loh Pak, kita Anggota DPR Pak. Saya rasa kita saling percaya, saya yang jamin itu saja. Jadi enggak perlu apapun dimasukan kesimpulan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Oke kalau begitu kan penjaminan ini didengarkan oleh semua Anggota

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya menjamin kalau tidak sesuai dan banyak komplain kita evaluasi kembali itu saja.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Jadi mungkin redaksi kalimatnya Ketua yang kesimpulan yang tadi kita usulkan tadi.

Pimpinan.

Saya usulkan mungkin ya.

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan restrukturisasi proporsi anggaran untuk program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani yang disesuaikan dengan kebutuhan petani atau peternak di daerah antara lain tadi usulannya tadi apa namanya UPPO kemudian pupuk organik. Kemudian juga untuk alat mesin pertanian ya yang dibutuhkan.

Oh pelan-pelan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Andi Akmal coba silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Proporsi anggaran untuk 5, untuk program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran untuk program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani yang disesuaikan dengan kebutuhan petani atau peternak di daerah, antara lain programnya tadi Ketua kita usulkan tadi. Pupuk organik kemudian UPPO dan alat mesin pertanian.

ANGGOTA:

Izin Pak Ketua. Oke siap.

Ini bukannya yang, yang lalu sudah ada terus cuma tinggal kementerian yang belum mengusulkan ya bukannya begitu Ketua?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya Anggota “rem” dulu biar Sekjen menjelaskan karena setahu saya ini sudah masuk yang lalu cuman implementasinya belum dijabarkan secara detil ke kita ya begitu kan, betul?

Pak Andi ini kan sudah masuk yang lalu kesimpulannya tinggal pelaksanaannya belum. Apa kita bicara implementasinya segera dilaksanakan?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Itu penekanan ya mungkin Ketua, penekanan yang kemarin kan belum ada anggarannya ya ini kan sudah ada anggaran jadi ya memang tidak sesuai dengan program utama dialihkan ke program utama begitu ya begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Coba Sekjen dibantu untuk implementasi segera dilaksanakan.

SEKJEN KEMANTAN RI:

Baik, kalau diperkenankan karena kemarin sudah disimpulkan dan isinya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua kalau boleh berpendapat,

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan restrukturisasi proporsional anggaran untuk program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan ini cuma normatif oke Pak dan itu sudah disimpulkan kemarin begitu. Nah, selanjutnya Kementerian Pertanian, selanjutnya ya DPR RI meminta Kementerian Pertanian, mohon maaf selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera mengimplementasikan ya restrukturisasi proporsi anggaran tersebut. Itu menurut kami Bapak tinggal implementasinya saja.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Pimpinan izin.

Saya setuju memang yang disampaikan Pak Sekjen itu benar tapi saya melihat di beberapa alokasi penganggaran yang ada di Kementerian Pertanian itu tadi sudah saya sampaikan ada alokasi anggaran alokasi buat optimalisasi lahan itu kan ada 804, yang direkomendasikan untuk optimalisasinya itu kan cuman 464, misalkan itu kan di sana ada kelebihan anggaran. Kalau yang Bapak sampaikan itu saya setuju tapi bisa enggak semua ini kan, semua ini kan harus tepat sasaran Pak Sekjen dan tidak perlu kita bahas dan pengalokasian anggaran ini yang harus tepat ini yang kami minta kepastiannya. Kalau untuk berdasarkan kegiatan saya yakin dan percaya ada, tapi untuk alokasinya cukup apa tidak itu yang perlu kita tegaskan. Itu saja Pak, terima kasih.

SEKJEN KEMANTAN RI:

Baik Bu Alien. Jadi mungkin kami desain dulu nanti kami tunjukkan itu seperti apa angkanya supaya nanti supaya nanti kita bisa secara teknis bisa kita diskusikan Bu Alien.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Begini Pak Sekjen, Raker ini adalah rapat tertinggi pertama, kami juga memutuskan ini kemarin di Raker Pak. Kami sudah tahu bagaimana cara proses penganggaran yang ada di semua mitra kami, semua iya tapi tidak sesuai nantinya dan itu nanti terjadinya salah paham saling tuduh menuduh antara satu termasuk Pimpinan kami itu pasti menjadi bahan untuk kecurigaan. Jadi itu kalau memang harus diputuskan nanti tolong nanti diajukan untuk menjadi kesepakatan bersama yang mengikat begitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Boleh enggak setelah alat mesin pertanian kita tambahkan dan akan dibahas pada rapat dengar pendapat yang akan datang ya?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Ketua. Izin Pak Ketua.

Jadi seingat saya betul tadi sudah dicantumkan UPPO-nya justru yang belum tercantum itu malah P2L walaupun di tadi pengantar sama Pak Menteri sudah dijelaskan tapi jumlahnya itu yang sedang ditunggu oleh CPCL-nya yang menurut saya justru yang harus definitif disampaikan itu P2L. Ini sepengetahuan saya begitu Pak Ketua mohon maaf kalau kurang pas.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kesimpulannya sudah setuju Anggota? Pak Slamet percayalah sama saya ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Siap kalau Pak Ketua sudah bilang begitu berarti garansinya Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pemerintah?

SEKJEN KEMANTAN RI:

Izin. Kalimatnya belum, belum nyambung ini Bapak sebentar. Kalau disetujui tambahan saya sebenarnya itu pasti dilakukan oleh Kementan maka langsung saja dan bermanfaat bagi yang tadi saja kalau begitu. Nanti dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat ini Bapak. Kalau yang selanjutnya itu pasti dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Ya jadi, *Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan restrukturisasi proposal anggaran untuk program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani yang disesuaikan dengan kebutuhan petani, antara lain: anggaran pengembangan pupuk organik, pupuk dan Alsintan dan akan dibahas dalam rapat dengar pendapat selanjutnya.*

Ini Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Anggota sudah membaca, setuju? Pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami menutup rapat kerja ini kami persilakan Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutup. Silakan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pak Menteri izin Pak Pimpinan.

Eggak, nggak, nggak saya hanya ingin memastikan kesimpulan tadi saja, satu, satu saja terkait Bulog utang Bulog tadi saya harap ini kan kejadiannya kan berulang terus Pimpinan, supaya dari Kementerian Pertanian kalau memang betul mau kooperatif tolong itu ditandatangani jangan nanti Bulognya sendirian diumpenin akhirnya nggak jadi juga, menumpuk saja terus.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Itu kan sudah jelas Kementerian Pertanian untuk membantu menyelesaikan ya, itu di Dirjen siapa? PSP?

MENTERI PERTANIAN RI:

Badan Ketahanan Pangan Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mana Badan Ketahanan Pangannya pejabatnya PLT-nya? Eggak datang? Siapa itu namanya? Sarwo Edi, ya sampaikan Sekjen ya secepat mungkin selesaikan ini. Takutnya nanti Pak Buwasnya ingkar janji, suruh menyerap beras rakyat, duitnya masih utang belum dibayar administrasi belum selesai di Pertanian.

Ya silakan sudah kata penutup silakan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Sebelum saya kata penutup Pak, sebenarnya saya mau masukan kesimpulan satu itu menetapkan Lartas (Larangan Terbatas) pada kedelai, gandum, dan singkong pada saatnya. Jadi dimasukkan situ supaya saya

berjuang untuk mendirikan Lartas Pak. Kalau tidak kita tanam setengah mati kedelai kemudian besok impor hancur lagi begitu, gandum juga seperti itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau Anggota setuju saya masukan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin Pimpinan, izin.

Untuk masalah kesimpulan yang diminta sama Pak Menteri ini lebih baik diakomodir melalui Pansus, jadi nanti kita bahasnya keseluruhan.

Terima kasih Pimpinan, izin Pimpinan.

ANGGOTA:

Tapi bagus juga kalau sekarang di ... penguatan saja penguatan saya kira masukan saja Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tadi Pak Menteri minta apa saja untuk Lartasnya?

MENTERI PERTANIAN RI:

Lartas kedelai, gandum, singkong.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau gandum kan kita enggak ada bos.

MENTERI PERTANIAN RI:

Iya Pak tapi karena gandum terlalu besar masuk, dihajar jagung kita.

ANGGOTA:

Pak Ketua minyak kelapa justru.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau singkong saya rasa enggak perlu lah. Kalau ada bilang Indonesia kekurangan singkong, itu pengusahanya nakal saya bilang itu saja.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Ketua sedikit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Saya setuju dengan Mbak Kiki jadi yang disampaikan oleh Pak Menteri justru secara politis dan kedudukan keputusan lebih kuat kalau kemudian kita mulai dengan Pansus sehingga..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya rasa Pak Slamet Pansus itu hanya satu hal untuk minyak goreng. Kalau masalah kedelai belum ada usulan Pansus.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Oke terima kasih.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin Pimpinan.

Saya setuju dimasukan kesimpulan soal Lartas kedelai. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya sudah masukan saja dulu nanti masalah ada Pansus ya kita masukan. Silakan masukan. Pak Sekjen dipandu dulu apa kata-katanya.

SEKJEN KEMANTAN RI:

Mohon izin Pak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Pak Menteri mohon izin.

Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah ya, meminta kepada pemerintah, kepada, meminta kepada pemerintah untuk menerapkan mekanisme larangan terbatas (Lartas) ya untuk komoditas kedelai. Untuk menerapkan mekanisme importasi larangan terbatas ya mekanisme importasi, mekanisme importasi larangan, kebalik, kebalik, kebalik Mas. Ya mekanisme importasi larangan terbatas untuk komoditas kedelai, gandum, singkong, singkong Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau saya singkong enggak setuju. Kalau jagung boleh dimasukan.

SEKJEN KEMANTAN RI:

Jagung iya, iya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke Anggota, sudah Pak Kasdi sudah cukup sudah jangan banyak-banyak ya sudah cukup ya. Pemerintah setuju ya?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Pimpinan.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Yah sudah diketok lagi.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Yang pertama tentu kami merasa sangat banyak manfaatnya rapat kerja kita hari ini karena situasi menurut saya masalah pangan tidak dalam keadaan sehat-sehat saja atau dalam pengertian tidak dalam kondisi baik-baik saja, karena harga secara global mempengaruhi harga-harga nasional kita. Dan kondisi ini akan sangat-sangat memberikan tekanan pada kami menghadapi mulai April-Mei dan selanjutnya Bapak. Oleh karena itu kami akan coba seperti apa yang diminta oleh di Komisi IV untuk benar-benar maksimal mempersiapkan segala hal yang terkait dengan pendekatan-pendekatan yang terkait dengan *buffer stock* maupun ketersediaan secara keseluruhan minimal sampai kepada 12 komoditi yang ada.

Pimpinan dan Bapak sekalian yang kami hormati.

Satu pernyataan yang saya catat luar biasa Pak Ketua. Ada pernyataan Ketua masalah beras Kementan hebat, barangkali enggak sadar menyebut itu tapi ini akan menjadi catatan luar biasa untuk saya karena pada saat kita putus sama-sama ditempat ini untuk tidak impor Bapak, banyak yang minta supaya Kementan pasti membuat masalah bagi negeri ini dan ternyata kita selama ini rupanya kita belasan tahun melakukan importasi beras rata-rata 3 juta ton per tahun ada saat-saat di kami 7 ton Bapak. Ternyata kita sudah 3 masuk 3 tahun ini saya cacat benar-benar ini Pak, kalau bisa disertifikatkan emaskan supaya ini menjadi kenangan yang luar biasa. Tapi saya yakin ini keceplosan Ketua karena biasanya Ketua tidak pernah mengatakan hebat apapun yang saya buat dan saya biasa terima

sebagai *challenge* karena kalau hebat nanti saya tidur Bapak, dan kalau saya pulang dari sini biasanya Pak teman-teman saya nih terenergi *Insy Allah* seperti itu. Saya bukan *service lip* saya terbiasa dengan bicara apa yang ada dan saya pikir ini yang perlu sekali kami ada kesatuan emosional minimal dalam praktek pasti ada dinamika Bapak terutama dan tantangan-tantangan.

Besok itu pupuk harga naik ya Pak karena fosfat di luar negeri naik tiga kali lipat Bapak belum pengiriman transportasi jadi masalah. Kemudian kita kan panen raya April-Mei luar biasa. Kalau panen itu biasa harga turun, pupuk naik harga lain naik ini menjadi pekerjaan saya ya mohon kita sama-sama. Saya yakin kami tidak jago untuk menghadapi ini tanpa kebersamaan dengan Komisi IV apapun saya pertaruhkan segala kemampuan yang ada di Kementan Bapak, cuma kami minta tolong untuk di-*back-up* bersama-sama, belum tentu kami benar menghadapi semua tantangan yang ada.

Kami sudah menyiapkan *buffer stock*-nya, kami sudah persediaan mappingnya, sekarang uangnya dari mana Bapak. Kami mau tanam 300.000 hektar tapi uangnya tidak tahu ambil dari mana akhirnya lari ke KUR dan KUR ini kan tidak merangsang rakyat dan bank juga terbiasa dengan KUR dengan jagung, dengan kedelai belum Bapak. Ini tantangan-tantangan yang kami akan lewati Bapak. Cuma mohon pemahaman dari kita semua dan mulai sekarang kita bicara tentang Pajale kembali Bapak izin, karena saya berharap yang paling pertama tidak boleh bersoal adalah beras. Terima kasih Ka Bulog kami bisa sama-sama, apapun terjadi beras tidak boleh bersoal. Yang kedua gandum akan bersoal dalam waktu dekat. Kita siapkan sagu Bapak, kita siapkan singkong, kita siapkan sorgum, bisa. Pak Ketua kasih uangnya sini, Bapak jangan cuma perintah saja.

Saya tadi dengan Presiden secara terbuka jujur saya mengatakan seperti itu. Saya lakukan ini, kalau tidak bersoal dan harus cepat Bapak. Kalau tidak saya pakai dana bank dulu atau pinjaman dari mana dulu begitu.

Nah, itu Bapak Pimpinan, sehingga saya masih perlu kawalan mungkin dari Komisi IV supaya saya enggak salah Bapak karena kami akan hadapi ini tantangan ini pasti kita hadapi. Bulog harus turun Pak menyerap semua yang ada ini kalau tidak harga turun pupuk naik, harga lain naik rakyat marah sama kita. Kita kurangi saja 9 jenis pupuk menjadi 2 ini masalah besar itu. Bapak belum apa-apa sudah diserang di mana-mana apalagi saya Bapak dan itu Panja. Saya sudah sebenarnya enggak setuju. Nah, kalau itu berarti kita akan main dengan pupuk tetap cair organik tetapi menggunakan KUR yang kita turunkan dia punya bunga.

Kemarin tadi ini saya sudah bicara sama Presiden jujur saya katakan bahwa ini tidak bisa Bapak karena hanya 10. Bapak saya kekurangan 13 triliun karena yang kita kasih cuma 23 triliun untuk 9-8 juta sampai 9 juta, kita harus naikan sampai 11 kalau begitu saya butuh 38 triliun kurangnya 13 triliun. Dia bilang gimana caranya begitu, jadi kita semua di sini berpikir begitu Presiden juga panik banget seperti itulah pikiran-pikiran yang ada dan apapun Pak Ketua, Pimpinan, saya tanggung jawab saya akan ada di sini segalanya kita pertaruhkan minimal garansi institusi kepada siapapun yang bisa turun

tangan untuk itu. Tidak boleh negara tidak ada di saat rakyat menghadapi tantangan dan saya setuju Pak minimal bersama Komisi IV saya katakan ini bisa kita lakukan, sekecil apapun harus ada langkah dari kita dan saya siap Bapak.

Insyah Allah dalam 2 bulan ini 3 bulan ini kami berharap mengganggu Komisi IV Ketua, Pimpinan untuk bisa bersama-sama menghadapi tantangan ini. Cukup minyak goreng yang lain kita ada hadapi Pak dan kita persiapkan minimal tentu ada langkah dari kita bersama Komisi IV terutama di konstituen yang Bapak tempati untuk melakukan tanggung jawab.

Kurang lebih terima kasih atas segala arahannya hari ini. Terima kasih atas kesimpulan yang ada, akan kami coba implementasi seperti apa yang adanya. Kalau ada yang berlebihan kami minta maaf, sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya ini bicara jujur, saya tidak pernah memberikan apresiasi atau basa-basi munafik. Kalau orang itu salah, saya bilang bener itu saya enggak mau. Kalau benar baik, saya katakan baik, tapi kalau salah saya katakan salah, itu saja. Masalah beras tadi saya lihat dari datanya saya bilang kenyataannya di mana-mana tidak ada kekurangan beras, tidak ada antrian beras. Kalau ada juga saya sikat hari ini. Iya termasuk tadi Menteri bicara sama Bulog segera serap ya Bulog juga duitnya enggak ada bagaimana.

Oke terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin ada khilaf dan kekurangan dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil alamin* rapat kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**(KETOK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.15 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002